

# MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



Kelompok  
Kompetensi

**SD KELAS TINGGI**  
TERINTEGRASI PENGUATAN  
PENDIDIKAN KARAKTER  
DAN PENGEMBANGAN SOAL



## **PEDAGOGIK**

Perancangan Pembelajaran  
yang Mendidik

## **PROFESIONAL**

Penerapan Nilai, Norma,  
Moral Pancasila



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2017

## **MODUL**

### **PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

## **SEKOLAH DASAR (SD)**

### **KELAS TINGGI**

#### **TERINTEGRASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENGEMBANGAN SOAL**

## **KELOMPOK KOMPETENSI G**

### **PEDAGOGIK:**

#### **PERANCANGAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK**

Penulis:

**Dr. Supinah**

Penelaah:

**Dr. Elly Herliani, M.Phil**

**Dr. Anne Hafina, M.Pd:**

Penyunting:

**Cahyo Sasongko, S.Sn**

### **PROFESIONAL**

#### **PENERAPAN NILAI, NORMA, MORAL PANCASILA**

Penulis:

**Dyah Sriwilujeng**

Penelaah:

**Sucahyono. MJ**

**Djunaidi**

**Yayan Sofian**

**Basuki**

**Rika**

Desain Grafis dan Ilustrasi:

**Tim Desain Grafis**

*Copyright © 2017*

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter prima. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Peta profil hasil UKG menunjukkan kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan pedagogik dan profesional. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG pada tahun 2016 dan akan dilanjutkan pada tahun 2017 ini dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dilaksanakan melalui tiga moda, yaitu: 1) Moda Tatap Muka, 2) Moda Daring Murni (online), dan 3) Moda Daring Kombinasi (kombinasi antara tatap muka dengan daring).

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat



dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru moda tatap muka dan moda daring untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, April 2017

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga  
Kependidikan,



**Sumarna Surapranata, Ph.D.**

NIP 195908011985031002





## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru jenjang Sekolah Dasar Guru Kelas Awal, Guru Kelas Tinggi, mata pelajaran Seni Budaya, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Modul ini merupakan dokumen wajib untuk Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru merupakan tindak lanjut dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 dan bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program diklat, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar pada tahun 2017 melaksanakan review, revisi, dan mengembangkan modul paska UKG 2015 yang telah terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Penilaian Berbasis Kelas, serta berisi materi pedagogik dan profesional yang akan dipelajari oleh peserta selama mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan jenjang Sekolah Dasar ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan wajib bagi para peserta diklat untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik dan profesional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.





Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada pimpinan PPPPTK IPA, PPPPTK PKn/IPS, PPPPTK Bahasa, PPPPTK Matematika, PPPPTK Penjas-BK, dan PPPPTK Seni Budaya yang telah mengizinkan stafnya dalam menyelesaikan modul Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar ini. Tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada para widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP), dosen perguruan tinggi, dan guru-guru hebat yang terlibat di dalam penyusunan modul ini.

Semoga Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru ini dapat meningkatkan kompetensi guru sehingga mampu meningkatkan prestasi pendidikan anak didik kita.

Jakarta, April 2017

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Dasar



**Poppy Dewi Puspitawati**  
NIP. 196305211988032001



# MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



Kelompok  
Kompetensi

## PEDAGOGIK

Perancangan  
Pembelajaran yang  
Mendidik



Edisi  
Revisi  
2017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2017

**MODUL  
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

**SEKOLAH DASAR (SD)  
KELAS TINGGI  
TERINTEGRASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
DAN PENGEMBANGAN SOAL**

**KELOMPOK KOMPETENSI G**

**PEDAGOGIK:  
PERANCANGAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK**

Penulis:

**Dr. Supinah**

Penelaah:

**Dr. Elly Herliani, M.Phil**

**Dr. Anne Hafina, M.Pd:**

Penyunting:

**Cahyo Sasongko, S.Sn**

Desain Grafis dan Ilustrasi:

**Tim Desain Grafis**

*Copyright © 2017*

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



## Daftar Isi

	Hal
<b>Kata Sambutan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	4
C. Peta Kompetensi .....	4
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Cara Penggunaan Modul .....	6
<b>Kegiatan Pembelajaran 1 Komponen Perencanaan Pembelajaran Dan Penggunaan Sumber Belajar Atau Media Dalam Pembelajaran Di Sekolah</b>	
<b>Dasar</b> .....	<b>13</b>
A. Tujuan.....	13
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	13
C. Uraian Materi.....	13
D. Aktifitas Pembelajaran .....	32
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	34
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	34
<b>Kegiatan Pembelajaran 2 Penyusunan Rancangan Pembelajaran Di SD/MI Dengan Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter</b> .....	<b>35</b>
A. Tujuan.....	35
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	35
C. Uraian Materi.....	35
D. Aktivitas Pembelajaran .....	55
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	59
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	60





<b>Kegiatan Pembelajaran 3 Pelaksanaan Pembelajaran Di SD/MI Dengan Mengintegrasikan Nilai-Nilai Karakter .....</b>	<b>61</b>
A. Tujuan .....	61
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	61
C. Uraian Materi .....	62
D. Aktivitas Pelaksanaan Pembelajaran.....	72
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	73
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	74
<b>Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas .....</b>	<b>76</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>79</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>83</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>85</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>89</b>





## Daftar Gambar

	Hal
Gambar 1. Pengembangan Nilai-nilai Karakter .....	3
Gambar 2. Alur Model Pembelajaran Tatap Muka.....	6
Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh.....	7
Gambar 4. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In.....	9
Gambar 5. Kerucut Pengalaman Edgar Dale (1970).....	23
Gambar 6. Skematik Analisis Kebutuhan Media.....	30
Gambar 7. Beberapa aktifitas siswa SD.....	36





## Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1 Daftar Lembar Kerja Modul.....	12



# Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru diantaranya dikembangkan menjadi kompetensi guru kelas Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan guru mata pelajaran pada SD/MI. Salah satu Kompetensi inti guru SD/MI pada kompetensi pedagogik diantaranya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi inti guru tersebut terbagi dalam beberapa kompetensi guru.

Lebih lanjut, pada salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan komponen KTSP meliputi 3 dokumen. Dokumen 1 yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan yang menjadi tanggung kepala sekolah/madrasah. Dokumen 2 yang disebut dengan Buku II KTSP berisi silabus, ini menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dokumen 3 yang disebut dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Sesuai dengan Permendikbud tersebut, setiap satuan pendidikan secara bertahap harus mengembangkan kurikulum dan melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, para guru yang bertugas mengelola pembelajaran di sekolah perlu memahami tentang komponen pembelajaran, perancangan pembelajaran, dan bagaimana melaksanakan pembelajaran, serta bagaimana menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Sementara itu, berdasarkan: (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi untuk



## Pendahuluan

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan dapat berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”; (2) agenda Nawacita No. 8 menyebutkan penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental; (3) Trisakti, yaitu mewujudkan generasi yang berkepribadian dalam kebudayaan; (4) RPJMN 2015-2019 terkait “Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran”; dan (5) mempersiapkan generasi emas 2045 yang bertakwa, nasionalis, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global; serta (6) arahan khusus Presiden kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter, maka pemerintah menetapkan kebijakan bahwa karakter sebagai poros pendidikan. Untuk itu perlu adanya “Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan”. Lima nilai karakter utama yang dikembangkan dalam PPK, yaitu: (1) religius, meliputi: beriman, bertakwa, bersih, toleransi, dan cinta lingkungan; (2) nasionalis, meliputi: cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebhinnekaan; (3) mandiri, meliputi: kerja keras, kreatif, disiplin, berani, dan pembelajar; (4) gotong royong, meliputi: kerjasama, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan; (5) integritas, meliputi: kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran. Pengembangan nilai-nilai karakter tersebut dapat digambarkan dalam gambar 1 berikut (sumber: PPT Gerakan PPK Kemdikbud RI 2017).



Gambar 1. Pengembangan Nilai-nilai Karakter

Guru mempunyai kewajiban untuk selalu memperbaharui dan meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai esensi pembelajar seumur hidup. Dalam rangka mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilannya, dikembangkan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar lebih mandiri dan aktif. Untuk itu, dalam rangka memperkuat guru SD/MI dalam merancang atau merencanakan pembelajaran (istilah dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 standar proses) dan melaksanakan pembelajaran ditulislah modul kompetensi pedagogik yang berjudul: “Perancangan Pembelajaran yang Mendidik di SD”. Dalam modul ini akan diuraikan tentang komponen-komponen pembelajaran, bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta penyiapan media dan sumber belajar. Setiap materi bahasan dikemas dalam kegiatan pembelajaran yang memuat tujuan, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, latihan/kasus/tugas, rangkuman, umpan balik, dan tindak lanjut. Pada setiap komponen modul yang dikembangkan ini akan diintegrasikan beberapa nilai karakter, baik secara eksplisit maupun implisit yang dapat diimplementasikan selama aktivitas pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik untuk moda tatap muka dengan model tatap muka penuh maupun model tatap muka In-On-In.

## B. Tujuan

Modul ini disusun dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya guru SD yang sedang mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan guru yang bertugas mengelola pembelajaran di SD/MI secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan memiliki kompetensi berikut.

1. Memahami komponen-komponen rancangan pembelajaran.
2. Merancang pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya dan berbasis pada pengembangan nilai-nilai karakter.
3. Menentukan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI.
4. Melaksanakan pembelajaran di SD/MI berbasis pada pengembangan nilai-nilai karakter.

## C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik dan standar kompetensi guru yang dikembangkan terkait dengan modul ini adalah sebagai berikut.

NO	Kompetensi Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
4	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik	4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
		4,2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
		4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
		4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.

		4.5 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran Sd/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
--	--	--

#### D. Ruang Lingkup

Modul ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, guru memerlukan pemahaman tentang bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik baik di kelas, di laboratorium, atau di lapangan, serta menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, sekaligus bagaimana sebaiknya guru mengatur urutan kegiatan pembelajaran di SD/MI berbasis pada nilai-nilai karakter yang dikembangkan pemerintah. Keterampilan lain yang perlu dikuasai guru dalam merancang pembelajaran adalah dapat menganalisis hubungan Kompetensi Inti (KI) untuk kurikulum 2013 dan/atau Standar Kompetensi untuk Kurikulum 2006, Kompetensi Dasar (KD), dan indikator, serta menentukan alur pembelajaran berdasarkan sistematika keilmuan dan membuat penilaian sesuai dengan indikator hasil belajar.

Ruang lingkup modul yang berjudul: “Perancangan Pembelajaran yang Mendidik di Sekolah Dasar” adalah sebagai berikut.

1. Pendahuluan, yang berisikan paparan mengenai latar belakang penulisan, tujuan yang menggambarkan harapan setelah guru mempelajari modul, ruang lingkup, dan cara penggunaan modul.
2. Kegiatan Pembelajaran 1, berisikan tentang komponen perencanaan pembelajaran dan penggunaan sumber belajar atau media dalam pembelajaran SD, antara lain memuat: (a) uraian tentang komponen pembelajaran yang terdiri dari pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), landasan pengembangan RPP, dan fungsi atau kegunaan RPP, serta komponen RPP, (b) pengertian, fungsi, manfaat media pembelajaran dan sumber belajar, serta analisis kebutuhan media pembelajaran.

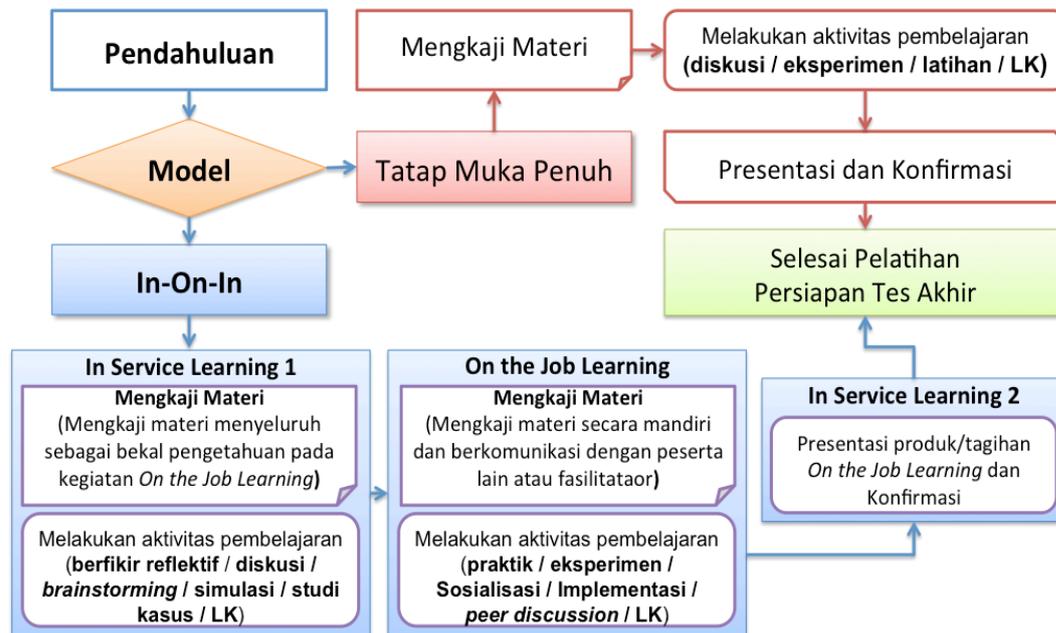


## Pendahuluan

3. Kegiatan Pembelajaran 2, berisi tentang perancangan pembelajaran atau penyusunan RPP di SD yang memuat uraian tentang langkah-langkah menyusun RPP yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
4. Kegiatan Pembelajaran 3, berisi tentang pelaksanaan pembelajaran di SD yang memuat uraian tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan dan pendekatan yang dipilih.

## E. Cara Penggunaan Modul

Secara umum, cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan Pembelajaran disesuaikan dengan skenario setiap penyajian mata diklat. Modul ini dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik untuk moda tatap muka dengan model tatap muka penuh maupun model tatap muka In-On-In. Alur model pembelajaran secara umum dapat dilihat pada bagan dibawah.

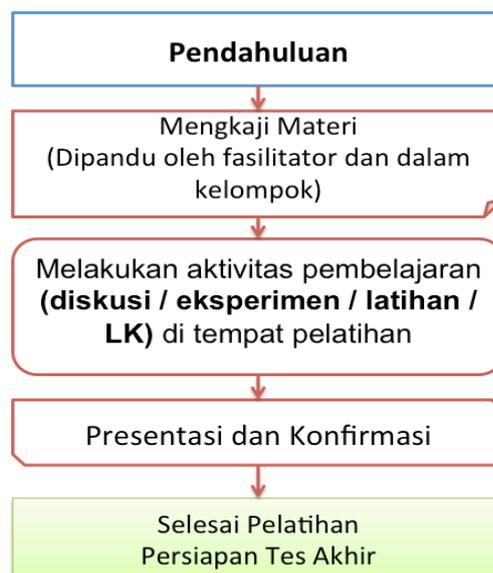


Gambar 2. Alur Model Pembelajaran Tatap Muka



## 1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh

Kegiatan pembelajaran diklat tatap muka penuh adalah kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jtjen. GTK maupun lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini dilaksanakan secara terstruktur pada suatu waktu yang di pandu oleh fasilitator. Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur pembelajaran yang dapat dilihat pada alur dibawah.



Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka penuh dapat dijelaskan sebagai berikut,

### a. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada peserta diklat untuk mempelajari materi berikut.

- 1) Latar belakang yang memuat gambaran materi
- 2) Tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi
- 3) Kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.
- 4) Ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran
- 5) Langkah-langkah penggunaan modul

### **b. Mengkaji Materi**

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi G Pedagogik, yaitu pembelajaran yang mendidik fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.

### **c. Melakukan Aktivitas Pembelajaran**

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan yang akan secara langsung berinteraksi di kelas pelatihan bersama fasilitator dan peserta lainnya, baik itu dengan menggunakan diskusi tentang materi, melaksanakan praktik, dan latihan kasus.

Lembar kerja pada pembelajaran tatap muka penuh adalah bagaimana menerapkan pemahaman materi-materi yang berada pada kajian materi.

Pada aktivitas pembelajaran materi ini juga peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data sampai pada peserta dapat membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran.

### **d. Presentasi dan Konfirmasi**

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi hasil kegiatan sedangkan fasilitator melakukan konfirmasi terhadap materi dan dibahas bersama. pada bagian ini juga peserta dan penyaji me-*review* materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

### **e. Persiapan Tes Akhir**

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan layak tes akhir.

## 2. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka In-On-In

Kegiatan diklat tatap muka dengan model In-On-In adalah kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan utama, yaitu *In Service Learning 1* (In-1), *On The Job learning* (On), dan *In Service Learning 2* (In-2). Secara umum, kegiatan pembelajaran diklat tatap muka In-On-In tergambar pada alur berikut ini.



Gambar 4. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat dijelaskan sebagai berikut,



## Pendahuluan

### a. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan disampaikan bertepatan pada saat pelaksanaan *In service learning* 1 fasilitator memberi kesempatan kepada peserta diklat untuk mempelajari materi berikut ini.

- 1) Latar belakang yang memuat gambaran materi
- 2) Tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi
- 3) Kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.
- 4) Ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran
- 5) Langkah-langkah penggunaan modul.

### b. *In Service Learning* 1 (IN-1)

Kegiatan *In-Service Learning* 1 (*In-1*) adalah pembelajaran melalui kegiatan tatap muka antara peserta dengan narasumber dan/atau instruktur. Pada **kegiatan In-1** ini saudara secara langsung mengikuti urutan tahap demi tahap sesuai skenario yang disiapkan antara lain sebagai berikut.

#### 1) Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi G Pedagogik, yaitu pembelajaran yang mendidik, fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.

#### 2) Melakukan Aktivitas Pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan /metode yang secara langsung berinteraksi di kelas pelatihan, baik itu dengan menggunakan metode berfikir reflektif, diskusi, *brainstorming*, simulasi, maupun studi kasus yang kesemuanya dapat melalui Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada IN1. Pada aktivitas pembelajaran peserta secara aktif

menggali informasi, mengumpulkan dan mempersiapkan rencana pembelajaran pada *on the job learning*.

### c. *On The Job Learning* (ON)

Kegiatan *On-The-Job Learning* (*On*) merupakan kelanjutan proses pembelajaran dari kegiatan *In-1*. Pada saat *On* peserta diminta untuk melakukan pendalaman materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saat *In-1*. Guru sebagai peserta diharapkan dapat belajar secara mandiri, atas prakarsa atau inisiatif sendiri dan tidak tergantung pada fasilitator seperti pada *Moda Tatap Muka Penuh*. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok serta memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada. Tahapan belajar yang dapat dilakukan guru sebagai peserta adalah sebagai berikut.

#### 1) Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi G Pedagogik, yaitu pembelajaran yang mendidik, guru sebagai peserta akan mempelajari materi yang telah diuraikan pada *in service learning* 1 (IN1). Guru sebagai peserta dapat membuka dan mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan kepada peserta.

#### 2) Melakukan Aktivitas Pembelajaran

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di kelompok kerja berbasis pada rencana yang telah disusun pada IN1 dan sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan /metode praktik, eksperimen, sosialisasi, implementasi, *peer discussion* yang secara langsung di dilakukan di sekolah maupun kelompok kerja melalui tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada ON.

Pada aktivitas pembelajaran materi pada ON, peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data dengan melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tagihan pada *on the job learning*.



## Pendahuluan

### d. *In Service Learning 2 (IN-2)*

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi produk-produk tagihan ON yang akan di konfirmasi oleh fasilitator dan dibahas bersama. pada bagian ini juga peserta dan penyaji me-review materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

### e. **Persiapan Tes Akhir**

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan layak tes akhir.

## Lembar Kerja

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan kelompok kompetensi G Pedagogik, yaitu pembelajaran yang mendidik terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas pembelajaran sebagai pendalaman dan penguatan pemahaman materi yang dipelajari.

Modul ini mempersiapkan lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta, lembar kerja tersebut dapat terlihat pada table berikut.

Tabel 1. Daftar Lembar Kerja Modul

No	Kode LK	Nama LK	Tahap Kegiatan
1.	LK.01.	Identifikasi komponen pembelajaran	TM, IN1
2.	LK.02.	Penentuan Media Pembelajaran dari Kompetensi Dasar	TM, IN1
3.	LK.03.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	TM, ON
4.	LK.04.	Praktek Pelaksanaan Pembelajaran	TM, ON

## Keterangan

TM : Digunakan pada Tatap Muka Penuh

IN1 : Digunakan pada In service learning 1

ON : Digunakan pada on the job learning

# Kegiatan Pembelajaran 1

## Komponen Perencanaan Pembelajaran Dan Penggunaan Sumber Belajar Atau Media Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar

### A. Tujuan

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan guru yang bertugas mengelola pembelajaran di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) khususnya guru SD yang sedang mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan dapat mengembangkan komponen pembelajaran dan menggunakan media dalam pembelajaran di SD.

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi Guru yang diharapkan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi komponen-komponen rancangan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Menentukan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

### C. Uraian Materi

Dengan adanya Peraturan Bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5496/C/KR/2014 dan Nomor: 7915/d/Kp/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan



## Kegiatan Pembelajaran 1

Menengah maka uraian materi yang akan dibahas akan menyesuaikan dengan kedua kurikulum tersebut diatas.

### **1. Komponen Perencanaan Pembelajaran**

Pada Kurikulum 2006 memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 20 peraturan tersebut berbunyi:

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.

Pada kurikulum 2013, diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan Pasal 20 di atas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

”Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran”.

Sementara itu, pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bagian B Perencanaan Proses Pembelajaran disebutkan:

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar”.

Hal tersebut di atas diperkuat dalam Salinan Lampiran Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah pada BAB III Perencanaan Pembelajaran disebutkan:

”Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Namun demikian, dalam kegiatan ini hanya akan dibahas tentang perencanaan pembelajaran, yang terkait dengan RPP, penyiapan media dan sumber belajar, dan penyusunan perangkat penilaian pembelajaran.

## **2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

RPP merupakan salah satu perencanaan proses pembelajaran yang harus dibuat atau dipersiapkan oleh guru sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. “Mengapa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada bagian ini Anda akan mempelajari tentang pengertian, landasan pengembangan, fungsi dan kegunaan RPP, serta komponen-komponen RPP.

### **a. Pengertian RPP**

Pada Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

### **b. Fungsi dan Kegunaan RPP**

Fungsi RPP adalah sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, sedangkan kegunaan RPP adalah sebagai pedoman atau pegangan bagi guru



## Kegiatan Pembelajaran 1

dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap KD. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD.

### **c. Komponen RPP dan Sistematika RPP**

Pada “Lampiran Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”, komponen RPP terdiri atas: (1) identitas mata pelajaran; (2) standar kompetensi; (3) kompetensi dasar; (4) indikator pencapaian kompetensi; (5) tujuan pembelajaran; (6) materi ajar; (7) alokasi waktu; (8) metode pembelajaran; (9) kegiatan pembelajaran; (10) penilaian hasil belajar; dan (11) sumber belajar.

Sementara itu, pada Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, komponen RPP terdiri atas: (1) identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan; (2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (3) kelas/semester; (4) materipokok; (5) alokasi waktu; (6) tujuan pembelajaran; (7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; (8) materi pembelajaran; (9) metode pembelajaran; (10) media pembelajaran; (11) sumber belajar; (12) langkah-langkah pembelajaran; dan (13) penilaian hasil pembelajaran. Komponen-komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1) Identitas

Identitas meliputi: identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran kelas atau tema/sub tema, kelas/semester, sekolah dan mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan.

#### 2) Standar Kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

### 3) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

### 4) Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

### 5) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

### 6) Materi Ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

### 7) Alokasi Waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

### 8) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru (pendidik) untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

### 9) Kegiatan Pembelajaran atau Langkah-Langkah Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.



## Kegiatan Pembelajaran 1

### a) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

### b) Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi untuk kurikulum 2006, sedangkan untuk kurikulum 2013 proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi difokuskan pada 5 M, yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah hasil informasi, dan mengkomunikasikan (pendekatan ilmiah (*scientific*)). Hal tersebut diperkuat dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Standar Proses, untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*), sedangkan untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

### c) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

### 10) Penilaian hasil belajar

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

#### 11) Sumber belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa buku, media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

### **d. Prinsip Penyusunan RPP**

Mengacu pada “Lampiran Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”, prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagai berikut.

#### 1) Memperhatikan perbedaan individual peserta didik.

Perbedaan itu, antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

#### 2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

#### 3) Pengembangan budaya membaca dan menulis



## Kegiatan Pembelajaran 1

Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

- 4) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut  
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- 5) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan  
Keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
- 6) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- 7) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Hal tersebut diatas diperkuat dalam dalam Lampiran Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran, disebutkan bahwa prinsip dalam menyusun RPP adalah sebagai berikut.

- 1) RPP harus utuh  
Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD KI-1), sosial (KD KI-2), pengetahuan (KD KI-3), dan keterampilan (KD KI-4).
- 2) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- 3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik  
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

4) Berpusat pada peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

5) Berbasis konteks.

6) Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.

7) Berorientasi kekinian

Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.

Mengembangkan kemandirian belajar, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.

8) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remidi.

9) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi/antar muatan

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

10) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

### 3. Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Media Pembelajaran

Pengertian, fungsi, dan manfaat media pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Pengertian Media Pembelajaran

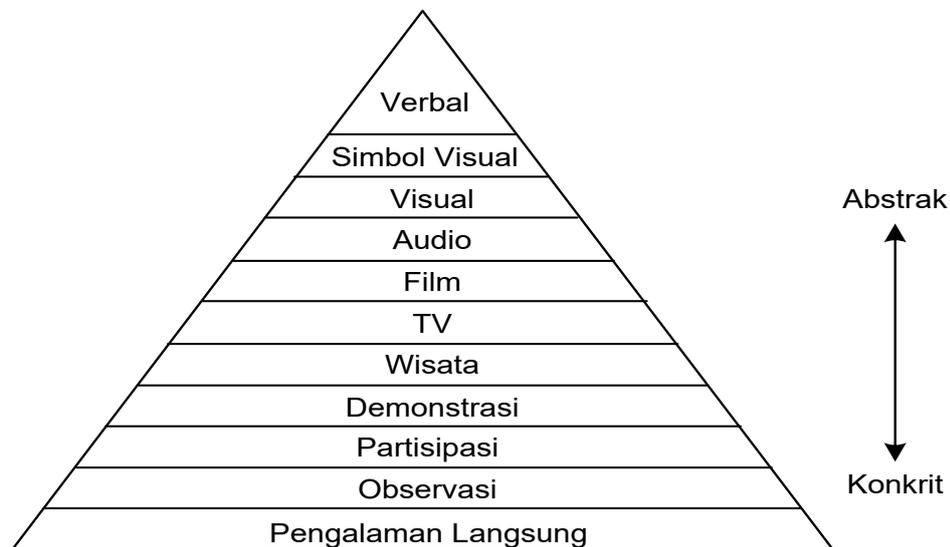
Gagne (1970) mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Briggs (1970) mengatakan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Sadiman (1986) merumuskan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Sementara Miarso (1989) mengatakan media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik untuk belajar.

Kata media berasal dari bahasa latin, merupakan bentuk jamak dari kata “*medium*” yang berarti “pengantar” atau “perantara” istilah tersebut menunjuk kepada sesuatu yang membawa informasi antara sumber (pengirim pesan) dan penerima pesan (Heinich, 2002).

Dalam definisi-definisi tersebut di atas terdapat kesamaan arti media, yaitu segala sesuatu atau benda atau alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau menjadi perantara dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.

Sementara itu, kata pembelajaran dibelakang media lebih membatasi lagi pengertiannya. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Mendikbud, 2014). Oleh karena itu, media pembelajaran adalah media yang dipilih, dikembangkan, dan atau digunakan sehingga terjadi interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar.

Edgar Dale (1970) mengklasifikasikan sepuluh tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi itu dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dale.



Gambar 5. Kerucut Pengalaman Edgar Dale (1970)

Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, yang merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar”. Untuk itu, media harus dipilih dan dikembangkan secara sistematis dan digunakan secara integral dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan fungsinya, media pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan sarana atau alat bantu.

### 1) Alat Peraga

Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari (Elly Estiningsih, 1994). Fungsi utamanya adalah



## Kegiatan Pembelajaran 1

untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Menurut Iswadi (2003): alat peraga matematika adalah sebuah atau seperangkat benda konkret yang dibuat, dirancang, dihimpun atau disusun secara sengaja, yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Menurut Post dan Reys (1977: 75) “alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan suatu konsep atau prinsip dalam matematika. Salah satu ciri penting alat peraga adalah dapat dilihat, disentuh dan diraba”.

Dari ketiga pengertian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dengan alat peraga hal-hal yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk model-model, sehingga siswa dapat memanipulasi objek tersebut dengan cara melihat, memegang, meraba, memutarbalikkan, dan sebagainya. Dengan adanya alat peraga, diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami materi yang sedang dipelajari.

Sebagai contoh, benda-benda konkret di sekitar siswa seperti batu-batu, pensil, buku, dan sebagainya. Dengan benda-benda tersebut siswa dapat membilang banyaknya anggota dari kumpulan suatu benda sampai menemukan bilangan yang sesuai pada akhir membilang. Contoh lainnya, dengan menggunakan lidi yang dipotong-potong ataupun sedotan siswa dapat mempelajari konsep operasi hitung bilangan asli dan mengenal operasi hitung bilangan.

Menurut Estiningsih (1994), dari segi pengadaannya alat peraga dapat dikelompokkan sebagai alat peraga sederhana dan alat peraga buatan pabrik. Pembuatan alat peraga sederhana biasanya memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tidak menggunakan alat-alat berat dan dapat dibuat sendiri. Sedangkan alat peraga buatan pabrik pada umumnya berupa perangkat keras dan lunak yang pembuatannya memiliki ketelitian ukuran serta memerlukan biaya yang tinggi.

### **2) Sarana atau Alat Bantu**

Sarana atau alat bantu merupakan media pengajaran yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan kegiatan belajar Estiningsih (1994). Dengan menggunakan sarana atau alat bantu tersebut diharapkan dapat memperlancar pembelajaran. Seperti halnya alat peraga, sarana juga dapat berupa perangkat keras dan lunak. Contoh

sarana yang berupa perangkat keras: papan tulis, penggaris, jangka, kartu permainan, dan sebagainya. Sedangkan contoh sarana yang berupa perangkat lunak antara lain: lembar kerja (LK), lembar tugas (LT), aturan permainan dan lain sebagainya.

Kadang-kadang suatu media dapat berfungsi ganda, pada saat tertentu berfungsi sebagai alat peraga dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana. Contoh kartu bilangan berukuran  $(10 \times 10)$  cm<sup>2</sup>. Kartu bilangan tersebut dapat berfungsi sebagai alat peraga ketika digunakan untuk mengenalkan lambang bilangan, namun pada saat digunakan dalam perlombaan untuk menutup atau memasangkan dengan kartu bilangan lain yang senilai, maka kartu tersebut berfungsi sebagai sarana belajar. Contoh lainnya papan tulis pada saat tertentu dapat digunakan sebagai alat peraga model bangun datar persegi panjang dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana, yaitu sebagai sarana untuk menuliskan penjelasan guru.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kapan alat peraga digunakan dan jenis alat peraga mana yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar dalam memilih dan menggunakan alat peraga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, maka perlu diketahui fungsi alat peraga.

#### **b. Fungsi Media**

Levie & Lents (1982) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, sebagai berikut.

##### 1) Fungsi atensi

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Media gambar khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead projector dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar.



## Kegiatan Pembelajaran 1

### 2) Fungsi afektif

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah social atau ras.

### 3) Fungsi kognitif,

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.

### 4) Fungsi kompensatoris.

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.

## c. Manfaat Media Pembelajaran

Media sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran, tidak hanya membuat sajian jadi lebih kongkret tetapi juga kegunaan yang lain seperti berikut (dalam Sadiman,1994).

- 1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa.
- 2) Melampaui batasan ruang kelas, seperti: obyek terlalu besar, makhluk hidup dan gerakan-gerakan terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang, gerakan-gerakan yang terlalu lambat atau cepat dll.
- 3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya.
- 4) Menghasilkan keseragaman pengamatan atau memberikan pengalaman dan perspektif yang benar.
- 5) Menanamkan konsep dasar yang benar, kongkrit dan realitas, seperti penggunaan: gambar, film, obyek, grafik dan lain-lain.

- 6) Membangkitkan keinginan dan minat baru.
- 7) Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar, seperti: pemasangan gambar di papan tempel, pemutaran film, mendengarkan rekaman atau radio, dan lain-lain.
- 8) Memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang kongkrit sampai yang abstrak.

#### **4. Pengertian, Manfaat, dan Jenis-jenis Sumber Belajar**

Pengertian, manfaat, dan jenis-jenis sumber belajar dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **a. Pengertian Sumber Belajar**

Menurut AECT (*Association for Education and Communication Technology*) (1997) mengemukakan sumber belajar (*learning resources*) adalah segala macam sumber yang memungkinkan siswa belajar. Depdiknas (2004) menyebutkan Sumber belajar (*learning resources*) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sementara itu, Sudjana dan Rivai (1989) menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit dimaksudkan misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Sedang secara luas itu tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pengertian sumber belajar segala macam sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.

##### **b. Manfaat Sumber Belajar**

Badru Zaman dkk. (2008) mengemukakan manfaat atau nilai yang didapatkan dengan memanfaatkan sumber belajar itu sangat banyak, antara lain adalah sebagai berikut.



## Kegiatan Pembelajaran 1

- 1) Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung.  
Anak dalam jenjang usia SD berada pada fase berfikir konkret, artinya anak pada tingkat usia tersebut belum mampu berfikir di luar batas kemampuan panca inderanya (secara abstrak). Pemberian belajar yang nyata atau konkret akan meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajar anak.
- 2) Pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.  
Adakalanya guru harus menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak mungkin untuk diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung.
- 3) Menambah wawasan dan pengalaman anak.  
Upaya memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar juga merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar. wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajarannya.
- 4) Memberikan informasi yang akurat dan terbaru.  
Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya: Informasi yang didapat anak melalui buku bacaan majalah yang terbit tiap minggu untuk anak dan nara sumber. Selain memberikan informasi terbaru, juga akan meningkatkan minat baca anak dan terlatih untuk senantiasa haus akan informasi.
- 5) Meningkatkan motivasi belajar anak.  
Kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar akan mendorong anak menyenangi kegiatan belajarnya karena anak diberikan pilihan sumber pengetahuan, sumber informasi dan sumber belajar yang beragam.
- 6) Mengembangkan kemampuan berfikir anak secara lebih kritis dan positif.  
Dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, kemampuan berfikir kritis anak akan semakin meningkat. Hal tersebut di tunjukan oleh anak dengan banyak mengemukakan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kajadian yang ditemukannya ditempat yang disediakan sebagai sumber belajar.

### c. Jenis-jenis Sumber Belajar

Mengacu apa yang dikemukakan oleh *Association of Education Communication Technology* (AECT) dalam *The Definition of Educational Technology* (1977) dan Vernon S. Gerlach & Donald P. Ely (1971), maka jenis-jenis sumber belajar antara lain sebagai berikut.

1) Pesan (*message*)

Informasi yang harus diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian, dan data.

2) Manusia (*people*)

Orang yang bertindak sebagai penyimpan informasi atau menyalurkan informasi, pengolah dan pengisi pesan. Contoh: guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi dan sebagainya.

3) Bahan (*material*)

Perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disiapkan dengan peralatan atau oleh dirinya sendiri. Contoh: buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif dan sebagainya.

4) Peralatan (*device*)

Perangkat keras atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contoh: TV, tape recorder, program pembelajaran audio dan sebagainya.

5) Teknik

Prosedur untuk menggunakan bahan, alat, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan.

6) Lingkungan (*setting*)

Situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan/ditransmisikan baik lingkungan fisik: (ruang kelas, gedung sekolah) maupun nonfisik: (suasana belajar). Contoh: laboratorium, kelas, lingkungan museum, kebun binatang dan sejenisnya.



## Kegiatan Pembelajaran 1

### 7) Aktivitas

Aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana didalamnya terdapat perpaduan antara metode dan teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya. Contoh, aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya.

## 5. Analisis Kebutuhan media Pembelajaran

Media diperlukan untuk lebih memperjelas materi ajar atau bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Lebih tepat media yang digunakan oleh guru maka semakin tinggi tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu mengetahui cara memilih dan merancang media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan tepat untuk siswanya, sehingga dapat benar-benar membantunya mencapai tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, guru dapat memilih dan merancang media melalui analisis kebutuhan media.

Kegunaan analisis kebutuhan media pembelajaran adalah membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan serta menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh guru.

Mengadopsi Depdiknasi (2004), langkah analisis kebutuhan media pembelajaran ditunjukkan dalam alur berikut.



Gambar 6. Skematik Analisis Kebutuhan Media



## Format Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran di SD

Muatan Pembelajaran & Ranah Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Media Pembelajaran	
				Alat Peraga	Alat Bantu/ Non Alat Peraga
Materi Pembelajaran 1					
Pengetahuan					
Keterampilan					
Materi Pembelajaran 2					
Pengetahuan					
Keterampilan					
Materi Pembelajaran n .....					
Pengetahuan					
Keterampilan					

Elita dkk. (2010) mengemukakan kriteria utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajaran, artinya dalam menentukan media yang akan digunakan dasar pertimbangannya adalah bahwa media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Mc, Connel (1974 (dalam Elita dkk, 2010)) mengatakan bila itu sesuai pakailah!, "*If the medium fits, use it*", artinya pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan karakteristik media yang bersangkutan. Lebih lanjut disebutkan **beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media** yaitu sebagai berikut.

- a. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi, sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik.
- b. Kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh. Media grafis umumnya mudah diperoleh bahkan dibuat sendiri oleh pendidik.
- c. Keterampilan pendidik dalam menggunakannya, apapun jenis media yang diperlukan, syarat utama adalah pendidik dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi



## Kegiatan Pembelajaran 1

dampak dari penggunaan oleh pendidik pada saat terjadinya interaksi belajar dengan lingkungannya

d. Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung

e. Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, memilih media untuk pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir peserta didik sehingga makna yang terkandung di dalamnya mudah dipahami.

Oleh Karena itu, dalam melakukan analisis media perlu diperhatikan beberapa hal dalam pemilihan media seperti tersebut di atas.

## D. Aktifitas Pembelajaran

### Aktifitas 1 Identifikasi Komponen Pembelajaran

#### **Lembar Kegiatan 1 Identifikasi Komponen Pembelajaran**

#### **Selesaikan tugas berikut!**

1. Perhatikan contoh RPP tematik yang telah dibuat guru.
2. Identifikasilah apakah komponen-komponen yang ada dalam RPP tersebut telah memenuhi kurikulum yang berlaku atau standar yang telah ditentukan? Apakah RPP tersebut telah mengintegrasikan pendidikan karakter? Berikan alasan pendapat Anda tersebut!
3. Gunakan format penilaian RPP untuk menilai sejauh mana kelengkapan komponen RPP yang Anda Identifikasi! (lampiran 1 Format Penilaian RPP).



**Aktifitas 2 Penentuan Media Pembelajaran****Lembar Kegiatan 2  
Penentuan Media Pembelajaran**

Selesaikan tugas berikut!

- Perhatikan KD-KD pada RPP tematik yang telah dibuat guru pada aktifitas 1. Analisislah media pembelajaran yang dibutuhkan setiap muatan pembelajaran yang ada dalam RPP tersebut dengan melengkapi format analisis kebutuhan media pembelajaran berikut.

Format Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran di SD

Muatan Pembelajaran & Ranah Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Media Pembelajaran	
				Alat Peraga	Alat Bantu/ Non Alat Peraga
Materi Pembelajaran 1					
Pengetahuan					
Keterampilan					
Materi Pembelajaran 2					
Pengetahuan					
Keterampilan					
Materi Pembelajaran n .....					
Pengetahuan					
Keterampilan					

Apabila Anda mengalami kesulitan perhatikan media yang ada dalam buku guru dan buku siswa yang ada. Tuliskan macam media pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut dari hasil analisis yang Anda peroleh.

- Perhatikan media yang tertera dalam buku guru dan buku siswa. Apakah media yang ada sesuai dengan KD-KD yang diajarkan? Berikan alasan pendapat Anda tersebut!

Apabila Anda mengalami kesulitan pada saat mengikuti Diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan program tatap muka penuh, maka diskusikan dengan fasilitator Anda. Namun apabila Anda mengalami kesulitan pada saat mengikuti program OJL diskusikanlah dengan teman sejawat Anda di sekolah atau di kelompok kerja guru (KKG).

### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi-materi yang ada pada modul. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda terhadap materi pada modul ini, Anda kami sarankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa mendiskusikan dengan teman yang lain terlebih dahulu. Jika masih ragu dengan jawaban Anda, maka pelajari kembali bab ini atau diskusikan dengan teman sejawat baik di sekolah maupun di KKG.

1. Jelaskan pengertian RPP!
2. Jelaskan landasan pengembangan RPP!
3. Jelaskan fungsi atau kegunaan RPP!
4. Jelaskan komponen RPP!
5. Bagaimana langkah dalam menentukan media pembelajaran yang dibutuhkan agar pembelajaran berjalan efektif?

### **F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes yang telah tersedia dalam lampiran. Hitunglah jumlah jawaban yang benar, kemudian tentukan tingkat penguasaan Anda terhadap materi pada tiap kegiatan pembelajaran (KB) pada modul ini dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Tingkat Penguasaan (TP)} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Kategori penguasaan yang Anda capai adalah sebagai berikut.

1.  $91 \leq TP \leq 100$  kategori amat baik
2.  $76 \leq TP < 91$  kategori baik
3.  $61 \leq TP < 76$  katagori cukup,
4.  $51 \leq TP < 61$  katagori sedang
5.  $TP < 51$  katagori kurang

## **Kegiatan Pembelajaran 2**

### **Penyusunan Rancangan Pembelajaran Di SD/MI**

### **Dengan Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter**

#### **A. Tujuan**

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan guru yang bertugas mengelola pembelajaran di SD/MI khususnya guru SD yang sedang mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan secara mandiri atau berkelompok dalam satu sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan dapat menyusun rancangan pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai karakter bangsa sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Indikator pencapaian kompetensi Guru yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Merancang kegiatan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
2. Merancang pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.
3. Menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan kemampuan aspek pengetahuan untuk mencapai prestasi belajar optimal peserta didik.

#### **C. Uraian Materi**

Bagaimana merancang atau merencanakan pembelajaran agar kegiatan pembelajarannya memfasilitasi atau berwawasan pendidikan karakter? Salah satu cara yang mudah adalah dengan menambahkan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, disadari pentingnya nilai-nilai, dan



## Kegiatan Pembelajaran 2

diinternalisasinya nilai-nilai karakter yang dikehendaki. Berbicara tentang mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada pembelajaran, tentunya tidak terlepas dari bagaimana menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang nilai-nilai karakter, yaitu mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor) melalui pembelajaran.

Dalam kegiatan ini, Anda akan mempelajari tentang bagaimana merencanakan pembelajaran atau mengembangkan RPP tematik dengan pendekatan saintifik yang dikemas dalam bentuk uraian tentang tahapan merancang RPP yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang diikuti dengan latihan. Mengembangkan RPP tematik terpadu dengan pendekatan saintifik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter merupakan salah satu perencanaan pembelajaran yang harus dibuat atau dipersiapkan oleh guru SD kelas 1 s.d 3 untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013.

Perhatikan gambar berikut!



Gambar 7. Beberapa aktifitas siswa SD

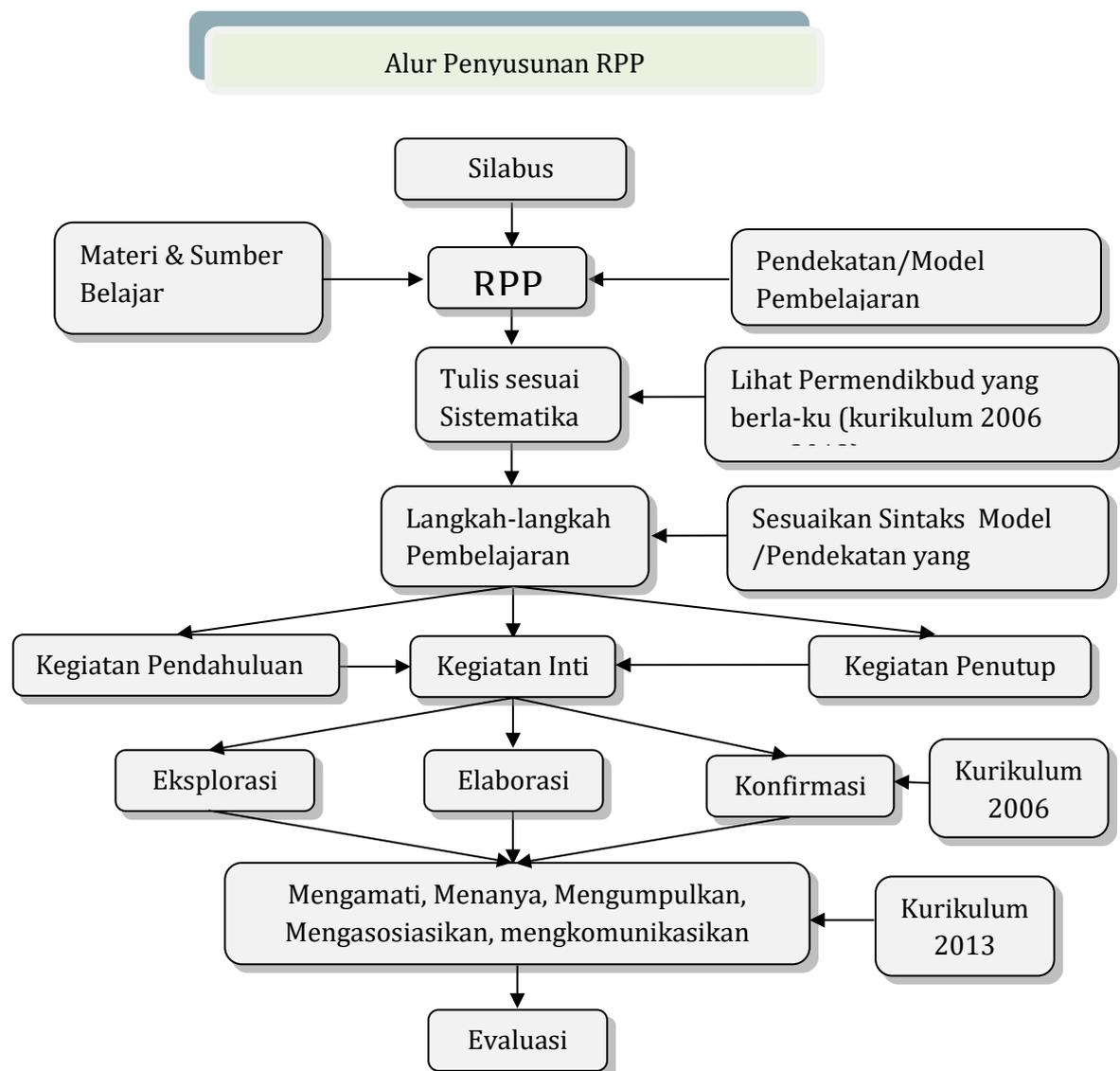
Pada gambar tampak beberapa aktifitas yang dilakukan siswa SD selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang tergambar adalah siswa aktif melakukan kegiatan dengan rasa senang. Apakah kegiatan pembelajaran seperti tampak dalam gambar di atas yang diinginkan dalam kurikulum kita?



Paradigma baru pembelajaran kita adalah beralihnya bentuk pengajaran ke pembelajaran. Paradigma baru ini, memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Gambar di atas merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak pada siswa saat berlangsungnya pembelajaran.

### 1. Langkah-Langkah Pengembangan RPP

Dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran dari kurikulum yang berlaku, langkah-langkah atau alur dalam pengembangan atau penyusunan RPP ditunjukkan dalam gambar di bawah.



### Alur Penyusunan RPP



## Kegiatan Pembelajaran 2

Bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter? Bagaimanakah pendidikan nilai-nilai karakter dilakukan secara terpadu dalam proses pembelajaran di SD? Dengan memperhatikan gambar 7 di atas, maka pengintegrasian nilai-nilai karakter dapat menyesuaikan dengan tahapan yang ada. Dengan mengacu alur penyusunan RPP, maka langkah-langkah dalam pengembangan atau penyusunan RPP adalah sebagai berikut.

### **1. Mengkaji Silabus**

Secara umum, untuk kurikulum 2013 setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran yang membuat peserta didik aktif belajar. Sementara itu, untuk kurikulum 2006 ada Standar Kompetensi (SK) dan KD. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.

### **2. Menyusun RPP**

Langkah-langkah dalam merancang atau penyusunan RPP adalah sebagai berikut.

#### **a. Menuliskan Identitas**

Untuk SD/MI, komponen identitas adalah sebagai berikut.

- 1) Satuan Pendidikan (Sekolah)
- 2) Muatan Pelajaran (mata pelajaran untuk kurikulum 2006 non tematik))
- 3) Kelas/Semester
- 4) Tema/Sub Tema/PB (untuk Tematik)
- 5) Alokasi Waktu

**b. Menuliskan Kompetensi Inti (KI) untuk Kurikulum 2013 atau Penulisan Standar Kompetensi (SK) untuk Kurikulum 2006**

**Kompetensi inti (KI)** merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap jenjang kelas pada suatu muatan pelajaran. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Bagi Sekolah yang memberlakukan kurikulum 2013, pada bagian ini dituliskan KI dari muatan pelajaran, cukup dengan cara mengutip uraian tentang KI untuk jenjang SD/MI pada Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran atau mengutip dari silabus yang telah disiapkan pemerintah. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut.

- 1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
- 2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
- 3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
- 4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

**Standar Kompetensi (SK)** adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester. Bagi Sekolah yang memberlakukan kurikulum 2006, pada bagian ini dituliskan SK dari muatan pelajaran, cukup dengan cara mengutip uraian tentang SK untuk jenjang SD/MI pada Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

**c. Menuliskan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator**

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam muatan pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Pada bagian ini dituliskan KD yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir, cukup dengan cara mengutip pada Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI atau pada silabus yang telah ditetapkan pemerintah.

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan



## Kegiatan Pembelajaran 2

penilaian mata pelajaran. Jadi, pada prinsipnya indikator adalah penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda kemampuan yang harus dikuasai peserta didik secara individu atau target individu peserta didik. Dengan demikian, apabila peserta didik secara individu belum mencapai kemampuan seperti yang dirumuskan dalam indikator maka ia harus memperbaiki kemampuannya melalui pembelajaran remedial. Indikator pencapaian hasil belajar dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta didik. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi dua atau lebih indikator pencapaian hasil belajar dan disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut.

Berkenaan dengan pengintegrasian nilai-nilai karakter, maka indikator mata pelajaran juga menggambarkan perilaku afektif seseorang peserta didik berkenaan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Agar memfasilitasi terjadinya pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan karakter, perlu adanya penambahan dan/atau modifikasi pada indikator pencapaian peserta didik dalam hal karakter. Contoh: Siswa menentukan ..... (*sesuai dengan kompetensi yang diharapkan*) dengan jujur. Indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik di kelas dapat diamatai oleh guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan atau kegiatan, seperti dalam menerima tugas dari guru, dalam mengerjakan pekerjaan rumah, hasil tulisan, dan lain-lain.

Penulisan KD dan indikator di SD, untuk kurikulum 2013 seluruh KD dan indikator semua muatan pelajaran yang akan dipadukan masing-masing harus memuat 4 (empat) KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Indikator dikembangkan untuk seluruh KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4.

Tuliskan semua KD dan indikator pada seluruh muatan pembelajaran yang ditekankan. Dalam merumuskan indikator yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

**1) Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua).**

Menurut Safari (2005) dalam Wardhani (2012: 5-9), ada 3 kelompok IPK, yaitu: (a) indikator sangat penting (indikator kunci), (b) indikator cukup penting (Indikator pendukung/jembatan), dan (c) indikator kompleks (pengayaan).

**a) Indikator kunci**

Indikator kunci adalah yang memenuhi syarat UKRK, yaitu: (a) urgensi, dimaknai bahwa secara teoritis indikator itu harus dikuasai peserta didik, (b) kontinuitas, dimaknai bahwa indikator ini merupakan indikator lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih indikator yang sudah pernah dipelajari pada KD sebelumnya atau KD itu sendiri, (c) relevansi, dimaknai bahwa indikator itu diperlukan untuk mempelajari/memahami pelajaran lain, (d) keterpakaian, dimaknai bahwa indikator ini memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan indikator kunci harus ada pada tiap KD, apapun keadaan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator kunci ini harus diujikan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik terhadap KD. Pengujian indikator ini melalui ulangan harian/ulangan tengah semester/akhir semester.

**b) Indikator pendukung**

Indikator pendukung merupakan indikator yang mendukung indikator kunci. Indikator pendukung mencerminkan kemampuan jembatan yang diperlukan dalam rangka menguasai kemampuan yang dirumuskan oleh indikator kunci. Indikator pendukung dinamai juga indikator jembatan.

Kemampuan prasyarat untuk indikator kunci yang dirumuskan pada indikator pendukung/jembatan adalah kemampuan berkait dengan KD bersangkutan yang sedang dipelajari, bukan berkait dengan kemampuan pada KD-KD sebelumnya. Bila kemampuan prasyarat untuk Indikator kunci berkait dengan kemampuan pada KD-KD sebelumnya yang telah dipelajari, maka penguasaannya dideteksi (bukan diuji) dalam apersepsi pada kegiatan pendahuluan. Kemampuan prasyarat untuk indikator kunci yang dirumuskan pada indikator pendukung/jembatan dibahas pada kegiatan inti pembelajaran, tepatnya sebelum peserta didik belajar dengan tolok ukur indikator kunci.



## Kegiatan Pembelajaran 2

**Indikator** pendukung atau jembatan ini diperlukan bila pada umumnya peserta didik diprediksi 'lemah' dalam kemampuan prasyarat berkait dengan kemampuan pada indikator kunci, sedangkan apabila pada umumnya peserta didik diprediksi cepat menguasai kemampuan yang dirumuskan oleh indikator kunci, maka tidak diperlukan indikator pendukung/jembatan. **Indikator** pendukung/jembatan sebaiknya di uji sendiri, bila tak terwakili dalam pengujian indikator kunci. Indikator pendukung/jembatan merupakan modal atau prasyarat untuk menguasai kemampuan pada indikator kunci, oleh karenanya sebaiknya pengujian indikator pendukung/jembatan dilakukan sebelum peserta didik belajar kemampuan yang berkait dengan indikator kunci.

### c) **Indikator kompleks**

Indikator kompleks merupakan indikator yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya menuntut: (1) kreatifitas yang tinggi, (2) waktu yang cukup lama karena perlu pengulangan, (3) penalaran dan kecermatan peserta didik yang tinggi, (4) sarana dan prasarana sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai. Indikator kompleks mencerminkan tuntutan kemampuan tambahan atau kemampuan yang sifatnya pengayaan dari target kemampuan minimal pada KD-nya. Indikator kompleks dinamai juga indikator pengayaan. Indikator kompleks merupakan indikator yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi dan diperlukan bila peserta didik menguasai kemampuan yang dirumuskan pada indikator kunci dengan cepat dan mudah.

Indikator kompleks ini diujikan apabila diterapkan ke semua peserta didik yaitu melalui ulangan harian. Bila kemudian peserta didik dapat mencapainya berarti dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan peserta didik sudah di atas target minimal. Indikator kompleks ini tidak diujikan apabila tidak diterapkan untuk semua peserta didik, sedangkan penilaian cukup dengan tugas-tugas untuk mencermati seberapa jauh peserta didik yang mempelajarinya telah menguasai kemampuan terkait indikator kompleks/pengayaan.

## 2) Indikator Menggunakan Kata Kerja Operasional yang dapat Diukur dan/atau Diobservasi.

Untuk membuat atau menulis indikator tentunya tidak terlepas dari taksonomi Bloom. Menurut Bloom (dalam Krathwohl (2002)), tujuan pendidikan dalam garis besarnya terbagi menjadi tiga ranah atau kawasan (domain), yaitu pertama ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan ketiga ranah psikomotor. Lebih lanjut disebutkan Taksonomi Bloom versi baru terdiri dari level 1 sampai 6, yaitu: (1) *remembering* (mengingat), (2) *understanding* (memahami), (3) *applying* (menerapkan), (4) *analyzing* (menganalisis, mengurai), (5) *evaluating* (menilai), dan (6) *creating* (mencipta). Untuk mudahnya level 1 *remembering* (mengingat) apabila indikator kompetensinya dibuatkan instrumen penilaiannya yang berupa soal, maka biasanya soal yang dibuat tersebut masuk dalam katagori soal mudah, dan level 2 *understanding* (memahami) soalnya masuk dalam katagori soal sedang, sedangkan level 3 *applying* (menerapkan) soalnya masuk dalam kategori soal sulit. Namun demikian, secara teoritik akademik tidak sesederhana itu. Soal mudah, sedang, ataupun sulit ditentukan lewat telaah instrumen secara kualitatif/teoritis, ujicoba dan analisis hasil ujicoba tes. Berikut contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk ranah kognitif level mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengurai, menilai, dan mencipta seperti ditunjukkan dalam tabel 2, sedangkan untuk ranah afektif dan psikomotor di sajikan dalam tabel 3.

Untuk membantu dalam mengembangkan indikator, guru dapat menggunakan kata kerja operasional seperti yang tertera pada tabel 2. Pada kegiatan pembuatan indikator, KD-KD telah tersedia di standar isi atau kerangka dasar kurikulum, selanjutnya diberikan kebebasan pada guru menurunkan KD kedalam indikator kompetensi sesuai apa yang akan diukur. Indikator kompetensi ini sebagai dasar untuk membuat indikator-indikator soal atau indikator penilaian dan dilanjutkan dengan pembuatan atau penyusunan soal.

## 3) Tingkat Kata Kerja dalam Indikator Lebih Rendah atau Setara dengan Kata Kerja dalam KD Maupun SK.

Kata kerja dalam indikator lebih rendah dari kata kerja dalam KD atau SK, apabila dari KD tersebut dapat diturunkan sejumlah atau banyak indikator. Sebagai contoh, di Kelas V/Semester 1, SK 1: Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam



## Kegiatan Pembelajaran 2

pemecahan masalah, KD 1.2: Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB. Kata kerja KD ini adalah menggunakan, maka kata kerja dalam indikatornya bisa menggunakan, menyebutkan, menunjukkan, atau menentukan. Kata-kata kerja tersebut menunjukkan level yang ingin dicapai. Apabila level yang ingin dicapai lebih tinggi, guru dapat menuangkannya kedalam indikator tambahan.

Sementara itu, kata kerja dalam indikator setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK terjadi apabila kata kerja dalam KD tersebut tidak memungkinkan diturunkan menjadi kata kerja yang lain atau kata kerja dalam KD merupakan satu-satunya kata yang memungkinkan.

### **d. Merumuskan Tujuan Pembelajaran**

Pada Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lampiran Permendikbud RI Nomor 81 A tahun 2013 dicantumkan tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: *audience* (peserta didik) dan *behavior* (aspek kemampuan).

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang akan dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran adalah target yang akan dicapai oleh seluruh peserta didik atau merupakan target kolektif yang akan dicapai (Wardhani, 2008: 20). Lebih lanjut disebutkan tujuan pembelajaran mencerminkan arah yang akan dituju dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikelola untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat memiliki kemampuan seperti yang dirumuskan oleh indikator. Agar pembelajaran dapat memfasilitasi hal tersebut dengan baik, maka arah pembelajaran mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Tujuan dan indikator keduanya dijadikan sebagai acuan arah proses pembelajaran.

Contoh Kata Kerja Operasional Taksonomi Bloom untuk Ranah Kognitif (Sumber: Krathwohl, David R. (2002)).

Ranah Kognitif					
Level 1 Mengingat (Remember)	Level 2 Memahami (Understand)	Level 3 Menerapkan (Apply)	Level 4 Menganalisis (Analyze)	Level 5 Menilai (Evaluate)	Level 6 Mencipta (Create)
Memasangkan Membaca Memberi indeks Memberi kode Memberi label Membilang Memilih Mempelajari Menamai Memandai Mendaftar Menelusuri Mengenali Menggambar Menghafal Mengidentifikasi Mengulang Mengutip Meninjau Meniru Mentabulasi Menulis Menunjukkan Menyadari Menyatakan Menyebutkan Mereproduksi	Melakukan inferensi Melaporkan Membandingkan Membedakan Memberi contoh Membagikan Memperkirakan Memperluas Mempertahankan Memprediksi Menafsirkan Menampilkan Menceritakan Mencontohkan Mendiskusikan Menarasikan Mengabstraksikan Mengartikan Mengasosiasikan Mengekstrapolasi Mengelompokkan Mengemukakan Menggal Menggeneralisasikan Menggolong- golongkan Menghitung Mengilustrasikan	Melaksanakan Melakukan Melatih Membiasakan Memodifikasi Mempersoalkan Mencegah Menentukan Menetapkan Mengadaptasi Mengaitkan Mengemukakan Menggal Menggunakan Menghitung Mengimplementasikan Mengkalulasi Mengklasifikasi Mengkonsepkan Mengoperasikan Mengurukan Mengurukan Mensimulasikan Mentabulasi Menugaskan Menyelidiki	Melatih Memadukan Maksimalikan Membagikan Membeda-bedakan Membuat struktur Memecahkan Merintah Memfokuskan Memilih Menata Mencirikan Mendeteksi Mendiagnosis Mendiagramkan Menegaskan Menelah Menetapkan sifat/ciri Mengaitkan Menganalisis Mengatribusikan Megaudit Mengedit Mengorelasikan Mengorganisasikan Menguji Menguralkan	Membuktikan Memilih Memisahkan Memonitor Memperjelas Mempertahankan Memprediksi Memproyeksikan Menentukan Memvalidasi Menafsirkan Mendukung Mengarahkan Mengecek Mengetes Mengkoordinasikan Mengkritik Mengkritisi Menguji Mengkukur Menilai Menimbang Menugaskan Merinci Membenarkan Menyalahkan	Memadukan Membangun Membatas Membentuk Membuat Membuat rancangan Memfasilitasi Memperjelas Memproduksi Menunjukkan Menampilkan Menanggulangi Menciptakan Mendikte Mememukan Mengabstraksi Menganimasi Mengarang Mengatur Mengabungkan Menggeneralisasi Menghasilkan karya Menghubungkan Mengingat Mengategorikan Mengkode Mengkombinasikan Mengreasikan

Ranah Kognitif					
Level 1 Mengingat (Remember)	Level 2 Memahami (Understand)	Level 3 Menerapkan (Apply)	Level 4 Menganalisis (Analyze)	Level 5 Menilai (Evaluate)	Level 6 Mencipta (Create)
Menempatkan	Menginterpretasi Menginterpretasikan Mengategorikan Mengklasifikasi Mengkonstruksi Mengubah Menguralkan Menjabarkan Menjalin Menjelaskan Menterjemahkan Mentranslasi Memunjukkan Menyimpulkan Merangkum Meringkas Mengidentifikasi	Menyesuaikan Menyusun Meramalkan Menjalankan Mempraktekkan Memilih Memulai Menyelesaikan	Menjelajah Meminimalkan Mentransfer Menyeleksi Merasionalkan Merinci		Mengoreksi Mengumpulkan Mengusulkan hipotesis Menyiapkan Menyusun Merancang Merekonstruksi Merencanakan Mereparasi Merumuskan Memperbaharui Menyempurnakan Memperkuat Memperindah Mengubah



Contoh Kata Kerja Operasional Bloom untuk Ranah Afektif dan Ranah Psikomotor (Sumber: Krathwohl, David R. (2002))

Ranah Afektif		Ranah Psikomotor							
Menerima	Merespons	Menghargai	Mengorganisasikan	Karakterisasi Menurut Nilai	Meniru	Manipulasi	Presi	Artikulasi	Naturalisasi
A1	A2	A3	A4	A5	P1	P2	P3	P4	P5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti</li> <li>- Mengamati</li> <li>- Mematuhi</li> <li>- Meminati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengompromikan</li> <li>- Menyavang</li> <li>- Menyambut</li> <li>- Mendukung</li> <li>- Menyetujui</li> <li>- Menampikan</li> <li>- Melapor</li> <li>- Memilih</li> <li>- Mengatakan</li> <li>- Memilah</li> <li>- Mendidik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengsumuskan</li> <li>- Meyakini</li> <li>- Meyakinkan</li> <li>- Mempertahankan</li> <li>- Mengimani</li> <li>- Menekankan</li> <li>- Menyumbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah</li> <li>- Menata</li> <li>- Mengklasifikasi</li> <li>- Mengambil</li> <li>- Mempertahankan</li> <li>- Membandingkan</li> <li>- Membangun</li> <li>- Membentuk</li> <li>- Mendapat</li> <li>- Memadukan</li> <li>- Mengelola</li> <li>- Menegosiasiasi</li> <li>- Merembuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membiasakan</li> <li>- Mengubah perilaku</li> <li>- Berakhlak</li> <li>- Bermula</li> <li>- Mempengaruhi</li> <li>- Mengualifikasi</li> <li>- Melayani</li> <li>- Membudikan</li> <li>- Memecahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyalin</li> <li>- Mengikuti</li> <li>- Mereplikasi</li> <li>- Mengulang</li> <li>- Mematuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kembali membuat</li> <li>- Membangun</li> <li>- Melakukan</li> <li>- Melaksanakan</li> <li>- Menerapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan</li> <li>- Melengkapi</li> <li>- Menunjukkan</li> <li>- Menyempurnakan</li> <li>- Mengkalibrasi</li> <li>- Mengendalik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun</li> <li>- Mengatasi</li> <li>- Menggambarkan</li> <li>- Koordinat</li> <li>- Mengingat</li> <li>- Menggrasikan</li> <li>- Beradaptasi</li> <li>- Mengembangkan</li> <li>- Merumuskan</li> <li>- Memodifikasi</li> <li>- Master</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesain</li> <li>- Menentukan</li> <li>- Mengelola</li> </ul>

Tujuan dari proses pembelajaran targetnya bisa sama atau tidak sama persis seperti yang dirumuskan oleh indikator. Ketidaksamaan tersebut disebabkan antara lain diperlukannya proses pembelajaran pendukung untuk menghantarkan peserta didik memiliki kompetensi seperti yang dirumuskan oleh indikator. Mengingat tujuan pembelajaran merupakan target pencapaian kolektif, maka rumusnya dapat dipengaruhi oleh desain kegiatan atau strategi pembelajaran yang akan disusun oleh guru atau metode pembelajaran yang dipilih atau digunakan. Dengan kata lain, kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang disusun guru hendaknya juga mengacu pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya.

Agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter, maka tujuan kegiatan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga sikap. Oleh karenanya, guru perlu menambah orientasi tujuan dengan pencapaian sikap atau nilai tertentu, seperti kejujuran, rasa percaya diri, kerja keras, saling menghargai, dan sebagainya.

#### **e. Penulisan Materi Ajar**

Materi ajar yang ditulis hendaknya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran ini dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial.

Materi ajar sebagai bahan/rujukan merupakan titik tolak dilaksanakan aktifitas belajar oleh peserta didik. Bahan/rujukan dapat berupa teks lisan maupun tertulis, grafik, diagram, gambar, model, chart, benda sesungguhnya, film, dan sebagainya. Bahan/rujukan yang dapat memperkenalkan nilai-nilai adalah yang tidak hanya menyajikan materi/pengetahuan tetapi juga menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan materi/pengetahuan tersebut.

#### **f. Menentukan Metode Pembelajaran yang Akan Digunakan**

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD atau seperangkat indikator



## Kegiatan Pembelajaran 2

yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dari kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

Metode yang dipilih guru akan menggambarkan aktivitas pembelajaran atau apa yang dilakukan oleh peserta didik (bersama dan/atau tanpa guru) dengan bahan/materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode belajar yang dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai adalah metode memungkinkan siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang mendorong terjadinya belajar mandiri dan berpusat pada siswa. Pembelajaran yang memfasilitasi belajar mandiri dan berpusat pada siswa secara otomatis akan membantu siswa memperoleh banyak nilai. Contoh-contoh aktivitas belajar tersebut antara lain: diskusi, eksperimen, pengamatan/observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan mengerjakan proyek. Untuk itu metode yang cocok antara lain: diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan lain-lain yang dapat mendukung aktifitas tersebut di atas.

Metode juga akan mempengaruhi pengaturan pembelajaran berkaitan dengan kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara individu, berpasangan atau dalam kelompok. Masing-masing pengaturan berimplikasi terhadap nilai-nilai yang terdidik. Sebagai contoh: (1) pengaturan waktu penyelesaian tugas yang pendek (sedikit), akan menjadikan peserta didik terbiasa kerja dengan cepat sehingga menghargai waktu dengan baik, sedangkan (2) kerja kelompok dapat menjadikan siswa memperoleh kemampuan bekerja sama, saling menghargai, dan lain-lain.

Pada bagian ini dituliskan semua metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung.

### **g. Mengembangkan atau Merumuskan Kegiatan Pembelajaran**

Mengacu pada lampiran Permendikbud RI Nomor 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka

pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Lebih lanjut, disebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- 2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.
- 3) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup.

Apa saja yang ditulis pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup? Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ditulis dengan mengacu pada pelaksanaan pembelajaran sesuai atau mengacu pada Permendikbud yang berlaku, yaitu antara lain sebagai berikut.

#### **a) Kegiatan Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran. Kegiatan ini, bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu, yang ditulis pada kegiatan pendahuluan adalah sebagai berikut.

- (1) Apa-apa yang harus dilakukan guru untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan/atau menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Kegiatan apersepsi yang akan dilakukan guru, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan guru tentang materi atau kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yang berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan peserta didik.



## Kegiatan Pembelajaran 2

- (3) Kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik.
- (5) Lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

### **b) Kegiatan Inti**

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pada kurikulum 2006 kegiatan inti dapat menggambarkan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan pada kurikulum 2013 kegiatan inti menggambarkan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang focus pada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan yang disebut dengan pendekatan saintifik. Penggunaan pendekatan saintifik ini disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Pada kegiatan inti ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi /mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Untuk itu, yang ditulis pada kegiatan inti adalah sebagai berikut.

#### (1) Mengamati

Tuliskan bentuk kegiatan yang membuka secara luas dan bervariasi dan memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca.

#### (2) Menanya

Tuliskan bentuk kegiatan, dimana dalam kegiatan mengamati, tampak guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat.

(3) Mengumpulkan informasi/mencoba

Tuliskan bentuk tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Pada kegiatan ini, peserta didik dapat diberi tugas membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Melalui kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.

(4) Mengasosiasi/menalar

Tuliskan bentuk kegiatan yang menunjukkan bahwa Informasi yang diperoleh peserta didik tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

(5) Mengomunikasikan hasil

Tuliskan bentuk kegiatan berikutnya dari peserta didik, yaitu menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengindikasikan bahwa dalam menyusun RPP pada langkah-langkah pembelajaran utamanya pada kegiatan inti secara tersirat dan/atau tersurat dapat menggambarkan kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, yang berfokus pada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengasosiasikan, serta mengomunikasikan hasil. Hal tersebut akan terwujud apabila guru menggunakan pendekatan saintifik (*scientific*), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) dengan menerapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*).

Pada kegiatan inti dituliskan aktivitas pembelajaran yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh peserta didik (bersama dan/atau tanpa guru) dengan bahan/materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aktifitas belajar yang dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai adalah aktivitas-



## Kegiatan Pembelajaran 2

aktivitas yang antara lain mendorong terjadinya belajar mandiri dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang memfasilitasi belajar mandiri dan berpusat pada siswa secara otomatis akan membantu siswa memperoleh banyak nilai. Contoh-contoh aktivitas belajar tersebut antara lain: diskusi, eksperimen, pengamatan/observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan mengerjakan proyek.

### **c) Kegiatan Penutup**

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak. Untuk itu, yang ditulis pada kegiatan penutup adalah sebagai berikut.

- (1) Rangkuman/simpulan pelajaran yang dilakukan bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri.
- (2) Bentuk penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
- (3) Pemberian umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- (4) Perencanaan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- (5) Penyampaian rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

### **h. Penjabaran Jenis Penilaian**

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan,

pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

#### **i. Menentukan Alokasi Waktu**

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.

#### **j. Menentukan Media/Alat/Bahan/Sumber Belajar**

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan media, alat, bahan dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran dan didasarkan pada kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Pada bagian ini dituliskan semua media/alat/bahan/sumber belajar yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung.

### **D. Aktivitas Pembelajaran**

Aktifitas dalam merancang pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik dapat Anda lakukan dengan mengikuti langkah kegiatan berikut.

1. Pelajari dan pahami tentang pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik.
2. Pilihlah satu pembelajaran pada salah satu Tema dan Sub Tema di kelas yang Anda ampu.

## Kegiatan Pembelajaran 2

3. Siapkan silabus pembelajaran, buku pegangan guru, dan buku siswa,
4. Dengan mengacu pada silabus pembelajaran, buku pegangan guru, dan buku siswa, mulailah menyusun RPP satu pertemuan dengan mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam Lembar Kegiatan (LK) 3 berikut.

### **Lembar Kegiatan 3** **Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

- a. Tuliskan Identitas  
Satuan Pendidikan (Sekolah) : .....  
Kelas/Semester : .....  
Tema/Sub Tema/PB : .....  
Alokasi Waktu : .....
- b. Tuliskan Kompetensi Inti (KI) (Kurikulum 2013) atau Penulisan Standar Kompetensi (SK) untuk Kurikulum 2006) di kelas yang Anda ampu.
- c. Menuliskan Kompetensi Dasar dan Indikator  
Tuliskan KD dan indikator seluruh muatan pembelajaran yang ditekankan. Berikut adalah contoh format penulisan untuk satu muatan pembelajaran .
  - 1) Kompetensi Dasar
    - a) ... (KD pada KI 1)
    - b) ... (KD pada KI 2)
    - c) ... (KD pada KI 3)
    - d) ... (KD pada KI 4)
  - 2) Indikator
    - a) ....(indikator pada KD sikap spiritual)
    - b) ... (indikator pada KD sikap sosial.)
    - c) ... (indikator pada KD pengetahuan)

d) ... (indikator pada KD keterampilan)

d. Menuliskan Tujuan Pembelajaran

Tuliskan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD.

1) .....

2) .....

3) dst.

e. Menuliskan Materi Ajar

Tuliskan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

1) .....

2) .....

3) Dst

f. Menuliskan Metode dan Pendekatan Pembelajaran

Tuliskan semua metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu metode yang digunakan dalam pembelajaran tematik dengan pendekatan tematik.

g. Menuliskan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran.

Tuliskan langkah-langkah pembelajaran yang Anda rencanakan sesuai pendekatan, metode, dan media yang Anda gunakan. Berikut contoh format langkah-langkah pembelajaran dalam satu pertemuan.

1) Pendahuluan/Kegiatan Awal (... menit)

a) Penyampaian Tujuan: .....

b) Apersepsi, yaitu .....

c) Penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar .....

2) Kegiatan Inti (... menit)

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) Dst.

3) Penutup (... menit)

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

**h. Penjabaran Jenis Penilaian**

Tuliskan bentuk soal dan instrumen penilaian dari setiap muatan pembelajaran dengan mengacu pada indikator untuk KD pengetahuan dan keterampilan. Berikut contoh format penjabaran jenis penilaian dalam satu muatan pembelajaran.

1) Pengetahuan

a) Bentuk soal

b) Instrumen penilaian

2) Keterampilan

a) Bentuk Observasi terkait keterampilan siswa yang akan diukur sesuai indikator yang ada.

b) Instrumen observasi



## E. Latihan/Kasus/Tugas

Untuk latihan/tugas Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Perhatikan peta kompetensi KD pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran di Kelas IV Semester 2, Tema “Pahlawanku”, Sub Tema 1 “Perjuangan Para Pahlawan”, Pembelajaran satu (1) berikut ini!

### **Bahasa Indonesia**

- 3.5 Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.
- 4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.

### **IPS**

- 3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masapraaksara, Hindu Budha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan.
- 4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara, Hindu Budha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

### **PKn**

- 3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat
  - 4.3 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
2. Tuliskan Indikator pencapaian kompetensi untuk seluruh KD muatan pelajaran yang ditekankan tersebut di atas.
  3. Tuliskan instrumen penilaian untuk setiap indikator yang Anda buat!



## F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Umpan balik dan tindak lanjut yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut.

1. Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes yang telah tersedia dalam lampiran. Hitunglah jumlah jawaban yang benar, kemudian tentukan tingkat penguasaan Anda terhadap materi pada tiap kegiatan pembelajaran (KB) pada modul ini dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Tingkat Penguasaan (TP)} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Kategori penguasaan yang Anda capai adalah sebagai berikut.

- a.  $91 \leq TP \leq 100$  kategori amat baik
  - b.  $76 \leq TP < 91$  kategori Baik
  - c.  $61 \leq TP < 76$  kategori Cukup,
  - d.  $51 \leq TP < 61$  kategori sedang
  - e.  $TP < 51$  kategori kurang
2. Untuk tugas yang menghasilkan produk seperti RPP, Anda dapat menggunakan format penilaian RPP sebagai panduan untuk melakukan diskusi menilai RPP yang telah Anda buat.



## **Kegiatan Pembelajaran 3**

### **Pelaksanaan Pembelajaran Di SD/MI**

### **Dengan Mengintegrasikan Nilai-Nilai Karakter**

#### **A. Tujuan**

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, guru yang bertugas mengelola pembelajaran di SD/MI khususnya guru SD yang sedang mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan secara mandiri atau berkelompok dalam satu sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan dapat:

1. melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan menggunakan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya;
2. melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter.

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Indikator pencapaian kompetensi Guru yang diharapkan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
2. Praktek melaksanakan pembelajaran mata pelajaran dan/atau tematik terpadu dengan pendekatan saintifik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter.



### C. Uraian Materi

Dalam kegiatan ini, Anda akan mempelajari tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran dan/atau tematik terpadu dengan pendekatan saintifik.

#### 1. Amanat Standar Proses

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dikemukakan Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.

Lebih lanjut, dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup (Standar Proses (2013: 5-7)).

Dalam kegiatan pendahuluan, yang perlu dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- b. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;
- c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
- e. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

a. Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.

b. Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

c. Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan model belajar berbasis penyingkapan /penelitian (*discovery/inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi hal berikut.



### Kegiatan Pembelajaran 3

- a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
- b. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- c. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- d. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

## **2. Melaksanakan Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Pendekatan Saintifik dengan Mengintegrasikan Nilai-nilai Karakter**

Mengacu pada standar proses seperti diuraikan di atas, guru hendaknya dalam melaksanakan pembelajaran perlu mengakomodasi dengan menggunakan pendekatan antara lain seperti: pendekatan tematik, tematik terpadu, saintifik, inkuiri, penyingkapan (*discovery*), dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

Hal tersebut dapat terwujud, apabila guru dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan sendiri. Untuk itu, dalam kegiatan pembelajaran peserta didik haruslah mengalami, diantaranya: melakukan pengamatan, percobaan, penyelidikan, wawancara, belajar banyak melalui berbuat, atau pengalaman langsung yang mengaktifkan banyak indera; dan komunikasi, diantaranya: mengemukakan pendapat, presentasi laporan, memajangkan hasil kerja, atau ungkap gagasan.

Untuk kurikulum 2013, perlu diingat bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat kompetensi inti. KI-1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD tentang keterampilan. KI-1 dan KI-2 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3 dan KI-4 untuk semua muatan pelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi *indirect teaching* pada setiap kegiatan pembelajaran.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar internalisasi nilai-nilai karakter terjadi dengan lebih intensif selama tahap pelaksanaan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup adalah sebagai berikut.

#### a. Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- 1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (apersepsi);
- 3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;
- 4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Sejumlah contoh yang dapat dilakukan guru untuk mengenalkan nilai, membangun kepedulian akan nilai, dan membantu internalisasi nilai-nilai karakter pada tahap pendahuluan adalah sebagai berikut.

- 1) Guru datang tepat waktu (disiplin).
- 2) Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas (santun, dan peduli).
- 3) Berdoa sebelum membuka pelajaran (religious).
- 4) Mengecek kehadiran siswa (disiplin).
- 5) Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya (religious, peduli).
- 6) Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu (disiplin).
- 7) Menegur siswa yang terlambat dengan sopan (disiplin, santun, peduli).
- 8) Mengaitkan materi/kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter.
- 9) Menyampaikan butir karakter yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD.



## Kegiatan Pembelajaran 3

### **b. Kegiatan Inti**

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Berikut ini **contoh nilai** yang ditanamkan dari proses pembelajaran pada tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang potensial dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai karakter.

#### 1) **Eksplorasi**

Dalam kegiatan eksplorasi ini yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- a) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber (*mandiri, berfikir logis, kreatif, kerjasama*);
- b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain (*kreatif, kerja keras*);
- c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya (*kerja sama, saling menghargai, peduli lingkungan*);
- d) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran (*rasa percaya diri, mandiri*); dan
- e) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan (*mandiri, kerjasama, kerja keras*).

#### 2) **Elaborasi**

Dalam kegiatan elaborasi ini yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- a) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna (*cinta ilmu, kreatif, logis*);
- b) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis (*kreatif, percacaya diri, kritis, saling menghargai, santun*);

- c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut (*kreatif, percaya diri, kritis*);
- d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif (*kerjasama, saling menghargai, tanggung jawab*);
- e) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar (*jujur, disiplin, kerja keras, menghargai*);
- f) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok (*jujur, bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*);
- g) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil; kerja individual maupun kelompok (*percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*);
- h) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan (*percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*);
- i) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik (*percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*).

### 3) **Konfirmasi**

Dalam kegiatan konfirmasi ini yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik (*percaya diri, saling menghargai, santun, kritis, logis*);
- b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber (*percaya diri, kritis, logis*);
- c) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan (*memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri*);
- d) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar antara lain dengan guru:
  - (1) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar (*peduli dan santun*);



### Kegiatan Pembelajaran 3

- (2) membantu menyelesaikan masalah (*peduli*);
- (3) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi (*kritis*);
- (4) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh (*cinta ilmu*);
- (5) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif (*peduli, percaya diri*).

Pada pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran pada tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang dapat membantu siswa *menginternalisasi nilai-nilai karakter ini dapat terwujud, apabila guru dapat memilih suatu pendekatan pembelajaran dimana peserta didik memiliki hasil yang komprehensif tidak hanya pada tataran kognitif (olah pikir), tetapi pada tataran afektif (olah hati, rasa, dan karsa), serta psikomotor (olah raga)*. Untuk siswa kelas awal, contoh pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik atau pendekatan berbasis kontekstual, seperti: (a) pembelajaran berbasis masalah, (b) pembelajaran kooperatif, (c) pembelajaran berbasis proyek, dan lain—ain. Pembelajaran dengan pendekatan tersebut tersebut dapat memberikan *nurturant effect* pengembangan karakter peserta didik, seperti: karakter cerdas, berpikir terbuka, tanggung jawab, rasa ingin tahu.

#### c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak. Dalam kegiatan penutup ini yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut.

- 1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Selain simpulan yang terkait dengan aspek pengetahuan, peserta didik difasilitasi membuat pelajaran moral yang berharga yang dipetik dari pengetahuan/keterampilan dan/atau proses pembelajaran yang telah dilaluinya (*mandiri, kerjasama, kritis, dan logis*).
- 2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Penilaian tidak hanya mengukur

pencapaian siswa dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada perkembangan karakter mereka. Untuk menanamkan kejujuran penilaian dapat dilakukan antar teman (*peer assesment*) (jujur, mengetahui kelebihan dan kekurangan);

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Umpan balik yang terkait dengan proses maupun hasil, harus menyangkut baik kompetensi maupun karakter, dan dimulai dengan aspek-aspek positif yang ditunjukkan oleh siswa. Karya-karya siswa yang dipajang untuk mengembangkan sikap saling menghargai karya orang lain dan rasa percaya diri (*saling menghargai, percaya diri, santun, kritis dan logis*).

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok diberikan dalam rangka tidak hanya terkait dengan pengembangan kemampuan intelektual, tetapi juga kepribadian (disiplin, berprestasi, tanggung jawab, mandiri, kerja keras).

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, (rasa ingin tahu, tanggung jawab).

6) Berdoa pada akhir pelajaran.

Beberapa hal lain yang perlu dilakukan oleh guru untuk mendorong dipraktikkannya nilai-nilai. **Pertama, guru harus merupakan seorang model dalam karakter.** Dari awal hingga akhir pelajaran, tutur kata, sikap, dan perbuatan guru harus merupakan cerminan dari nilai-nilai karakter yang hendak ditanamkannya.

**Kedua, pemberian reward kepada siswa yang menunjukkan karakter yang dikehendaki dan memberikan punishment kepada mereka yang tidak menunjukkan karakter yang dikehendaki.** Reward dan punishment yang dimaksud dapat berupa ungkapan verbal dan non verbal, kartu ucapan selamat atau catatan peringatan, dan sebagainya. Untuk itu, guru harus menjadi pengamat yang baik bagi setiap siswanya selama proses pembelajaran.

**Ketiga, harus dihindari olok-olok** ketika ada ketika ada siswa yang datang



### Kegiatan Pembelajaran 3

terlambat atau menjawab pertanyaan dan/atau berpendapat kurang tepat/relevan. Kebiasaan mengolok-olok terhadap siswa yang lain harus dihindari, untuk menumbuhkembangkan sikap bertanggung jawab, empati, kritis, kreatif, inovatif, rasa percaya diri dan sebagainya.

Selain itu, **setiap kali guru memberi umpan balik dan/atau penilaian kepada siswa, guru harus mulai dari aspek-aspek positif atau sisi-sisi yang telah kuat/baik pada pendapat, karya, dan/atau sikap siswa.** Guru memulainya dengan memberi penghargaan pada hal-hal yang telah baik dengan ungkapan verbal dan/atau non verbal dan baru kemudian menunjukkan kekurangan-kekurangannya dengan 'hati'. Dengan cara ini, sikap-sikap saling menghargai dan menghormati, kritis, dan kreatif, percaya diri, santun, dan sebagainya akan tumbuh subur.

Pada pelaksanaan pembelajaran ini guru berperan memfasilitasi diinternalisasinya nilai-nilai karakter siswa, antara lain guru sebagai: fasilitator, motivator, partisipan, dan pemberi umpan balik, Mengutip ajaran Ki Hajar dewantara, guru yang dengan efektif dan efisien mengembangkan karakter siswa adalah mereka yang *ing ngarsa sung tuladha* (di depan guru berperan sebagai teladan/memberi contoh), *ing madya mangun karsa* (di tengah-tengah peserta didik, guru membangun prakarsa dan bekerjasama dengan mereka), *tut wuri handsayani* (di belakang guru memberi daya semangat dan dorongan bagi peserta didik). Sebagai contoh, guru sebagai fasilitator untuk menanamkan nilai rasa ingin tahu, tanggung jawab, siswa ditugaskan membaca buku, guru juga membaca buku.

Agar peserta didik terfasilitasi dalam mengenal, menjadi peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai karakter, peserta didik harus diberi peran aktif dalam pembelajaran, antara lain: sebagai partisipan diskusi, pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan eksperimen, pelaksana proyek, dan sebagainya.

### 3. Evaluasi Penilaian hasil belajar

Teknik dan instrumen penilaian yang dipilih dan dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian akademik atau kognitif siswa, tetapi juga mengukur

perkembangan kepribadian siswa. Perlu diupayakan bahwa teknik penilaian yang diaplikasikan mengembangkan kepribadian siswa sekaligus.

Penilaian pencapaian hasil belajar didasarkan pada indikator pencapaian hasil belajar yang ditentukan, Penilaian pencapaian nilai karakter juga didasarkan pada indikator nilai karakter yang telah ditentukan, misalnya indikator untuk nilai kejujuran. Untuk penilaian nilai-nilai karakter siswa, dalam satu semester guru merumuskan agar peserta didik **“mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan”**, kemudian guru mengamati dengan berbagai cara, apakah yang dikatakan siswa itu jujur mewakili perasaan dirinya. Mungkin saja siswa menyatakan perasaannya itu secara lisan atau tertulis, atau bahkan dengan bahasa tubuh, guru bisa mengamati dan menilainya. Penilaian nilai-nilai karakter siswa ini dilakukan secara terus menerus, setiap saat baik guru sedang berada dalam kelas atau di sekolah. Model *anecdotal record* (catatan yang dibuat guru ketika melihat timbulnya perilaku siswa yang berkenaan dengan nilai yang sedang dikembangkan), hal ini dapat dilakukan guru setiap saat. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya sesuai dengan indikator nilai yang dikembangkan. Dari hasil pengamatan, catatan *anekdot*, tugas, laporan dan sebagainya, guru dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan tersebut dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif, salah satu contoh penilaian kualitatif sebagai berikut.

- a. BT = Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku sesuai dengan yang dinyatakan dalam indikator).
- b. MT = Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku seperti yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
- c. MB = Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda-tanda perilaku sesuai dengan yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).



### Kegiatan Pembelajaran 3

- d. MK = Menjadi Kebiasaan (apabila peserta didik secara terus menerus telah memperlihatkan perilaku sesuai dengan yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

Pernyataan kualitatif tersebut dapat digunakan ketika guru melakukan penilaian pada setiap kegiatan pembelajaran, sehingga guru memperoleh profil peserta didik dalam satu semester tentang nilai yang terkait dengan kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan sebagainya sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dikembangkan. Posisi nilai yang dimiliki peserta didik adalah posisi peserta didik di akhir semester, bukan hasil tambah atau akumulasi dari berbagai kesempatan atau tindakan penilaian selama satu semester tersebut. Jadi apabila pada awal semester peserta didik masih dalam status BT sedangkan pada penilaian di akhir semester yang bersangkutan sudah berada pada posisi MB maka untuk nilai di rapot digunakan status MB. Ini untuk membedakan penilaian antara nilai hasil belajar pengetahuan dengan nilai keterampilan.

## D. Aktivitas Pelaksanaan Pembelajaran

Aktivitas dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik dapat Anda lakukan dengan mengikuti langkah kegiatan pada lembar kegiatan 4 berikut,

### Lembar Kegiatan 4 Praktek Pelaksanaan Pembelajaran

1. Siapkan RPP pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik, tematik terpadu, saintifik, inkuiri, penyingkapan (*discovery*), atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) yang telah Anda buat.
2. Praktekkan RPP yang Anda buat di kelas yang Anda Ampu. Mintalah teman sejawat Anda mengamati pembelajaran yang Anda laksanakan dengan mengisi format penilaian pelaksanaan pembelajaran beserta catatan penting yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung (Contoh instrumen



observasi atau penilaian pelaksanaan pembelajaran terlampir).

3. Dari hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran yang telah Anda laksanakan dari sejawat, identifikasilah apakah tahapan kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan telah menunjukkan aktivitas pembelajaran tematik terpadu sesuai prinsip keterpaduan dan/atau pendekatan saintifik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter? Berikan alasan pendapat Anda tersebut!

Apabila Anda mengalami kesulitan, baca kembali modul lebih mendalam dan diskusikanlah dengan teman sejawat Anda di sekolah atau di kelompok kerja guru (KKG) bagaimana isi aturan atau pedoman tersebut.

### **E. Latihan/Kasus/Tugas**

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi-materi yang ada pada Modul. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda terhadap materi pada modul ini, Anda kami sarankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa mendiskusikan dengan teman yang lain terlebih dahulu. Jika masih ragu dengan jawaban Anda, maka pelajari kembali bab ini atau diskusikan dengan teman sejawat baik di sekolah maupun di KKG.

1. Sesuai amanat standar proses, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Aktifitas apa saja yang bisa Anda lakukan dalam pembelajaran sehingga ketiga ranah tersebut dapat tercapai?
2. Pembelajaran apa yang bisa Anda terapkan untuk memperkuat pendekatan saintifik (*scientific*), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran)?
3. Apa yang perlu Anda lakukan agar pembelajaran yang Anda lakukan mengakomodasi pendekatan tematik, tematik terpadu, atau saintifik?



### Kegiatan Pembelajaran 3

4. Apa yang perlu Anda lakukan dalam melaksanakan pembelajaran agar internalisasi nilai-nilai karakter terjadi dengan lebih intensif?

### F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes yang telah tersedia dalam lampiran. Hitunglah jumlah jawaban yang benar, kemudian tentukan tingkat penguasaan Anda terhadap materi pada tiap kegiatan pembelajaran (KB) pada modul ini dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Tingkat Penguasaan (TP)} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Kategori penguasaan yang Anda capai adalah sebagai berikut.

- a.  $91 \leq TP \leq 100$  kategori amat baik
- b.  $76 \leq TP < 91$  kategori Baik
- c.  $61 \leq TP < 76$  kategori Cukup,
- d.  $51 \leq TP < 61$  kategori sedang
- e.  $TP < 51$  kategori kurang



## **Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas**

### **Kegiatan Pembelajaran 1**

#### **1. Pengertian RPP**

- a. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.
- b. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).
- c. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.

#### **2. Landasan landasan pengembangan RPP**

- a. Lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses
- b. Permendikbud RI Nomor 81 A Lampiran IV 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran

#### **3. Fungsi atau kegunaan RPP**

- a. Fungsi RPP adalah sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.
- b. Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman atau pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap KD.

#### **4. Komponen RPP**

Komponen RPP antara lain adalah (1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; (2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (3) kelas/semester; (4) materipokok; (5) alokasi waktu; (6) tujuan pembelajaran; (7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;

(8) materi pembelajaran; (9) metode pembelajaran; (10) langkah-langkah pembelajaran; (11) penilaian hasil pembelajaran; (12) media pembelajaran dan sumber belajar.

5. Langkah dalam menentukan media pembelajaran yang dibutuhkan agar pembelajaran berjalan efektif adalah dengan melakukan analisis kebutuhan media pembelajaran, dengan melakukan langkah berikut.

- a. Mempelajari Kurikulum yang berlaku
- b. Menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai
- c. Memilih dan menentukan materi yang akan disajikan
- d. Memilih dan menentukan jenis media pembelajaran

## **Kegiatan Pembelajaran 2**

### **1. Indikator pencapaian kompetensi**

#### **Bahasa Indonesia**

3.5.1 Menemukan informasi yang terkait dengan kehidupan pada masa salah satu kerajaan Hindu.

4.5.1 Membuat ulasan sederhana terkait dengan kehidupan pada masa salah satu kerajaan Hindu dengan menggunakan kosakata baku.

#### **IPS**

3.2.1 Menjelaskan pentingnya sikap persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2.1 Memberikan contoh pelaksanaan sikap persatuan.

#### **PKn**

3.4.1 Menjelaskan pentingnya kegiatan bergotong royong sebagai wujud dari rasa persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat.

4.3.1 Memberikan contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan.



Kunci Jawaban

## **2. Menentukan Instrumen Penilaian**

### **Bahasa Indonesia**

3.5.1 Sebutkan informasi yang kalian peroleh dari isi bacaan salah satu kerajaan Hindu.

4.5.1 Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman?

### **IPS**

3.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan gotong royong di lingkunganmu?

4.2.1 Ceritakan pengalamanmu ketika melaksanakan kegiatan gotong royong!

### **PKn**

3.4.1 Apakah yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan?

4.3.1 Berilah 3 contoh yang menunjukkan rasa persatuan di lingkungan sekolah ataupun di rumah.



## Evaluasi

1. Fungsi utama indikator adalah untuk ... .
  - A. menentukan materi pokok
  - B. merumuskan bentuk dan jenis penilaian
  - C. merumuskan tujuan pembelajaran
  - D. menentukan media dan sumber belajar
  
2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah ... .
  - A. memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan
  - B. sesuai dengan herarki konsep materi pembelajaran
  - C. menunjukkan kegiatan siswa dan materi
  - D. jawaban a, b, dan c benar
  
3. Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan ... .
  - A. proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
  - B. hasil proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
  - C. indikator pencapaian peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
  - D. proses dan hasil belajar belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
  
4. Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman bagi guru untuk ... .
  - A. mengelola interaksi pembelajaran
  - B. melakukan penilaian hasil belajar siswa
  - C. memberdayakan sumber belajar
  - D. melaksanakan pembelajaran di kelas





## Evaluasi

5. Pernyataan berikut yang bukan merupakan bagian dari kegiatan penyusunan butir instrumen hasil belajar adalah ... .
  - A. mempertimbangkan komposisi aspek-aspek kognitif
  - B. membuat indikator soal
  - C. menentukan kompetensi atau indikator yang hendak diukur
  - D. diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa
  
6. Banyak variasi dalam mendefinisikan media tetapi ada persamaan pengertian, yaitu ... .
  - A. perantara guru
  - B. penyalur pesan
  - C. pengantar guru dan peserta didik
  - D. pengantar proses pembelajaran
  
7. Salah satu manfaat media dalam pembelajaran adalah ... .
  - A. guru lebih santai karena terbantu
  - B. pembelajaran dapat bermakna ganda
  - C. dapat menjadikan pelajaran menjadi lebih luas
  - D. dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret
  
8. Buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif termasuk jenis sumber belajar ... .
  - A. lingkungan (*setting*)
  - B. peralatan (*device*)
  - C. bahan (*material*)
  - D. pesan (*message*).
  
9. Perhatikan KD berikut!  
KD 3.4. Menggali informasi dari teks dongeng tentang kondisi alam dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman  
Berdasarkan KD tersebut, untuk pemahaman peserta didik rumusan indikator yang tepat adalah....

- A. menyebutkan kondisi alam dalam teks dongeng
- B. siswa dapat menuliskan ciri-ciri kondisi alam dalam teks dongeng
- C. siswa menyebutkan ciria-ciri kondisi alam dengan tepat
- D. membaca teks dongeng dengan nyaring

10. Perhatikan KD berikut!

KD. 3.2 Mendeskripsikan daur hidup beberapa jenis mahluk hidup.

Berdasarkan KD tersebut, bu Deti merumuskan indikator pembelajaran, berikut ini indikator yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah

- A. mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis
- B. membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna
- C. mengidentifikasi jenis hewan yang mengalami metamorphosis sempurna dan tidak sempurna.
- D. mengamati jenis hewan yang mengalami metamorphosis sempurna dan tidak sempurna.



## Penutup

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Penyusunan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. RPP merupakan pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas pembelajaran di kelas. Dalam membuat RPP guru hendaknya memperhatikan komponen-komponen pembelajaran mengacu pada standar proses dan pedoman pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Agar tujuan mata pelajaran tercapai dengan optimal, guru dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang dituangkan dalam RPP hendaknya dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh sesuai dengan strategi, pendekatan ataupun model yang dipilih khususnya pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik. Dengan demikian dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, guru diharapkan lebih menekankan pada proses pembelajaran (*learning*) daripada mengajar (*teaching*).

Guru dianggap sudah memahami langkah-langkah pengembangan RPP. Untuk itu, guru dapat menggunakan modul ini sebagai bagian dari acuan pengembangan RPP yang dimungkinkan sebagian dari guru masih mengalami kendala dalam mengembangkan atau membuat RPP tematik terpadu dengan pendekatan saintifik. Untuk itu, pelajari dengan baik kegiatan pembelajaran ini dan kerjakan latihan atau tugas yang ada. Apabila Anda masih mengalami kesulitan diskusikan dengan teman sejawat dalam Diklat, di kelompok KKG, ataupun di Sekolah yang Anda ampu.



## Daftar Pustaka

- Association of Education Communication Technology (AECT). 1977. *The Definition of Educational Technology*, Edisi Indonesia. Jakarta: CV Rajawali dan Pustekom.
- Briggs, Leslie J. (1970) *Instructional Design Principle and Application*. New Jersey: Prentice Hall inc.
- Bloom, B. S. ed. et al. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, Cognitive Domain*. New York: David McKay.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Merancang Sumber Belajar*. Jakarta.
- Dale, E. (1969). *Audio Methos in Teaching*. (Third Edition) New York: The Dryden Press, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Gronlund, N. E. (1978). *Stating Objectives for Classroom Instruction 2nd ed*. New York: Macmillan Publishing.
- Gagne, R.M. (1970) *The Condition of Learning*. New York HortRinehart, and Winston, Inc. (Original work published 1965)
- Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, Cet.Pertama, Pekanbaru: Suska Press, 2010.
- Heinich, Molenda, dan Russel, 1969. *Instructional Media*. New York: Macmillan
- Krathwohl, D. R. ed. et al. (1964), *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II, Affective Domain*. New York: David McKay.
- Krathwohl, David R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy An Overview dalam *Theory into Practice*, Vol 41. No. 4, Autumn, 2002, Ohio: Ohio State University diunduh di [www.Unco.edu/ce;/sir/stating.../krathwohl.pdf](http://www.Unco.edu/ce;/sir/stating.../krathwohl.pdf).
- Miarso, Yusufhadi. (2004) *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Mendikbud. 2014. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*



## Daftar Pustaka

- Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- Mendikbud. 2013. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mendikbud. 2013. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mendikbud.2007. *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nana Sudjana, Ahmad Rivai. (2005). *Media Pengajaran*. Bandung: SinarBaruAlgendindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Rohani, Ahmad. (1997). *Media InstruksionalEdukatif*.Jakarta :RinekaCipta
- Sanjaya. (2008). *Kurikulum berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sadiman, Arief S. dkk. 1986. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Pustekomdan CV Rajawali.
- Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad 1989.*Media Pengajaran*. Bandung : Penerbit Sinar Baru
- Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad. 1989. *Teknologi Pengajaran*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Sadiman, Arief S., R. Rahardjo, AnungHaryono, Rahardjito. 1990. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*.Jakarta: CV Rajawali.

Supinah. 2011. Pengembangan *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: PPPPTK matematika.





## Lampiran-Lampiran

### LAMPIRAN 1: CONTOH FORMAT PENILAIAN RPP

#### RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN MENYUSUN RPP

Nama Guru : .....

Sekolah : .....

Mapel/Tema : .....

Materi/Sub Tema : .....

No	Aspek Penilaian	Deskriptor	Skor				Komentar
			1	2	3	4	
1.	Kesesuaian SK, KD (KI,KD), indikator, dan alokasi waktu	• Rumusan SK dan KD atau KI dan KD sesuai dengan standar Isi					
		• Rumusan Indikator sesuai dengan pencapaian KD					
		• Alokasi waktu sesuai dengan yang ada pada silabus					
2.	Tujuan Pembelajaran	• Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar					
3.	Materi Pembelajaran	• Materi pembelajaran benar secara teoritis					
		• Materi pembelajaran mendukung pencapaian KD					



Lampiran

No	Aspek Penilaian	Deskriptor	Skor				Komentar
			1	2	3	4	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Materi pembelajaran dideskripsikan yang menggambarkan kedalaman dan keluasan untuk mencapai KD</li> </ul>					
4.	Metode Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pembelajaran bervariasi</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan metode sesuai dengan karakteristik materi dan pencapaian kompetensi</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan metode sesuai dengan pendekatan/Model yang dipilih</li> </ul>					
5.	Langkah-langkah Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendahuluan memuat kegiatan apersepsi, motivasi, relevansi, dan penyampaian tujuan pembelajaran</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan inti dituliskan secara rinci sesuai dengan metode/pendekatan/strategi yang dipilih untuk menjabarkan tahapan pencapaian KD disertai alokasi waktu</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Inti pembelajaran yang dirancang berfokus pada siswa</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inti pembelajaran memberi kesempatan</li> </ul>					

		siswa bekerja sama dengan teman atau sumber belajar					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Langkah-langkah pembelajaran menggambarkan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi untuk mencapai SK/KD atau KI/KD</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan penutup, memuat kegiatan: penyimpulan/ refleksi/atau tindak lanjut (tugas pengayaan/ pematapan)</li> </ul>					
6.	Sumber Belajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber belajar sesuai untuk mendukung tercapainya KD</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber belajar bervariasi</li> </ul>					
7.	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat penilaian sesuai dan mencakup seluruh indikator</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rubrik/pedoman penyekoran/kunci jawaban dicantumkan secara jelas dan tepat</li> </ul>					



Lampiran

**Catatan Kelebihan/Kekurangan**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Kriteria Penilaian**

Setiap munculnya deskriptor sangat sempurna mendapat skor 4.

Deskriptor yang muncul, sempurna mendapat skor 3.

Deskriptor yang muncul, kurang sempurna mendapat skor 2.

Tidak munculnya deskriptor mendapat skor 1.

Skor maksimal 20 x 4= 80

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{80} \times 100 = \frac{\dots\dots\dots}{80} \times 100 = \dots\dots\dots$$

....., ..... 2017  
Penilai

.....



**LAMPIRAN 2: CONTOH FORMAT PENILAIAN PRAKTEK PEMBELAJARAN****RUBRIK PENILAIAN  
KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN**

Nama Peserta : \_\_\_\_\_  
 Mata Pelajaran : \_\_\_\_\_  
 Modul /Kelompok Kompetensi : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan Pembelajaran : \_\_\_\_\_

Aspek yang Diamati		Skor				Catatan
		1	2	3	4	
<b>Kegiatan Pendahuluan</b>						
1	Memotivasi peserta dalam memulai pembelajaran					
2	Mengondisikan suasana belajar yang nyaman (pengaturan tempat duduk, media, kesiapan alat bantu pembelajaran)					
3	Menyampaikan tujuan, kompetensi, indikator, alokasi waktu dan skenario kegiatan pembelajaran					
<b>Kegiatan Inti</b>						
<b>Kemampuan memfasilitasi Pembelajaran</b>						
1	Menguasai materi pembelajaran					
2	Menyajikan materi secara sistematis					
3	Menguasai kelas					

Lampiran

4	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan					
<b>Pelibatan peserta dalam pembelajaran</b>						
1	Menumbuhkan partisipasi aktif peserta dalam kegiatan belajar					
2	Merespon positif partisipasi peserta					
3	Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta dalam belajar					
<b>Pemanfaatan media/sumber belajar dalam pembelajaran</b>						
1	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media belajar					
2	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber pembelajaran					
3	Melibatkan peserta dalam pemanfaatan media belajar					
<b>Pelaksanaan penilaian pembelajaran</b>						
1	Melaksanakan penilaian sikap					
2	Melaksanakan penilaian pengetahuan					
3	Melaksanakan penilaian keterampilan					
<b>Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran</b>						
1	Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar					
2	Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar					
<b>Kegiatan Penutup</b>						
1	Memfasilitasi peserta merangkum materi pelajaran					
2	Melakukan rerefleksi proses dan materi pelajaran					



**Catatan Kelebihan/Kekurangan**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Kriteria Penilaian**

- Setiap munculnya deskriptor sangat sempurna mendapat skor 4.
- Deskriptor yang muncul, sempurna mendapat skor 3.
- Deskriptor yang muncul, kurang sempurna mendapat skor 2.
- Tidak munculnya deskriptor mendapat skor 1.

Skor maksimal 20 x 4= 80

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{80} \times 100 = \frac{\dots\dots\dots}{80} \times 100 = \dots\dots\dots$$

....., ..... 2017  
 Penilai

.....





# MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



Kelompok  
Kompetensi

## PROFESIONAL

Penerapan Nilai, Norma,  
Moral Pancasila



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2017

**MODUL  
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

**SEKOLAH DASAR (SD)**

**KELAS TINGGI**

**TERINTEGRASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
DAN PENGEMBANGAN SOAL**

**KELOMPOK KOMPETENSI G**

**PROFESIONAL:**

**PENERAPAN NILAI, NORMA, MORAL PANCASILA**

Penulis:

**Dyah Sriwilujeng**

Penelaah:

**Sucahyono. MJ**

**Djunaidi**

**Yayan Sofian**

**Basuki**

**Rika**

Desain Grafis dan Ilustrasi:

**Tim Desain Grafis**

*Copyright © 2017*

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan





## Daftar Isi

	Hal.
<b>Kata Sambutan</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Kata Pengantar</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	4
C. Peta Kompetensi.....	4
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Cara Penggunaan Modul .....	5
<b>Kegiatan Pembelajaran 1 Penerapan Nilai, Norma, Moral berdasar Pancasila</b>	
<b>Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan</b> .....	<b>15</b>
A. Tujuan.....	15
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	15
C. Uraian Materi Penerapan Nilai, Norma, Moral Pancasila dalam Pembelajaran PPKn .....	16
D. Aktivitas Pembelajaran.....	71
E. Petunjuk Belajar .....	71
F. Wacana .....	72
G. Sumber/alat/bahan .....	72
H. Tugas/latihan .....	73
I. Evaluasi .....	75
<b>Kegiatan Pembelajaran 2 Sikap Moral Kewarganegaraan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia</b> .....	<b>77</b>
A. Tujuan.....	77
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	77
C. Uraian Materi Sikap Moral Kewarganegaraan.....	77





D. Aktivitas Pembelajaran Sistem Pemerintahan.....	98
E. Petunjuk Belajar .....	98
F. Wacana .....	98
G. Sumber/alat/bahan .....	100
H. Tugas/Latihan .....	100
I. Pengembangan Soal .....	103
<b>Evaluasi .....</b>	<b>109</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>111</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>113</b>
<b>Kunci Jawaban .....</b>	<b>115</b>





## Daftar Gambar

	Hal.
Gambar 1 Alur Model Pembelajaran Tatap Muka.....	6
Gambar 2 Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh.....	7
Gambar 3 Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In .....	9





## Daftar Tabel

	Hal.
Tabel 1 Daftar Lembar Kerja Modul .....	11
Tabel 2 Tugas .....	12



# Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang strategis dalam menyiapkan peserta didik sebagai anak bangsa yang baik di masa akan datang. Melalui mata pelajaran ini telah diprogramkan materi-materi yang bersifat pembekalan bagaimana mendidik, mengajar dan melatih peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, berperilaku baik, berbudi pekerti. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan juga sebagai pendidikan nilai, norma, moral, sikap dan perilaku yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pemahaman, sikap dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai budi pekerti, analog dengan nilai karakter bangsa. Sangat diharapkan para pendidik memahami Ruang Lingkup mata pelajaran PPKn yaitu meliputi Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara. Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat. Semangat kebersamaan dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa. Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara. Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural.

Persatuan dan kesatuan Moralitas sosial dan politik warga negara/ pejabat negara, dan tokoh masyarakat. Nilai dan moral Pancasila. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara. Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan. Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa. Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan di dalam latar belakang pembelajaran Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bahwa Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah



## Pendahuluan

satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Seiring dengan muatan mata pelajaran yang di korelasikan dengan program Pendidikan Karakter bahwa pada tahun 2017 ini sedang di laksanakan Gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Yang dimaksud dengan Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan untuk melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik). PPK memiliki skema kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan dukungan pelibatan publik, yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Nilai Utama yang termuat di dalam materi PPKn ini antara lain:

- a. **Religius** yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.  
**subnilai religius:** cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, teguh pendirian, percayadiri, kerja sama lintas agama, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, melindungi yang kecil dan tersisih.
- b. **Nasionalis** merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa,

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

**Subnilai nasionalis** antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama

- c. **Mandiri** merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

**Subnilai kemandirian** antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat

- d. **Gotong Royong** mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bersahabat dengan orang lain dan memberi bantuan pada mereka yang miskin, tersingkir dan membutuhkan pertolongan.

**Subnilai gotong royong** antara lain menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, sikap kerelawanan

- e. **Integritas** merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggungjawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

**Subnilai integritas** antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas)

## **B. Tujuan**

Disusunnya modul tentang penerapan nilai, norma, moral dalam pembelajaran PPKn Sekolah Dasar Kelas Tinggi yang bermuatan nilai karakter ini bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai hal berkenaan dengan substansi materi mata pelajaran PPKn, khususnya bagi guru yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6.

Setelah para guru membaca dan mempelajari materi tentang Penerapan Nilai, Norma, Moral dalam Pembelajaran PPKn Sekolah Dasar Kelas Tinggi ini, diharapkan mampu memahami dan menerapkan program Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang saat ini merupakan bagian integral Nawacita, dalam hal ini ada butir 8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan Revolusi Mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak, dalam mengelola sekolah. Dalam hubungan ini Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadatkan. Untuk itu, ada 5 nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai karakter yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK serta pembelajaran PPKn yang meliputi: Muatan Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pancasila sebagai wahana pendidikan karakter bangsa
2. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa
3. Sikap Moral Kewarganegaraan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia
4. Kepribadian nasional berdasarkan kebhinekaan budaya masyarakat Indonesia

## **C. Peta Kompetensi**

Para guru dalam membaca dan mempelajari modul ini diharapkan akan memiliki kompetensi yang terurai dalam peta kompetensi sebagai berikut:

20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan,
--

sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn

20.18.1. Mengidentifikasi macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar

20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan negara dan dunia

20.21.1. Menjelaskan konsep nilai, moral dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan dan dunia

20.21.2. Mengidentifikasi contoh sikap dan perilaku berdasarkan nilai, moral, dan norma kewarganegaraan secara kontekstual

20.21.3. Mendeskripsikan contoh sikap dan perilaku masyarakat yang cinta tanah air sebagai pendukung NKRI

#### **D. Ruang Lingkup**

Urutan topik di dalam kompetensi guru adalah

1. macam-macam norma dalam penerapan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar (nilai praxis Pancasila)
2. Perilaku kebersamaan dalam keberagaman budaya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara
3. Penerapan Pancasila sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa
5. Sikap Moral Kewarganegaraan dalam menjunjung pelaksanaan Sistem

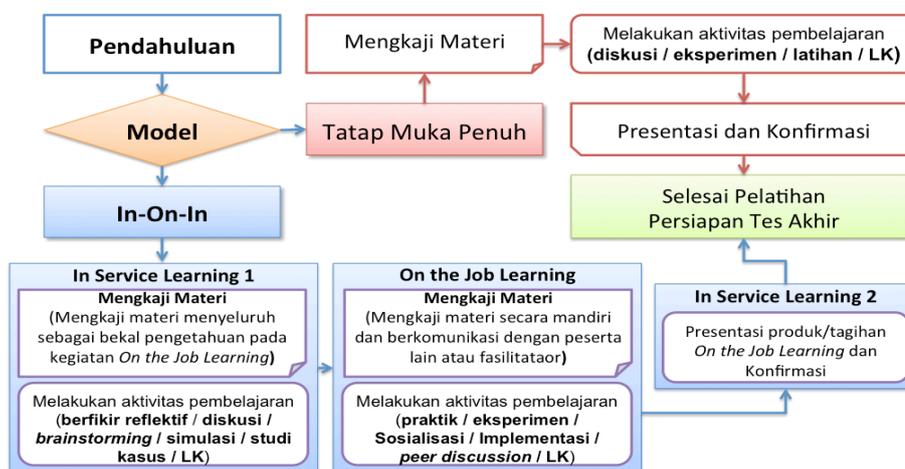
#### **E. Cara Penggunaan Modul**

Secara umum, cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan Pembelajaran disesuaikan dengan skenario setiap penyajian mata diklat. Modul ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik untuk moda tatap muka dengan



## Pendahuluan

model tatap muka penuh maupun model tatap muka In-On-In. Alur model pembelajaran secara umum dapat dilihat pada bagan dibawah.



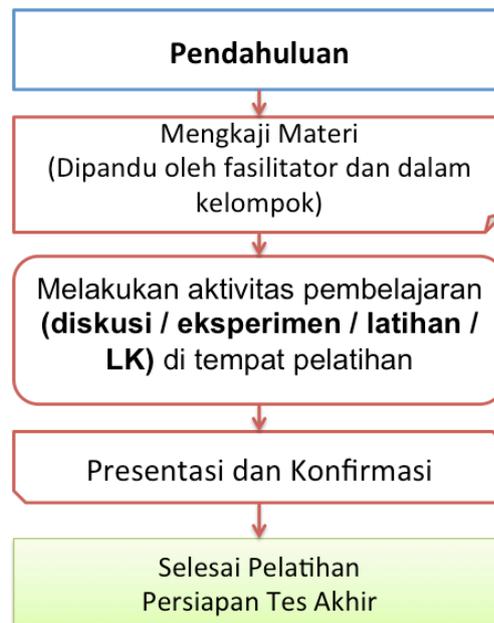
Gambar 1. Alur Model Pembelajaran Tatap Muka

### 1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh

Kegiatan pembelajaran diklat tatap muka penuh adalah kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dilingkungan ditjen. GTK maupun lembaga diklat lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini dilaksanakan secara terstruktur pada suatu waktu yang di pandu oleh fasilitator.

Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur pembelajaran yang dapat dilihat pada alur dibawah.





Gambar 2. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka penuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada peserta diklat untuk mempelajari:

- latar belakang yang memuat gambaran materi
- tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi
- kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.
- ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran
- langkah-langkah penggunaan modul

#### b. Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi G Profesional Tinggi, fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi secara



## Pendahuluan

individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.

### **c. Melakukan aktivitas pembelajaran**

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan yang akan secara langsung berinteraksi di kelas pelatihan bersama fasilitator dan peserta lainnya, baik itu dengan menggunakan diskusi tentang materi, melaksanakan praktik, dan latihan kasus.

Lembar kerja pada pembelajaran tatap muka penuh adalah bagaimana menerapkan pemahaman materi-materi yang berada pada kajian materi.

Pada aktivitas pembelajaran materi ini juga peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data sampai pada peserta dapat membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran.

### **d. Presentasi dan Konfirmasi**

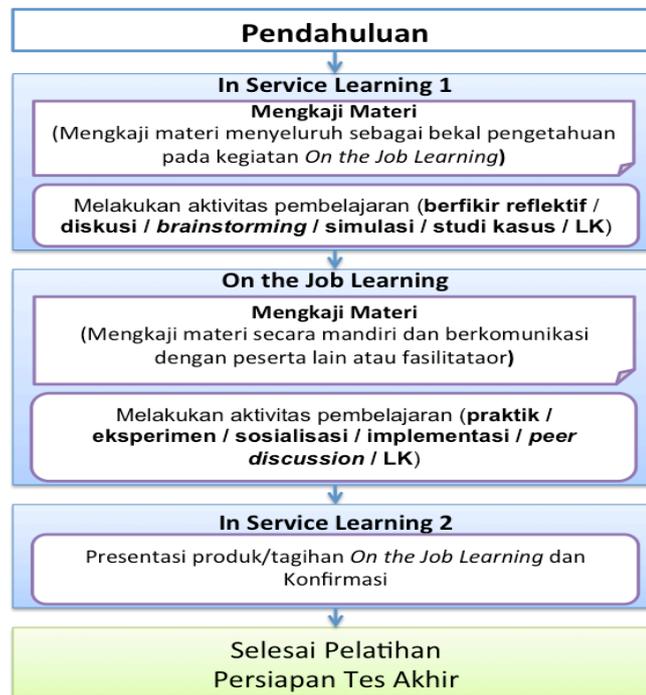
Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi hasil kegiatan sedangkan fasilitator melakukan konfirmasi terhadap materi dan dibahas bersama. pada bagian ini juga peserta dan penyaji *me-review* materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

### **e. Persiapan Tes Akhir**

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan layak tes akhir.

## **2. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka In-On-In**

Kegiatan diklat tatap muka dengan model In-On-In adalah kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan utama, yaitu *In Service Learning 1* (In-1), *on the job learning* (On), dan *In Service Learning 2* (In-2). Secara umum, kegiatan pembelajaran diklat tatap muka In-On-In tergambar pada alur berikut ini.



Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka model In-On-In

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat dijelaskan sebagai berikut,

### 1. Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan disampaikan bertepatan pada saat pelaksanaan *In service learning 1* fasilitator memberi kesempatan kepada peserta diklat untuk mempelajari:

- latar belakang yang memuat gambaran materi
- tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi
- Kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.
- ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran
- langkah-langkah penggunaan modul

### 2. *In Service Learning 1 (IN-1)*

#### • Mengkaji Materi

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi G Profesional Kelas Tinggi, fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai peserta



## Pendahuluan

untuk mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.

- **Melakukan aktivitas pembelajaran**

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan/metode yang secara langsung berinteraksi di kelas pelatihan, baik itu dengan menggunakan metode berfikir reflektif, diskusi, *brainstorming*, simulasi, maupun studi kasus yang kesemuanya dapat melalui Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada IN1.

Pada aktivitas pembelajaran materi ini peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mempersiapkan rencana pembelajaran pada *on the job learning*.

### 3. *On the Job Learning* (ON)

- **Mengkaji Materi**

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi G Profesional Kelas Tinggi, guru sebagai peserta akan mempelajari materi yang telah diuraikan pada *in service learning* 1 (IN1). Guru sebagai peserta dapat membuka dan mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan kepada peserta.

- **Melakukan aktivitas pembelajaran**

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di kelompok kerja berbasis pada rencana yang telah disusun pada IN1 dan sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan/metode praktik, eksperimen, sosialisasi, implementasi, *peer discussion* yang secara langsung di dilakukan di sekolah

maupun kelompok kerja melalui tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada ON.

Pada aktivitas pembelajaran materi pada ON, peserta secara aktif menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data dengan melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tagihan pada *on the job learning*.

#### 4. *In Service Learning 2 (IN-2)*

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi produk-produk tagihan ON yang akan di konfirmasi oleh fasilitator dan dibahas bersama. pada bagian ini juga peserta dan penyaji me-review materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran

#### 5. **Persiapan Tes Akhir**

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan layak tes akhir.

### 3. **Lembar Kerja**

Modul pembinaan karier guru kelompok kompetensi G Profesional Kelas Tinggi terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas pembelajaran sebagai pendalaman dan penguatan pemahaman materi yang dipelajari.

Modul ini mempersiapkan lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta, lembar kerja tersebut dapat terlihat pada table berikut.

Tabel 1. Daftar Lembar Kerja Modul

No	Kode LK	Nama LK	Keterangan
1.	LK.01.	Rasional dan alasan mengapa urutan sila-sila Pancasila yang dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945?	TM, IN1
2.	LK.02.	Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat	TM, IN1

## Pendahuluan

		terbuka. Pancasila sebagai Pedoman hidup dan budaya bangsa	
3.	LK.03.	Realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup.  Amatilah kehidupan di sekolah sehari-hari dalam interaksi peserta didik dengan teman-temannya dan diskripsikan nilai-nilai karakter apa saja yang termuat dan harusnya dipatuhi.	TM, ON
4.	LK.04.	Urutan logis sila-sila Pancasila tidak boleh digeser-pindahkan.  Muatan nilai karakter yang menjadikan pertimbangan dan diskripsikan alasannya!	TM, IN1
5.	LK.05.	Diskusikan dengan teman sejawat tentang aturan yang berlaku dalam hal ketentuan pencalonan kepala daerah.  <b>Dari aturan yang ada, kriteria apa saja yang dipersyaratkan terkait dengan calon kepala daera.?</b>	TM, ON

Tabel 2. Tugas

No	Kode Tugas	Pernyataan	Tugas
1.	Tugas 01 KB-2	Urutan Pancasila dalam Piagam Jakarta diskusikan dan Bandingkan dengan urutan Pancasila	TM, ON
2.	Tugas 02 KB-2	Diskripsikan uraian dan pengertian Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945	TM, IN1
3.	Tugas 03 KB-2	Diskripsikan uraian dan pengertian Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945	TM, ON
4.	Tugas 04	Buatlah identifikasi permasalahan Pilkada di daerah Anda dengan menyimak, mengamati, menelaah realita	ON

	KB-2	pelaksanaan Pilkada yang baru dilakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2015	
5.	Tugas 05 KB-2	Diskripsikan permasalahan dokumen yang selama ini dilaksanakan di beberapa daerah dan bagaimana meminimalisir adanya: kecurangan, dan perihal pemalsuan dokumen  Kaitkan dengan Nilai karakter	
6.	Tugas 06 KB-2	Anda dan kelompok Anda memiliki calon yang sangat potensi, tetapi tidak memperoleh dukungan dari partai politik yang diharapkan dapat mengusung pencalonan	TM, ON
7.	Tugas 07 KB-2	Seorang calon peserta pemilu yang telah terpilih oleh lebih dari 50 persen pemilih, dan sebagian besar pemilih. Karena ketidakpuasan ada kelompok lain yang melakukan protes/unjuk rasa menentang hasil pilukada	TM, ON
8.	Tugas 08 KB-2	Seorang yang berpotensi, pintar, memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan energik oleh warga dicalonkan untuk menjadi pemimpin daerah.  Nilai-nilai karakter apa yang menjadi pertimbangan pencalonan oleh warga tersebut.?	TM, ON

Keterangan.

TM : Digunakan pada Tatap Muka Penuh

IN1 : Digunakan pada *In service learning 1*

ON : Digunakan pada *on the job learning*

1. Agar lebih dapat terarah dalam memahami isi modul ini ada baiknya Anda memperhatikan beberapa peunjuk belajar berikut ini:
  - a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
  - b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan berikan penanda (stabilo) kata-kata penting yang dianggap baru, kemudian carilah kata-kata kunci tersebut di dalam glosarium dan atau kamus.



## Pendahuluan

- c. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan saling bertukar pikiran dengan teman terdekat di sekolah atau bisa juga dengan tutor terdekat anda, apabila menemui hal-hal yang dirasa kesulitan
- d. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, pustaka, disarankan juga download dari internet.
- e. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan mandiri dengan teman sejawat.
- f. Kerjakan semua latihan dan tugas, jangan ada yang dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan modul ini.





# **Kegiatan Pembelajaran 1**

## **Penerapan Nilai, Norma, Moral berdasar Pancasila**

### **Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**

Pembahasan pada Kegiatan Pembelajaran I ini diawali dari materi yang meliputi pembahasan PPKn tentang Pancasila. Secara berturut-turut akan diuraikan tentang: Penerapan Pancasila sebagai wahana pendidikan dan pembentukan karakter, serta Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa.

#### **A. Tujuan**

Dengan membaca modul bagian ini para pembaca diharap memiliki kemampuan dalam hal:

1. Memahami Penerapan Pancasila sebagai wahana pendidikan dan pembentukan karakter, serta Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa.
2. Menganalisis kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
3. Mendeskripsikan penerapan Norma, Moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
2. Mengidentifikasi macam-macam norma dalam penerapan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar (nilai *praxis* Pancasila)
3. Menganalisis kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran



## **C. Uraian Materi Penerapan Nilai, Norma, Moral Pancasila dalam Pembelajaran PPKn**

### **1. Pancasila merupakan landasan utama mata pelajaran PPKn**

Pancasila merupakan satu sistem yang tidak dapat di maknai satu persatu secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang dimaksud dengan kesatuan atau kebulatan.

Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal dan bersumber pada hakikat manusia "*monopluralis*" yakni :

- a. Susunan kodrat, jasmani rohani.
- b. Sifat kodrat, individu- makhluk sosial.
- c. Kedudukan kodrat, pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan YME.
- d. Kesatuan yang bersifat hirarkis, berbentuk piramidal

Pancasila sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari sila yang memiliki ragam makna yang berbeda, namun sistem juga memiliki kesatuan yang utuh dan bulat. Sila sila dalam pancasila saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Diantaranya pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai fungsi sebagai pedoman didalam berbangsa dan bernegara juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu Negara .

Unsur-unsur pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Contoh unsur-unsur pancasila digali dari bangsa Indonesia.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat "Tuhan", yang dibuktikan dengan adanya kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia sepanjang sejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Manusia”, yang sudah terdapat dalam diri bangsa Indonesia sejak dahulu yang dapat ditinjau dari unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dari satu generasi kegenerasi lain yang tidak terputus-putus.
- c. Persatuan Indonesia adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Satu”, yang mengandung makna bahwa persatuan tetap hidup dalam berbagai bentuk, baik bersifat lokal maupun bersifat nasional.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Rakyat”, yang mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan kehidupan yang rukundan saling menolong.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Adil”, yang mengandung makna bahwa unsur sosial lebih menonjol dari unsur individu

Menanamkan nilai-nilai Pancasila dibelajarkan oleh pendidik kepada seluruh peserta didik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hakekat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan, dan merupakan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan, ia memiliki ontology pokok ilmu politik khususnya konsep “political democracy”, terutama aspek “duties and rights of citizen” (Chreshore:1886). Dari ontology pokok inilah berkembang konsep “Civics”, yang secara harfiah diambil dari Bahasa Latin “civicus” yang artinya warga Negara. Secara epistemologis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang pendidikan keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi “social studies” yakni “citizenship



## Kegiatan Pembelajaran 1

transmission” (Barr, Barrt, dan Shermis: 1978). Dikemukakan pula oleh Winataputra (2001) bahwa saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu “body of knowledge” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik, yang didalamnya terdapat tiga ranah “citizenship education” yakni: ranah akademis, ranah kurikuler, dan ranah sosial kultural”.

Ketiga ranah itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi “civic virtue and culture” yang mencakup “civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence” (CCE: 1998). Oleh karena itu, ontologi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya kajian keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program kurikuler Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan, dan aktivitas sosial-kultural Pendidikan Kewarganegaraan saat ini benar-benar bersifat multifaset/ multidimensional. Sifat multidimensio nalitas inilah yang membuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai: pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

### 2. Tujuan Pembelajaran PPKn

Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory*

*learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler merupakan program Pendidikan yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Melalui domain ini, proses penilaian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap program pembelajaran dan program pembangunan karakter.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program akademik merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik Pendidikan yang menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan yang sesuai. Kajian ini lebih memperjelas bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan semata-mata sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah melainkan pendidikan disiplin ilmu yang memiliki tugas komprehensif dalam arti bahwa semua *community of scholars* mengemban amanat (*missions*) bukan hanya di bidang telaah instrumental, praksis-operasional dan aplikatif, melainkan dalam bidang kajian teoritis-konseptual yang terkait dengan pengembangan struktur ilmu pengetahuan dan *body of knowledge*.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program sosial kultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Program Pendidikan Kewarganegaraan ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar



## Kegiatan Pembelajaran 1

pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apabila dikaji, maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkebangsaan, pernyataan ini memberikan pesan kepada para penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kewarganegaraan, kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan watak kiranya kita dapat mencatat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI 1945.
- b. Nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara sistematis dan sistemik dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan

konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai substansi/konten dan pengalaman belajar (*learning experiences*) Pendidikan Kewarganegaraan.

Melihat dasar filosofinya (secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis) dan paradigma psikopedagogis dan sosio-andragogis perwujudannya sebagai wahana pencerdasan kehidupan bangsa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ketiga dimensi konseptualnya (kurikuler, sosial kultural dan akademik) secara substantif merupakan pendidikan karakter kebangsaan yang bermuatan dan bermuara pada sistem nilai dan moral Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermuara pada terbentuknya watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Watak dan peradaban bangsa yang bermartabat tersebut merupakan modal dasar dan determinan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka tunggal Ika. Oleh karena itu entitas utuh watak dan peradaban bangsa yang bermartabat ini memerlukan pembentukannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi keterpaduan konsep moral (moral reasoning), perasaan/sikap moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior) ber-Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa *confluent education*, yakni pendidikan yang memusatkan perhatian dan komit pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Karena itu pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur perekat bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

#### Substansi Materi dan Peta Kompetensi PPKn

- a. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia



## Kegiatan Pembelajaran 1

d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh Indonesia dalam pergaulan antarbangsa

### **3. Pancasila sebagai Pedoman Hidup, sebagai Pandangan Hidup dan Budaya Bangsa**

Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan Negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadianya sendiri. Oleh karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadianya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Pancasila.

Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, Pada pembahasan berikut akan diawali dengan menguraikan nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

#### **a. Nilai-Nilai Juang Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara**

*Values* atau nilai-nilai merujuk kepada sesuatu "objek", tapi bukan objek itu sendiri, melainkan sesuatu yang melekat pada suatu objek. Manusia baik, merujuk manusia, tapi tidak berhenti pada "subjek", melainkan sifat-sifat subjek, kualitas subjek. Nilai-nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, nilai-nilai merupakan realita yang tersembunyi di balik objek (metafisika). Nilai-nilai ada sebab ada kenyataan-kenyataan di baliknya, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga (kualitas).

Melakukan penilaian (menilai) berarti membuat atau melakukan proses menimbang, membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan (*judgement*). Keputusan sebagai hasil mempertimbangkan (subjek penilai) terhadap objek tentu saja sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada pada subjek, unsur jasmani, rasio (cipta), karsa (jiwa, moral), dan rasa (estetika), religiusitas (iman, kepercayaan), subjek. Bernilai atau tidak suatu objek apabila sesuatu itu berguna, berharga, benar, indah, baik dan sebagainya, menurut subjek yang menilai.

Perlu dicatat bahwa dalam nilai-nilai terkandung cita-cita (*ide*), harapan, keharusan (*das sollen*). Ada tali-temali yang tidak dapat dipisahkan antara "*das sollen*" (cita-cita) itu dengan "*das sein*" (realita). Keinginan untuk mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan, sesuatu yang normatif menjadi perbuatan real sehari-hari itulah yang akan menentukan kualitas subjek (manusia) sistem etika (filsafat moral) menunjukkan bahwa tidak ada pandangan tunggal tentang nilai-nilai. Bergantung subjek dan sudut



## Kegiatan Pembelajaran 1

pandang yang digunakan dalam memandang “harga” suatu objek dalam hubungannya dengan subjek. Kaum *Hedonis* memandang yang berharga yang sanggup memberikan kenikmatan kaum *Utilitaris* menganggap yang bernilai yang memberikan kegunaan bagi banyak orang. Kaum *Eudemonis* menganggap “kebahagiaan” sebagai sesuatu yang bernilai dan berupaya diwujudkan melalui perbuatan “utama”. Kaum *Deontologis* menganggap yang berharga adalah berbuat sesuatu sebagai suatu kewajiban. Kaum *Teologis* yang berharga jika mematuhi dan menjauhi norma ke Illahian. Kaum Vitalistik menganggap yang bernilai apabila memiliki kemampuan pengendalian diri. Kaum Materialis menganggap harga manusia diukur dari kepemilikan harta dunia (materi), pendek kata sangat variatif dan tidak bermakna tunggal.

Max Scheler berpendapat bahwa nilai-nilai itu merupakan hierarkhi. Ada tingkatan-tingkatan kualitas nilai-nilai. Posisi suatu nilai dapat dikategorikan dalam nilai-nilai tinggi, nilai-nilai lebih rendah, berharga dan kurang berharga. Nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan, sebagai berikut :

- 1) Nilai-nilai Kenikmatan
- 2) Nilai-nilai yang menimbulkan rasa senang ataupun tidak menyenangkan, menimbulkan rasa suka atau menderita.
- 3) Nilai-nilai Kebudayaan
- 4) Nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti : kesehatan, kesejahteraan umum, ketertiban lingkungan.
- 5) Nilai-nilai Kejiwaan
- 6) Nilai-nilai keindahan, kebenaran, kejujuran, kesetiaan.
- 7) Nilai-nilai Kerokhaniaan
- 8) Nilai tertinggi dalam kehidupan, nilai-nilai yang lazimnya bersifat pribadi (personal) tentang yang suci dan tidak suci.

Notonegoro, guru besar UGM membagi nilai-nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Nilai Material

- 2) Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, nilai-nilai yang mengakomodasi kebutuhan fisik-jasmani manusia.
- 3) Nilai Vital
- 4) Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam mengadakan aktivitas dalam kehidupan.
- 5) Nilai Kerokhanian
- 6) Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam aspek rokhaniahnya. Nilai kerokhanian dibedakan menjadi empat :
  - (a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
  - (b) Nilai kebaikan (moral), bersumber pada kehendak (will, karsa manusia).
  - (c) Nilai keindahan (rasa, esthetis geooel) manusia.
  - (d) Nilai religius, nilai tertinggi dan obsolut, nilai yang bersumber pada agama, kepercayaan, umat manusia.

Mengacu pada konsep Notonegoro tentang nilai-nilai, maka dalam menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Pancasila mengacu pada kategori nilai-nilai Notonegoro sebagai berikut.

### 1) Nilai Material

#### a) Nilai Kebersamaan

Yamin dalam pidatonya pada Sidang lengkap BPUPKI, menyatakan bahwa tugas BPUPKI sepadan selaras dengan keinginan rakyat: mau merdeka dan bernegara berkedaulatan, keinsyafan untuk bersama-sama membangun untuk negara Indonesia seluruhnya. Di sebelah selatan memang Pulau Jawa berisi sebagian besar penduduk Indonesia, banyak hal menunjukkan Jawa sebagai pusat. Jawa memang pusat dan jantung kegiatan kepulauan Indonesia, tapi menyelidiki bahan-bahan untuk negara Indonesia, maka harus bertindak sebagai orang Indonesia. Harus memperhatikan masalah-masalah, soal-soal, dan keadaan istimewa di pulau Borneo, Selebes Maluku, Sunda Kecil, Malaya dan Sumatera. Seperti dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, Yamin konsisten pada kebersamaan : satu bangsa, satu bahasa, satu



## Kegiatan Pembelajaran 1

tanah air. Negara Indonesia yang akan didirikan menjadi Negara Indonesia lebih luas dari Pulau Jawa, Indonesia seluruhnya, Indonesia seutuhnya. Kebersamaan memiliki negara merdeka, memiliki wilayah bersama, bertempat tinggal bersama di wilayah tersebut, menyelenggarakan pemerintahan, negara milik bersama, adil-sejahtera bersama-sama.

### **b) Nilai kekeluargaan**

Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menyatakan dengan istilah “persatuan dan kekeluargaan”. Dasar ini sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, sesuai dengan struktur sosial Indonesia asli, hasil cipta karya budaya Indonesia, sesuai dengan aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia. Semangat kebatinan struktur kerokhanian bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan “kawulo” dan “gusti” yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara “mikrokosmos” dan “makrokosmos”, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Seorang individu tidak terlepas dari individu yang lain, tiap-tiap pribadi dan golongan mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri sesuai dengan kodrat alam. Semua mengarah dan ditujukan pada keseimbangan lahir batin.

Negara tidak dibangun untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan, suatu totalitas, satu integralitas. Negara integralistik, negara yang bersatu jiwa dengan seluruh rakyat, mengatasi segala golongan dalam lapangan atau di segala bidang. Negara kekeluargaan, Negara persatuan, semua golongan dan perseorangan menyadari kedudukannya sebagai bagian organik negara seluruhnya, wajib menegakkan persatuan dan harmoni antar segala bagian yang ada dalam negara.

**c) Nilai Gotong royong**

Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945 menawarkan sebagai “*beginsel*” negara. Negara gotong royong, negara yang semua pihak, semua anak bangsa mendukungnya “semua buat semua”. Indonesia untuk Indonesia cara hidup dan kehidupan “tulen-asli Indonesia. “Gotong Royong” kata Bung Karno, faham yang dinamis, lebih dinamis dibandingkan kekeluargaan. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama, membanting tulang, kerja keras, memeras keringat, saling membantu. Tidak memandang status ekonomi, status sosial, agama (suku, agama, ras antar golongan). Semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Bekerja bersama dengan keras (gotong), menikmati hasil kerja keras, tanpa kecuali, secara adil dan merata (royong).

**d) Nilai Kesatuan**

Yamin sebagai anggota BPUPKI, dan anggota Panitia Sembilan, kalau dirunut ke belakang merupakan tokoh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, menegaskan dalam pidatonya 29 Mei 1945 dihadapan sidang BPUPKI bahwa bangsa Indonesia pernah dua kali menjadi bangsa yang bernegara, pertama pada waktu terbentuknya Negara Syalendra-Sriwijaya (600-1400) yang ratusan tahun lamanya, kemudian Negara Indonesia kedua, kerajaan Majapahit (1293-1525). Sriwijaya dibangun dan dijunjung oleh rakyat sebagai Negara berdaulat, selaras dengan kepercayaan purbakala (kesaktian magic) dan agama Budha Mahayana.

Negara Indonesia kedua disusun atas faham keprabuan dan paduan agama Syiwa-Budha, menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang akan kita bangun hendaknya berdasar “kebangsaan dan berketuhanan”. Dasar kesatuan Sriwijaya dan Majapahit tidak dapat dilanjutkan karena tradisi negara Indonesia pertama, Indonesia kedua, dan Indonesia ketiga yang akan dibentuk, tidak tersambung dan sudah terputus. Ke depan rakyat Indonesia tidak dapat diikat dengan dasar



## Kegiatan Pembelajaran 1

dan bentuk negara terdahulu, sebab perubahan dan aspirasi kita sekarang jauh berlainan dari jaman yang sudah lewat. Agama sudah berlainan, alam pikiran sudah berbeda, susunan dunia sudah banyak berubah. Negara Indonesia yang akan dibentuk adalah “Negara Rakyat Indonesia” yang menolak segala paham federalisme, feodalisme, monarkhi, liberalisme, autokrasi, dan birokrasi, juga demokrasi barat. Bentuk Negara merdeka yang berdaulat, suatu Republik Indonesia yang tersusun atas “*unitarisme*”.

### a. Nilai Vital

#### 1) Nilai Kemerdekaan (kebebasan)

BPUPKI yang berjumlah 63 orang, Panitia Sembilan, PPKI yang berjumlah 27 orang, bersidang tanpa mengenal lelah, tidak mengeluh, bersemangat baja, mulai menyelidiki hal-ikhwal yang terkait dengan kemerdekaan di “kemudian hari”. Panitia Sembilan membuat “konsensus”-*gentlement agreement* dalam rangka mengutamakan kebersamaan, menghindari perbedaan yang tidak mendasar (prinsip). Merumuskan *philosofische grondslag*, Indonesia merdeka. Negara yang mengesampingkan kepentingan golongan menomersatukan kepentingan bersama-*National Interest*.

Kemudian hari, Bung Karno menegaskan dengan istilah negara merdeka yang memiliki “trisakti” yaitu : berdaulat di bidang politik, berdikari (*self standing*) di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Kemerdekaan sebagai “Jembatan Emas”, di seberang jembatan emas bangsa ini bekerja keras mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur, yang makmur dan adil. Indonesia merdeka yang kokoh kuat, Indonesia yang gemblengan, Indonesia yang digembleng oleh api peperangan, diperjuangkan dengan pengorbanan darah, jiwa air mata, harta pastilah negara besar yang lahir dari tekad baja bangsa besar. Bukan negara yang lahir di bawah indahnya “sinar bulan purnama”, tapi di bawah palu godam penderitaan dan peperangan Asia Timur Raya.

Kemerdekaan yang digambarkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijiwai dan dalam rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, bahwa

kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Antithesa dari kemerdekaan bahwa bangsa merdeka harus tegas menolak imperialisme, anti kolonialisme, sebab imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya pastilah eksploitasi manusia oleh manusia, suatu bangsa oleh bangsa lain.

Merdeka konsekuensinya pastilah anti-imperialisme, kolonialisme. Neo kolonialisme dewasa ini tidak lagi dalam bentuk penguasaan teritorium, tapi penguasaan sikap politik, penguasaan ekonomi, penguasaan kebudayaan, penguasaan cara berpikir dan gaya hidup yang juga patut diwaspadai.

Penjajahan harus dihapuskan dari atas dunia, sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, untuk itulah bangsa Indonesia berjuang : “cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan”, untuk kembali menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

## 2) Nilai Keadilan

Keadilan merupakan masalah aktual sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Issue aktual sepanjang jaman untuk semua bangsa. *Justice* (keadilan), bahkan *absolute justice* merupakan perjuangan abadi manusia – bangsa. Sejarah kemanusiaan merupakan catatan kegagalan suatu bangsa mewujudkan keadilan, terlebih keadilan mutlak. Suatu rezim jatuh bangun, bertumbangan digantikan rezim baru dengan isu utama kebenaran dan keadilan.

Cita-cita memiliki negara Indonesia merdeka adalah cita-cita mewujudkan nilai-nilai juang yang bernama keadilan. Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Di atas puing-puing fasisme Jepang yang kejam, imperialisme, kolonialisme Belanda yang menyesengsarakan akan dibangun bangsa negara yang berkeadilan sosial. Mengeliminasi penindasan di segala aspek kehidupan bangsa, ketidakadilan lahiriah-batiniah, penindasan, kesewenang-wenangan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, kebudayaan, kesempatan kerja, kesempatan memperjuangkan kebahagiaan. Kemerdekaan merupakan peluang untuk membentuk



## Kegiatan Pembelajaran 1

manusia berkarakter kokoh, manusia yang memandang manusia “sebagai manusia”, manusia yang adil dan beradab. Mustahil mewujudkan keadilan sosial, tanpa pembentukan karakter manusia yang berjiwa adil dan menjunjung tinggi adab.

### 3) Nilai Bhinneka Tunggal Ika

Nilai-nilai pruralitas, heterogenitas, nilai kemajemukan, keberagaman bangsa Indonesia yang memang multi-ethnis, multi-bahasa, multi-sosial, multikultural, multi religius, berbeda tapi itu satu jua. Perbedaan dalam kesatuan, keberagaman bukan penyeragaman, jika tidak beragam bukan Indonesia, menjadi Indonesia berarti memahami, kemudian menerima perbedaan.

Negara kertagama karya Empu Prapanca, menggambarkan kehidupan rakyat Majapahit yang aman, tertib tenteram. Pemeluk agama Hindu dan Budha hidup damai-toleran, berdampingan dalam naungan keprabuan Majapahit, bahkan salah satu negara bawahan Majapahit yaitu Kerajaan Pasai penduduknya Islam, realitanya toleransi di bidang agama dijunjung tinggi.

Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma menulis seloka persatuan nasional “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Realitas kehidupan keagamaan di Majapahit pada waktu itu menjunjung tinggi toleransi positif beragama, antar para pemeluk agama yang berbeda.

Keanggotaan BPUPKI menunjukkan unsur yang mengatasi propinsialisme “kedaerahan”, etnosentrisme (kesukuan), chauvinisme–multi rasialisme (keturunan Tionghoa, Arab, India, peranakan Eropa). Berbeda-beda tetapi memiliki tujuan satu, tujuan yang sama Indonesia merdeka, berbeda tetapi bernaung di rumah yang sama, yaitu NKRI.

Testamen Bung Hata pada Guntur Soekarno Putra menyatakan dengan tegas bahwa PPKI sepakat mencoret tujuh perkataan di belakang sila pertama Ketuhanan, yaitu : **“dengan kewajiban**

**menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya**". Kendatipun tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam, pemimpin umat Kristen di Indonesia bagian timur keberatan, jika itu tercantum dalam Konstitusi Negara-Dasar Negara, "*stats fundamental norm*, pokok kaidah negara yang fundamental akan menimbulkan "kesan" diskriminatif bagi umat Islam-muslim dan yang non muslim. Para tokoh Islam tidak mempermasalahkannya itu, justru mereka menyatakan pencoretan tujuh kata itu sebagai "hadiah terbesar" umat Islam dalam membentuk dan menegakkan Negara Republik Indonesia. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika tokoh-tokoh Islam tidak arif dan berjiwa kenegarawanan pada Sidang PPKI Sabtu Paing 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan.

Seloka Bhinneka Tunggal Ika itu yang oleh Burung Garuda Pancasila dicengkeram erat-kokoh oleh jari kaki Garuda, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 4) Nilai Kemandirian

Hanya bangsa mandiri yang memiliki "jati diri" sebagai bangsa, bukan bangsa negara jiplakan bangsa lain (*plagiat*), bukan pula bangsa pengekor bangsa lain. Bangsa yang berdiri tegak sebagai bangsa, kemandirian di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan. Bangsa yang mandiri bangsa yang memiliki jati diri, bangsa yang berkepribadian. Bangsa yang memiliki pendirian kokoh, tidak goyah dan tidak mudah terombang-ambing oleh intervensi, penetrasi dari luar. Mampu menangkal pengaruh negatif dari luar, sejajar penuh harkat- martabat dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan antar bangsa di dunia (bilateral-regional, internasional-global).

Bung Karno pada waktu mengusulkan agar negara Indonesia yang akan dibentuk bersifat demokrasi, tapi bukan demokrasi barat yang liberal-individualistik, sosio-nasionalisme, perasaan nasionalisme dan internasionalisme atau kebangsaan dan perikemanusiaan. Perikemanusiaan atau Humanisme, tapi Humanisme yang tidak mendewakan rasio, seperti di barat. Humanisme yang memuja dan memuji Tuhan yang menciptakan rasio. Nasionalisme yang



## Kegiatan Pembelajaran 1

berperikemanusiaan seperti yang diungkapkan Ghandi : “*My Nasionalism Humanity*”. Musyawarah-mufakat itulah demokrasi “tulen” atau asli Indonesia. Politik *Economische Democratie*, yaitu demokrasi dengan “*sociale-rechtvaardigheid*”, demokrasi yang dengan dan bermuara pada kesejahteraan, itulah *Sosio Demokrasi*.

Bung Karno juga menyatakan janganlah Indonesia menjiplak *weltanschauung Nazi (national-sosialistische)* Jerman Hitler yang chauvinistik dan agresif, menghancurkan seperti yang terjadi pada PD II. Jangan mengekor San Min Chu I-(*mittsu, michuan, min sheng*) Dr. Sun Yat Sen. Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme gaya China – nasionalis, tidak juga meniru Jepang dengan filosofi “*Tennoo Koodoo Seishin*”-*Dai Nippon* dengan Teino Heika (Hirohito) sebagai Kepala Negara. Bangsa Indonesia mendasarkan diri pada jati diri, kepribadian sendiri, Pancasila.

Soepomo berpendapat tiap-tiap Negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Tiap bangsa berhubungan dengan riwayat dan memiliki corak masyarakat sendiri, karena itu politik pembangunan negara Indonesia harus sesuai dengan “struktur sosial” masyarakat Indonesia. Realita masyarakat Indonesia sekarang, sesuai dengan panggilan jaman. Indonesia tidak menerapkan teori negara individualistik, dan negara yang berdasarkan teori kelas. Indonesia harus menerapkan teori integralistik, negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan perseorangan, atau kepentingan golongan, akan tetapi menjamin kepentingan keseluruhan. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, mengurus kepentingan kehidupan bangsa seluruhnya

Mr. Moh. Yamin berpendapat pokok-pokok dasar aturan negara Indonesia harus disusun menurut “watak peradaban” Indonesia. Sebab jika meniru atau menyalin konstitusi negara lain atau negara tiruan dapat dipastikan tidak akan menjadi negara yang hebat, dalam waktu singkat akan jatuh layu sebagai bunga patah di tangkai. Cita-

cita dan peradaban bangsa Indonesia sendirilah yang akan menentukan dan memberi corak negara Indonesia. Peradaban luar cukup menjadi cermin bagi bangsa Indonesia

### 5) Nilai Kejayaan

Negara yang akan didirikan adalah negara yang berjaya. Negara yang tegak kokoh berdiri menaungi bangsa. Kuat berdiri di atas *staats fundamental norm* negara itu sendiri, Pancasila. Kedatuan Sriwijaya-Syalendra boleh tenggelam sebagai negara Indonesia maritim yang disegani tidak hanya di Asia Tenggara, keprabuan Majapahit-Brawijaya dapat “sirna ilang kerta neng bumi”. Republik Indonesia harus kokoh abadi sepanjang masa. Negara Indonesia modern, bersatu, sejahtera, mampu bersaing, berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia.

### 6) Nilai Kerokhanian

*Causa materialis* (asal mula bahan), *causa formalis* (asal mula bentuk), *causa efisien* (asal mula karya), *causa finalis* (asal mula tujuan), Pancasila hasil karya besar pendiri negara, hasil “kontemplasi” dan “konsensus” bapak-bapak bangsa – *the founding fathers* sudah dibahas pada bab sebelumnya. Nilai-nilai juang pada perumusan Pancasila tidak lain adalah upaya sadar para pendiri bangsa (BPUPKI, PPKI) dalam merenungkan dan menyepakati pada sidang BPUPKI, PPKI sampai membuahakan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya tercantum Pancasila sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara atau asas kerokhanian negara dan sebagai ideologi (Pancasila).

Pancasila memiliki nilai-nilai material, nilai vital dan nilai kerokhanian. Hakekat sila-sila Pancasila mengandung kebersamaan hakiki, kebaikan moral, keindahan dan religiusitas hidup dan kehidupan sesuai dengan ketinggian martabat-harkat dan kodrat kemanusiaan. Manusia yang sadar diri harus selalu memanusiaikan diri, mampu menjadi manusia, sadar diri sebagai bangsa dan mampu menjadi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai “tulen”



## Kegiatan Pembelajaran 1

asli Indonesia, terdapat dalam realita berbagai lapis budaya sejak pra Hindu, Syiwa-Budha, Islam, modernisasi. Kristalisasi sistem nilai budaya (cipta, rasa, karsa, karya) yang menjadi pandangan hidup. Pandangan hidup sebagai kristalisasi sosio-budaya bangsa itulah yang kemudian disepakati menjadi dasar negara. Sebagai dasar negara asas kerokhanian negara yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai perundang-undangan negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa, ideologi negara, ini berarti segenap anak bangsa secara imperatif harus menghayati nilai-nilai Pancasila. Menjadikan cara berpikir, cara bersikap, cara berucap, cara bertindak dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila berciri dinamis, menerima berbagai unsur budaya lokal (*local genius*) dan mondial (globalisasi) sepanjang tidak menyimpang, terlebih bertentangan dengan makna hakiki sila-sila dalam Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung aspek realitas, aspek idealitas, aspek fleksibilitas (Alfian), sebagai ideologi, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

### **b. Pancasila Sebagai Sistem Pemikiran**

Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat diceraiberaikan, Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu. Jika sila-sila itu dilepaskan dari satu kesatuan pemikiran maknanya bisa berbeda. Berbeda makna akan menyesatkan pada saat aplikasi penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berbagai pihak boleh berbeda pandangan tentang sistem, tapi paling tidak disepakati suatu sistem.

Memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Merupakan satu kesatuan, keutuhan atau kebulatan.
- 2) Merupakan suatu yang “teratur” di dalam keteraturannya tidak terdapat kontradiksi (paradoxal).
- 3) Terdapat komponen, bagian, sub sistem, unsur atau elemen sistem.
- 4) Terjadi atau ada kerjasama antar bagian, ada interaksi fungsional antar bagian, interaksi itu bermuara pada tujuan.

- 5) Tujuan akhir yang akan diwujudkan.
- 6) Tujuan merupakan bagian sistem, bagian terpenting, dan sekaligus merupakan muara akhir yang akan diwujudkan.

Pancasila yang terdiri dari lima sila hanya milik bangsa Indonesia, jika sila-sila dalam Pancasila itu dilepas-pisahkan mungkin bahkan kita yakin semua bangsa di muka bumi ini, satu atau dua mereka memilikinya. Negara teokrasi pasti memiliki dasar negara agama, kemanusiaan dalam arti humanisme tidak hanya menjadi milik bangsa Indonesia. Nasionalisme bukan monopoli bangsa Indonesia saja, demokrasi bukan hanya menjadi sistem penyelenggaraan negara milik bangsa Indonesia, demikian pula yang mendambakan masyarakat adil makmur, keadilan sosial, sosialisme tidak hanya bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai satu kebulatan, berKetuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila yang satu, utuh, dan bulat.

Sila-sila dalam Pancasila menunjuk realita-logis, urutan sila dari sila pertama sampai dengan sila kelima, urutan yang teratur, tidak mengandung kontradiksi, tidak ada paradoxal sila satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan merupakan "*causa prima*", penyebab pertama yang adanya tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Selain Tuhan yang Maha Esa, tunduk pada hukum kausalitas. Tuhan sang Maha Pencipta, selain Tuhan, makhluk diciptakan oleh-Nya. Tuhan kemudian menciptakan semua makhluk, jagad raya seisinya. Makhluk paling sempurna, paling tinggi derajatnya adalah manusia. Manusia layak disebut sebagai manusia jika padanya melekat sifat luhur kemanusiaan, adil dan beradab. Ketinggian derajat manusia diukur dari adabnya, karena itulah manusia-kemanusiaan menjadi sila kedua. Manusia adalah wakil Illahi di dunia, khalifah di bumi.yang diciptakan Tuhan itu kemudian berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, menyebar, memenuhi seluruh bumi. Salah satu kelompok bangsa itu bernama



## Kegiatan Pembelajaran 1

bangsa Indonesia, manusia yang bersatu memenuhi jamrud khatulistiwa, karena itu persatuan Indonesia menjadi sila ketiga. *Nation* (bangsa) Indonesia sebagai bagian dari umat manusia ciptaan Tuhan seru sekalian alam semesta, nasioanalisme Indonesia karena itu tidak mungkin chauvinistik, merasa “superior” memandang bangsa lain “imperial”. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi karena manusia Indonesia sederajat dengan manusia yang lain di muka bumi ini. Perbedaan ras, etnis, warna kulit, warna rambut, bentuk muka, tinggi badan tidak akan menghilangkan substansi diri sebagai sesama manusia.

Pancasila merupakan satu kesatuan yang teratur, memiliki bagian-bagian dari sila satu sampai sila kelima, merupakan suatu sistem. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan “*moral basic*”, sedangkan sila kedua sampai sila kelima merupakan “*social basic*”, karena itu dalam lambang Garuda Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan “bintang emas” dengan latar belakang hitam. Sila pertama merupakan bintang penerang (*light star*), menjadi pedoman manusia di tengah samudera kegelapan. Kemanapun pergi dengan berpedoman pada bintang. Hanya Tuhan tempat mencari pencerahan, penerang ketika manusia sebagai warga mengalami kegelapan. Manusia (sila kedua), bangsa (sila ketiga), akal-budi hikmah kebijaksanaan merupakan pelaku (subjek) praksis dan cara rasional penuh wisdom (sila keempat) dalam mewujudkan kebahagiaan hidup sebagai bangsa yaitu keadilan sosial (*sila kelima*).

Ada interaksi fungsional antar komponen, kerjasama antar bagian dalam upaya mengejar tujuan (cita-cita) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai muara sistem. Notonegoro dalam bukunya “Pancasila secara Ilmiah Populer” menyatakan bahwa Pancasila tersusun secara hierarkhis-piramidal. Piramidal dari kesatuan sila-sila Pancasila adalah bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menjadi dasar sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan menjadi dasar sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila yang didasari merupakan penjelmaan sila yang mendahuluinya. Dengan demikian sila yang pertama menjadi dasar “umum” dasar terbesar, sila kelima merupakan yang paling khusus lingkungannya paling terbatas. Karena itu sila-sila Pancasila itu sebagai kesatuan berbentuk bangunan bertingkat. Semakin tinggi tingkatannya semakin terbatas, kurang luas. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis, pucuk piramidalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi puncak piramidal, tujuan dari empat sila yang lainnya.

Rumusan Pancasila yang bentuk dan susunannya hierarkhis piramidal adalah sebagai berikut:

- 1) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



## Kegiatan Pembelajaran 1

- 5) Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Mencermati analisa di atas nampak bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerokhanian, keyakinan tentang kebenaran Pancasila (logika cipta, rasio). Kebaikan Pancasila (etika, moral, kehendak, karsa), keindahan Pancasila (estetika, seni, keindahan, rasa) dan keyakinan *religiusitas*. Artinya= aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Religiusitas seringkali di identikkan dengan keberagaman, seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan dan pelaksanaan ibadah serta seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. (Mangunwijaya, 1981)

### 4. Peneladanan Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Pancasila merupakan karya besar para tokoh-tokoh besar pendiri negara. Karya besar yang “digali” dari ibu Pertiwi. Hasil “renungan” mendalam dari dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Konsensus bersama (konsensus nasional), janji kstaria tokoh nasional, komitmen untuk menjadi “*belief system*”, *way of life* bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai luhur Pancasila pastilah lahir dari pemilikan sikap ucap dan tindakan luhur para bapak bangsa. Mustahil pikiran besar lahir dari manusia yang tidak memiliki konsepsi besar, jiwa besar, kemampuan membaca tanda-tanda jaman dalam memperjuangkan masa depan menjadi lebih baik. Namun tetap kuat berakar pada jati diri kepribadian bangsa sendiri sosio-budaya sendiri. Karena itulah generasi penerus perlu meneladani menjadikannya “panutan” dalam bertutur, bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Soenoto dalam bukunya “Mengenal Filsafat Pancasila-Etika Pancasila” (1982:72-73) menyatakan bahwa menanamkan moral Pancasila dalam

keluarga tidak sama dengan di sekolah. Di dalam keluarga lebih dititik beratkan pada pengamalan berupa contoh-contoh konkrit.

Pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa wajib ditunjukkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya:

- a. Memberi bantuan kepada fakir miskin, orang-orang lanjut usia, panti asuhan, korban bencana alam.
- b. Menunjukkan dalam arti berbuat kasih sayang pada sesama manusia, sesama anggota keluarga.
- c. Tidak bertindak kejam pada makhluk hidup, binatang, menembak burung semena-mena. Memelihara hewan dan memperlakukannya dengan baik-manusiawi.

Pengamalan persatuan Indonesia-moral persatuan dapat dilakukan dengan contoh perbuatan nyata sebagai berikut:

- a. Hidup rukun di dalam keluarga antara ibu-ayah, orang tua-anak, adik-kakak, kakek-nenek, cucu.
- b. Hidup rukun dengan tetangga, tidak menjadi tetangga yang “berisik” *trouble maker* lingkungan. Kehidupan rukun dengan masyarakat di mana kita hidup dan berdomisili

Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dapat memberikan contoh perbuatan nyata sebagai berikut:

- a. Tidak bersikap otoriter, diktatorik dan mau atau asal menang sendiri.
- b. Memberi kesempatan anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat.
- c. Menjadi pembicara yang santun” dan pendengar yang sabar.
- d. Tidak memotong pembicaraan orang yang sedang mengemukakan pendapat.
- e. Memilih kata-kata yang tidak menyakitkan dan menyinggung perasaan orang lain.
- f. Berlaku bijaksana (hikmat, wisdom), mendengar dan mau menerima pendapat anggota keluarga.
  - (1) Menghargai perbedaan pendapat dan menemukan kesepakatan dalam sharing dikeluarga.



## Kegiatan Pembelajaran 1

(2) Tenggang rasa

(3) Gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan di keluarga.

Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melaksanakan tindakan nyata dengan contoh sebagai berikut:

- 1) Memperlakukan sama anggota keluarga tidak pilih kasih.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan masing-masing.
- 3) Tidak memberi beban berlebihan pada anggota keluarga.
- 4) Tidak menuntut hak di luar kemampuan.
- 5) Berlaku “paramarta” terhadap sesama anggota masyarakat tetangga terdekat.

Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan berlangsung dalam “tripusat” pendidikan. Pendidikan di keluarga (informal), pendidikan di sekolah (formal), pendidikan di masyarakat (non Formal). Ketiganya saling terkait, berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Jika pendidikan tidak mendukung dari salah satu bagian maka hasil pendidikan tidak dapat optimal, contoh

- 1) Pendidikan formal “baik” pendidikan di keluarga tidak mendukung pendidikan masyarakat “baik” maka hasilnya tidak akan optimal
- 2) Pendidikan di keluarga “baik” pendidikan di sekolah mendukung, pendidikan di masyarakat tidak mendukung maka hasil pendidikan tidak optimal
- 3) Pendidikan di keluarga “baik”, pendidikan di masyarakat juga baik, pendidikan di sekolah tidak mendukung maka hasil pendidikan tidak optimal

Salah satu bagian dari tripusat tidak mendukung, hasilnya tidak akan optimal. Apalagi jika dua bagian tidak mendukung. Lebih-lebih lagi jika ketiga-tiganya tidak berjalan baik (pesan dan cara) maka secara hipotetik hasilnya pasti tidak akan optimal.

## 5. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya

dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara.

Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara (dalam kesatuan organis) merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara (dalam kesatuan organis) merupakan tujuan wawasan nusantara.

Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan berhubungan dengan segi ketertiban dunia.

Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang (Alhaj, 2000:3).

Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti di atur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan RI lainnya. Karena itulah melalui Ketetapan No. III/MPR/2000 dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.



## Kegiatan Pembelajaran 1

Tata urutan dan hierarkhis peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/PERPU,
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Keputusan Presiden
- 5) Peraturan Daerah
- 6) Peraturan daerah lainnya.

Secara singkat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinia 4 antara lain menegaskan:

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia
- 2) Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.

4) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai.

b. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan<sup>2</sup>, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang<sup>2</sup>), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Semua peraturan yang berlaku di Indonesia seharusnya bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum / ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat impératif (mengikat) bagi berikut ini:

- Penyelenggara negara.
- Lembaga kenegaraan.
- Lembaga kemasyarakatan.
- Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan



## Kegiatan Pembelajaran 1

arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi Negara. Dalam pengertiannya ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik tertulis atau UUD maupun tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran

Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila.

Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul ditengah air khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan tersebut akan



berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekuensi baru dari segi hukum di Indonesia.

Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalahan baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan hukum.

## 6. Pancasila sebagai ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara lebih tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya ... . membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ... . berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat



## Kegiatan Pembelajaran 1

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

### a. Pengertian dan fungsi ideologi.

#### 1) Pengertian Ideologi

Menurut istilah “ideologi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *eidos* dan *logos; logia*. *Eidos* berarti melihat, memandang, pikiran, idea atau cita-cita, sedangkan *logos, logia* berarti ilmu, pengertian. Jadi ideologi dapat diartikan seperangkat cita-cita (ide-ide) yang merupakan keyakinan, tersusun secara sistematis, disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut (Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1986:11). Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham (Kaelan, 2003).

Menurut Ensiklopedia Indonesia disebutkan ideologi berarti kompleks idea yang merupakan suatu system tanggapan hidup terutama yang berhubungan dengan suatu gerakan sosial atau politik. WJS Poerwadarminta mengatakan bahwa ideologi adalah asas pendapat (keyakinan) yang dipakai (dicita-citakan) untuk dasar pemerintahan negara. Sedangkan menurut Soerjanto dalam bukunya Filsafat Pancasila menyatakan bahwa ideologi adalah keseluruhan system idea yang secara normative memberikan persepsi, landasan dan pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupan dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan (Soejanto, 1989:8).

Dalam Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah system dasar seseorang/sekelompok masyarakat tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Kalau ideologi dimaksud diterapkan pada negara, maka artinya ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia

dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Jadi termasuk kehidupan bernegara (Heuken, 1991:122)

Istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan di Perancis, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, yang menggunakan istilah ini untuk mengembangkan pemikirannya di bidang sosial politik maupun ekonomi.

Pengertian ideologi secara umum dimaknai sebagai sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, cita-cita yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan.

Dengan demikian makna dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri: (a) mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, (b) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Kaelan, 2003).

Ideologi merupakan seperangkat ide asasi, bukan sembarangan ide atau pengertian melainkan ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar, yang menyangkut hakekat manusia. Ideologi merupakan prinsip fundamental sebagai prinsip dinamika, sebab menjadi pedoman dan cita-cita hidup, terutama dalam perjuangan.

## 2) Fungsi ideologi

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia,



## Kegiatan Pembelajaran 1

masyarakat dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, (f) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif), (g) sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya, (h) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu ataupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak.

Memang dalam kenyataannya, manusia dalam hidup bernegara yang modern ini tidak akan terlepas dari suatu paham (*isme*) yang akan dijadikan landasan dalam system kenegaraan dimana mereka hidup bernegara (berideologi). Paham (*isme*) itu disebut ideologi yang akan menjadi motivasi atau dorongan untuk perjuangan dan kebanggaan nasional dalam rangka mencapai tujuan hidup berbangsa itu sendiri.

### b. Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka.

Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, terlebih dahulu memahami pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup.

Ideologi selalu berkaitan dengan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam uraian mengenai ideologi yang dikemukakan oleh Ward. Ia menyimpulkan bahwa dewasa ini ada empat ideologi yang sangat berpengaruh, yaitu Liberalisme, Sosialisme, Komunisme dan Facisme (Ward, 1986). Diantara ideologi-ideologi itu selalu ada variasi dalam rangka penempatannya pada kehidupan yang nyata.

Oleh karena itu ideologi itu dicetuskan dalam suatu saat dan kemudian diterapkan pada kehidupan nyata dalam sosio-budaya di antara negara-negara yang berkepentingan, maka dapat terjadi bahwa ideologi itu akan ditafsirkan oleh pengikut ideologi itu. Hal ini berkenaan dengan

kenyataan perkembangan masyarakat yang memerlukan penguraian antara ide dan kenyataan. Ada kemungkinan kalau ideologi itu tidak ditafsirkan atau disesuaikan dengan keadaan yang baru, maka ideologi itu akan steril. Akibatnya tidak memuaskan banyak pihak, sehingga diganti oleh ideologi lainnya (Departemen Dalam Negeri, 1978:14). Dengan adanya perbedaan penafsiran kemudian dapat terjadi perpecahan diantara pengikut ideologi itu. Di satu pihak ada yang menyebut dirinya sebagai pendukung ideologi semula dan pihak lain pendukung reformasi. Penafsiran terhadap ideologi tergantung pada kenyataan kekuatan politik yang ada. Bila penafsiran yang satu mempunyai pengikut yang kuat, maka tafsirannya itulah yang dianggap enar dan yang lainnya salah. Tinjauan histories menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ideologi kemunisme antara Lenin dan Berenstein (1919), antara Stalin dan Trozky (1940). Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan pertentangan dan pertumpahan darah. Demikian pula dengan penafsiran yang dilakukan oleh Gorbachev (1990) yang kemudian mengakibatkan ambruknya Uni Soviet (akhir 1991).

Pengertian **ideologi terbuka** dan tertutup berkaitan erat dengan penafsiran para pendukung ideologi itu sendiri. Bila pendukung ideologi itu menafsirkan, bahwa ideologinya dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka ideologi itu dapat disebut **ideologi terbuka**. Jelas disini terlihat, bahwa ideologi sebagai suatu pemikiran dan penafsiran yang diadakan sesuai dengan sosio budaya masyarakat adalah demi untuk kelanjutan ideologi itu sendiri.

Sebaliknya **Ideologi tertutup** mempunyai pengertian, bahwa pendukung ideologi itu merasa sudah punya seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh pendukung ideologi itu hanyalah melaksanakan secara dogmatic (Moerdiono, 1989:399-400).

Berdasarkan penafsiran ini, maka Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan tidak menutup diri



## Kegiatan Pembelajaran 1

terhadap nilai dan pemikiran yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar (Soerjanto, 1989:12).

### c. Acuan Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945, Romawi VI antara lain sebagai berikut:

“... maka telah cukup kalau UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.” (UUD dan Amandemennya, 2000:19)

Penjelasan di atas senantiasa perlu dikaitkan dengan penjelasan di bawah ini:

“Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah...”. (UUD 45 dan Amandemennya, 2000:19)

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin “supel” (elastis) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya system UUD jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (*verouderd*). Yang sangat penting dalam pemerintah dan dalam hal hidupnya ialah semangat,

semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, UUD tadi tidak ada artinya dalam praktek.

Sebaliknya, meskipun UUD itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat UUD 1945, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-Undang. (Panyarikan, dkk, 1993/1994:18).

Ketentuan-ketentuan di atas tersebut merupakan acuan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan di atas itu dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembukaan UUD 1945 membedakan antara hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dengan undang-undang yang memuat aturan penyelenggaraannya;
- 2) Hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam UUD akan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat dan negara Indonesia;

Pembukaan UUD menegaskan, bahwa yang paling penting dalam hal jalannya negara adalah **semangat** (kekeluargaan) dari penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan, sebab semangat itu hidup atau dinamis. Disini terlihat, bahwa factor manusia dengan semangat yang baik sangat menentukan jalannya negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain acuan dasar tersebut, yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka termuat pada TAP No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Bab IV Arahan Kebijakan point 2 dinyatakan: " Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat



## Kegiatan Pembelajaran 1

sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan”.

### d. Implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa/nasional bersifat terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka nampaknya telah diterima oleh masyarakat kita (Soerjanto, dalam Moerdiono, 1992:410). Hal ini nampak dalam kehidupan perekonomian kita dewasa ini. Deregulasi dan debirokratisasi, sebagaimana dinyatakan Moerdiono, adalah penyesuaian nilai instrumental Pancasila, dan tetap berpegang pada asas kekeluargaan. (dalam Panyarikan, dkk. 1993/1994:15).

Implementasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan terhadap fungsi Pancasila dengan tinjauan histories, cultural dan politis (Panyarikan, dkk, 1993/1994:15).

Tinjauan histories, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandiri (Soerjanto, 1989:5).

Tinjauan cultural, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakekatnya bertumpu pada budaya bangsa yang terebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi paangan hidup bangsabagi kelestarian hidupnya dalam masa yang akan datang.

Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945.

Pasal 18 UUD 1945 itu dinyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.(UUD 1945 hasil amandemen)

Nilai-nilai ini sebagian diangkat dari khasanah budaya bangsa di daerah-daerah melalui pasal 18 UUD 1945; dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 dengan mengakulturasi kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing (Moerdiono, 1992:411)

Melalui tinjauan politis, Pancasila merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang serba berbhinneka, suatu konsensus bangsa Indonesia yang mampu menjamin persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, suatu kesepakatan konseptual dengan visi dan orientasi yang luas dan mendalam. Berdasarkan tinjauan politis ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu keharusan. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nilai fundamental Pancasila. Wujudnya dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “ *Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*”.

Negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan system desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Disamping pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila seperti telah disebutkan di atas, maka pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila suatu keharusan pula. Hal ini disebabkan pembentukan UUD membatasi



## Kegiatan Pembelajaran 1

nilai-nilai fundamental Pancasila itu pada “aturan-aturan pokok” saja. Sebagaimana dinyatakan Moerdiono, pendalaman nilai-nilai instrumental Pancasila antara lain dalam bentuk **wawasan, doktrin, kebijakan, strategi** (Moerdiono, 1992:411-413).

**Wawasan** disini dimaksudkan, bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila harus dipandang dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan demikian sifatnya adalah subyektif.

**Doktrin** disini dimaksudkan bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila didalami melalui doktrin, yakni suatu pedoman untuk bertindak, ajaran yang sifatnya kaku (Panyarikan, dkk, 1993/1994:16).

Sedangkan **kebijakan** disini dimaksudkan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang (pemimpin pemerintah/penyelenggara negara) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, berdasarkan wawasan atau doktrin yang telah ditetapkan. Strategi disini dimaksudkan adalah suatu rencana induk untuk melaksanakan suatu kebijakan, dengan mempergunakan sumber daya yang tersedia. Contoh Strategi yang akan dicapai adalah swasembada pangan, melalui program pembukaan lahan gambut menjadi daerah penghasil padi, program jagungisasi di Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. dsb.

### 7. Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Paradigma Pembangunan.

Untuk memujudkan cita-cita dari sekelompok masyarakat bangsa (ideologi) dibentuklah suatu kekuatan bersama dalam suatu organisasi (negara) atau kekuatan sosial politik. Mereka terikat oleh suatu keyakinan bahwa ideologi yang mereka anut dianggap benar dan baik dalam rangka mencapai tujuan lahiriah dan batiniah. Ideologi bangsa Indonesia yang diyakini akan membawa kebaikan adalah Pancasila.

Oleh karena itu ideologi Pancasila yang diyakini tersebut terus diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa Indonesia, karena ideologi yang mereka anut dianggap membawa kebenaran dan nilai-nilai luhur. Nilai keyakinan yang terkandung didalam ajaran ideologi itu disebut

“**nilai dasar**” (*basic value, weltanschauung; groundnorm*) dan nilai-nilai itulah yang menjadi asas perjuangan, bahkan mampu memberi motivasi kuat; mampu menggugah dan memberi semangat untuk bangkit dan membina diri. Tidak jarang mampu mendobrak dan menghancurkan setiap rintangan yang mereka hadapi dalam upaya memperjuangkan ideologi yang mereka anut.

Moerdiono, (1992) mengemukakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai. Beliau membedakan **nilai fundamental Pancasila (nilai dasar, groundnorm)** dan **nilai instrumental Pancasila** serta **nilai praksis**. Nilai fundamental Pancasila merupakan **nilai dasar** Pancasila yang abadi, yang tidak berubah dan tidak boleh diubah. Sedangkan nilai instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai fundamental yang dijabarkannya. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif, dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batyas-batas yang dimungkinkan oleh nilai-nilai fundamental itu. Penjabaran itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamenal yang dijabarkannya (Moerdiono, 1992:408).

**Nilai fundamental Pancasila** dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila sesuai dengan Penjelasan Otentik mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) “*Negara*” begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian *negara persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi paham *golongan*, mengatasi paham *perseorangan*. **Negara**, menurut “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
- 2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.



## Kegiatan Pembelajaran 1

- 3) Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah **negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan**. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas permusyawaratan/perwakilan.
- 4) Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyatakan, bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok pikiran merupakan suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung **nilai-nilai fundamental Pancasila** mempunyai kedudukan tetap, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Hal ini lebih lanjut dikatakan oleh Notonagoro, sebagai berikut:

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar, karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara” (Notonagoro, 1967:13).

Konsensus politik bangsa Indonesia tersebut, hingga saat ini ingin tetap dipertahankan walaupun di masa euforia reformasi, seperti kesejahteraan

tidak akan merubah terhadap pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia karena memang mengandung pokok-pokok pikiran dalam mengatur negara dan pemerintahan.

Nilai-nilai fundamental (dasar) yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang terkandung di dalam pokok-pokok pikirannya maupun di dalam alinea-alineanya, memerlukan penjabaran lebih lanjut dari nilai fundamental Pancasila, sekaligus sebagai arahan untuk kehidupan nyata dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif dan memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar/fundamental Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dinamakan **nilai-nilai instrumental**. nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, yang penjabarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman, seperti penetapan GBHN, UU, struktur kelembagaan, dan sebagainya;

Dari nilai instrumental Pancasila diimplementasikan dalam realitas kehidupan sehari-hari setiap warga negara, penyelenggara negara, kelompok masyarakat, organisasi itulah dinamakan **nilai praksis**. nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi). (Kaelan, 2003).



## Kegiatan Pembelajaran 1

Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi idealistis, normatif dan realistik. Dimensi idealistis dalam ideologi Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila. Kadar dan idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicta-citakan.

Dimensi normatif dalam ideologi Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia.

Dimensi realistik, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat *utopis* yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat *realistis* artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Secara sistem ketatanegaraan RI, nilai-nilai tersebut menjadi sumber motivasi dan landasan pembangunan nasional. Oleh itu pada hakekatnya, pembangunan nasional merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila.

### 8. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi.

Tahun 1966 telah tercapai konsensus nasional, bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila ditempatkan sebagai falsafah, cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu

setiap ketentuan atau peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi (UUD 1945) dapat dikaji melalui pembukaan dan pasal-pasanya. Di dalam Pembukaan yang memuat nilai-nilai Pancasila dan mengandung pokok-pokok pikiran penjabarannya ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

Misalnya nilai dasar Ketuhanan pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal UUD/Konstitusi, seperti pasal 28E, 29 UUD 1945. Secara praktis diatur pelaksanaannya dalam UU dan Peraturan Pemerintahan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait kebebasan beragama dan menganut kepercayaan.

Misalnya nilai dasar persatuan, dijabarkan lebih dalam konstitusi pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1); pasal 18 B ayat (2); pasal 25A; pasal 30 ayat (1); (2) (3) (4) (5); pasal 32 ayat (1); (2). pasal 35, pasal 36, pasal 36A; pasal 36B; pasal 37 ayat (5) Dari aturan pokok tersebut, dijabarkan ke dalam UU/Perpu, PP, Keppres, dan sebagainya.

Disimpulkan bahwa hubungan dasar negara dengan konstitusi merupakan hubungan normatif - hierarkhis dan sistematis, dimana isi konstitusi merupakan jabaran lebih lanjut dari dasar negara Pancasila.

a. Sikap Positif terhadap Dasar Negara dan Konstitusi negara

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila pernah berkali-kali memperoleh ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri bersumber dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta berbagai upaya yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar dan ideologi yang lain. Adapun ancaman dari luar negeri berupa pengaruh kehidupan serta ideologi bangsa lain. Ancaman terhadap Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ancaman fisik dan ancaman nonfisik.



## Kegiatan Pembelajaran 1

Ancaman terhadap Pancasila yang bersifat nonfisik adalah pengaruh dari paham atau ideologi komunisme dan kapitalisme. Kedua paham ini ajarannya banyak sekali bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila

- **Pertama**, Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kuasa prima. Oleh karena itu sebagai umat yang berTuhan, adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- **Kedua**, ialah penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia kita adalah sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil dan Beradab berarti bahwa adil adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban.
- **Ketiga**, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Didalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita tempatkan diatas kepentingan sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada pengorbanan untuk kepentingan pribadi. Ini tidak berarti kehidupan pribadi itu diingkari. Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Namun demikian tidak berarti bahwa demi kepentingan pribadi itu kepentingan bangsa dikorbankan.
- **Keempat**, ialah bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila



keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi kita mementingkan akan musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas

Sila-sila Pancasila merupakan satu organis. Maksudnya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan majemuk tunggal yang merupakan satu kesatuan dan keutuhan. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas dari sila-sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila telah menyatu dalam kepribadian dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila di terima oleh seluruh masyarakat sebagai dasar, falsafah, ideologi bangsa dan Negara.

Sedemikian pentingnya peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu kiranya semua pihak memposisikan Pancasila sebagai nilai yang ter internalisasi dalam diri setiap orang yang merasa sebagai bangsa Indonesia. Baik yang ada di wilayah negara Indonesia maupun yang jauh di luar wilayah negara Indonesia. Penting juga memiliki sikap positif terhadap eksistensi Pancasila dalam implementasinya sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Adapun sikap positif terhadap Pancasila di harapkan tercermin dalam seluruh segi kehidupan

## 9. Implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia

Wujud dari implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dapat dicermati dari berbagai bentuk aturan perundangan dalam **bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hankam, pendidikan**, dan sebagainya.

### 1) Bidang Politik

- a) Kebebasan berserikat dan berkumpul: perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan dinamisnya kebijakan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, kita pernah menggunakan sistem multi partai,



## Kegiatan Pembelajaran 1

kemudian hanya dua partai, dan sekarang menjadi multi partai kembali yang dilakukan secara selektif.

- b) Pemerintahan Daerah: mulai dari kemandirian, terkontrol, keseragaman, dan sekarang kembali menjadi mandiri kembali, baik itu dalam penentuan kepala daerah, struktur organisasi, hingga penentuan APBD.
- c) Kedudukan Presiden: semula dari ketentuan yang ada memiliki kekuasaan yang sangat besar, sekarang harus dibagi dengan DPR.
- d) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat: dari semula yang hanya sebagai “tukang stempel” sekarang harus kreatif dan kaya inisiatif.
- e) Konstitusi: dari yang semula tidak bisa dikutak-kutik, sekarang menjadi relatif mudah, sehingga dalam kurun waktu tidak lebih dari lima tahun sudah mengalami empat (4) kali perubahan (amandemen). Bahkan daerah memiliki kewenangan yang diakui keberadaannya untuk menentukan aturan perundangan yang sifatnya lokal.

### 2) Bidang Ekonomi

- a) Bidang ekonomi muncul konsep ekonomi kerakyatan
- b) Ekonomi terjadi perubahan yang sangat besar terutama dalam hal keterlibatan negara, dari semula sangat dominan sekarang menjadi tidak melalui kebijakan privatisasi dan sejenisnya.
- c) Orientasi pembangunan ekonomi, dari semula banyak berkonsentrasi pada pengembangan teknologi tinggi, sekarang dikembangkan menjadi pengembangan ekonomi kerakyatan

### 3) Bidang Sosial-Budaya

- a) Munculnya keterbukaan dalam penerbitan media massa, baik yang cetak maupun elektronik
- b) Munculnya kebijakan pengakuan akan hak milik dan hak cipta.
- c) Terjadinya suasana dan nuansa kebebasan dalam menyampaikan aspirasi kepada publik

- d) Berkurangnya keterlibatan militer dalam praktek pemerintahan
- e) Munculnya konsep otonomi kampus, otonomi pendidikan, otonomi sekolah, MBS dan sejenisnya, padahal sebelumnya sangat sentralistis dan seragam.
- f) Munculnya kebijakan netralitas PNS dalam politik, dari yang semula selalu berstatus sebagai alatnya partai pemenang pemilu.

4) *Bidang Pertanahan dan Kemanan.*

- a) Meningkatkan pertahanan negara dengan menjaga keutuhan NKRI melalui penempatan prajurit dibatas-batas negara.
- b) Meningkatkan pengawasan di laut dari eksploitasi ilegal yang dilakukan oleh penduduk maupun warga asing,
- c) Mendirikan batas wilayah NKRI secara permanen di darat dan laut serta memberdayakan penduduk di perbatasan.
- d) Penempatan prajurit di pulau-pulau luar wilayah NKRI.
- e) Meningkatkan kewaspadaan dari ancaman teroris dan ancaman perpecahan.

5) *Bidang Pendidikan.*

- a) Meningkatkan mutu dan biaya pendidikan.
- b) Sekolah gratis
- c) Penstandaran tenaga pendidik dan kependidikan melalui program sertifikasi.
- d) Meningkatkan kualitas lulusan sebagai tenaga trampil yang berkualitas.
- e) Program wajib belajar.

## 10. **Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam



## Kegiatan Pembelajaran 1

hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Hal ini dikarenakan Pancasila diyakini kebenarannya dan dapat membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia apabila implementasi nilai diwujudkan dalam tata kenegaraan dan tata laku kehidupan sehari-hari. Disamping itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama apapun. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesatuan, keadilan, dan sebagainya.

Memahami Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa dapat di implementasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara antara lain:

- 1) Mengetahui keteladanan proklamator
- 2) Mengetahui sila-sila Pancasila
- 3) Menampilkan tutur kata, sikap, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar.
- 4) Mengetahui baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan
- 5) Mengetahui keteladanan tokoh-tokoh BPUPKI
- 6) Menampilkan tutur kata, perilaku, dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan keluarga.
- 7) Mengetahui baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar.
- 8) Mengetahui keteladanan tokoh-tokoh PPKI dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- 9) Membiasakan diri untuk bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar.

### **11. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa**

Pancasila merupakan lima prinsip kebijaksanaan hidup (*wisdom*, kearifan, *belief sistem*) dalam berbangsa bernegara. Pancasila merupakan roh – semangat jaman, semangat, tekad bangsa Indonesia menjawab masalah, tantangan jaman. Sekaligus juga merupakan cita-cita bangsa, cita-cita yang

akan diperjuangkan (nilai-juang) untuk menjadi kenyataan (*das Sein*). Cita-cita (*das Sollen*) yang harus membumi menjadi perilaku hidup sehari-hari (*Pancasila in action*).

Causa materialis Pancasila sesuatu yang tidak asing bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang kokoh "*inherent*" pada cara hidup dan kehidupan (sosio budaya) bangsa Indonesia dari waktu ke waktu, dari jaman ke jaman. Di dalam sosio budaya bangsa Indonesia itulah eksis, tumbuh, berkembang "keyakinan" (*belief system*) tentang apa yang baik dan tidak baik menurut bangsa Indonesia. Apa yang diyakini benar dan tidak benar oleh bangsa Indonesia. Apa yang dianggap indah dan tidak indah menurut bangsa Indonesia. Apa yang diyakini religius dan tidak religius menurut bangsa Indonesia. Kristalisasi dari keyakinan tentang baik dan tidak baik (karsa, etika, will), benar dan tidak benar (cipta, logika, rasio), indah dan tidak indah (rasa, estetika, seni dan keindahan), religius dan tidak religius itulah filsafat. Jika, filsafat itu sudah "*inherent*", menjadi cara hidup (*way of life*), pedoman hidup, acuan hidup, pandangan hidup, jadilah filsafat hidup. Apabila filsafat hidup itu diangkat menjadi dasar negara jadilah dia ideologi bangsa (pandangan hidup bangsa), dasar negara (ideologi negara). Soepomo menyebutkan Negara Indonesia yang mau didirikan mestilah Negara yang tidak menjiplak (tiruan) Negara-bangsa lain. Negara yang memiliki akar kuat – adat istiadat bangsa itu sendiri, Negara Integralistik. Sebab setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri, memiliki cara spesifik dalam menjawab masalah – tantangan untuk tetap eksis sebagai bangsa. Bangsa Indonesia sejak jaman dulu mengembangkan kebudayaan sebagai wujud "jati diri" sebuah bangsa. Kemudian datanglah berbondong-bondong bangsa asing ke Indonesia, tidak hadir secara fisik saja, tapi juga membawa nilai-nilai sosio-budayanya.

Berturut-turut bangsa dan budaya asing itu ialah Hindu-syiwa, Budha, Islam dan kemudian modernitas, kemudian globalisasi datang ke Indonesia membawa sosio-budayanya. Bangsa Indonesia memiliki cara spesifik (khusus-khas) dalam menerima, mengolah filsafat dari luar menjadi milik bangsa Indonesia dengan bertumpu kokoh pada filsafat hidup bangsa Indonesia. Proses menerima dan mengolah dengan metode "*ekletik-*



## Kegiatan Pembelajaran 1

*inkorporasi*”, termasuk konsep-konsep modern seperti humanisme, demokrasi, sosialisme. Nilai-nilai Pancasila yang secara definitif dirumuskan dan disahkan sejak tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, 18 Agustus 1945.

Notonegoro menegaskan Pancasila digali dari : tri prakara”. Sejak neneng moyang pra Hindu sudah merupakan : asas kemasyarakatan, asas kenegaraan, dan asas religiusitas bangsa Indonesia.

Bung Karno menegaskan bahwa beliau tidak “menciptakan” Pancasila, tapi menggalnya dari kandungan ibu pertiwi. Sudah sejak tahun 1918, melakukan perenungan dan memperjuangkannya. Tri sila : sosio-nasionalisme, sosio demokrasi, dan Ketuhanan yang Maha Esa menjadi ideologi PNI yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Pancasila, tri sila, eka sila yang pada waktu pidato 1 Juni 1945 diusulkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut yang digali dari lapis-lapis sosio budaya pra Hindu, Hindu syiwa, Budha, Islam, Modernitas – globalisasi ditemukan lima mutiara (butir-butir) yang berupa Pancasila. Causa formalis dan causa efisien Pancasila (asal mula bentuk, asal mula karya) dalam sejarah ideologi Pancasila pernah mengalami pengaburan, sejarawan Nugroho Notokusanto menyimpulkan bahwa penggali-penggali utama Pancasila adalah tiga orang : Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno, Bung Karno merupakan salah satu penggali saja. Sejarah siapa “perumus” Pancasila perlu diluruskan, begitu menurut Asvi Warman Adam (sejarawan LIPI) dalam bukunya Membongkar Manipulasi Sejarah. Kontroversi pelaku dan peristiwa (2009 : 26-31), selama pemerintahan orde baru sengaja direayasa sejarah Perumusan Pancasila. Hal ini, bertalian dengan strategi pengendalian sejarah dengan cara mengecilkan jasa Soekarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto dalam panggung sejarah nasional.

AB. Kusuma dalam makalah “Menelusuri Dokumen Historis Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan”, berdasarkan notula yang ditemukan kembali tahun 1989, menyatakan “tidak benar” Yamin yang pertama mengungkap dasar Negara Pancasila, Yamin justru mengakui Bung Karno sebagai satu-satunya penggali Pancasila. Panitia lima yang

diketahui Hatta, juga “wasiat” Hatta pada keluarga Bung Karno menegaskan Soekarno yang pertama berpidato mengenai Pancasila.

Dr. Anhar Gonggong menyatakan Bung Karno amat berperan dalam tiga peristiwa yang terkait proses lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945. Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai penyampai gagasan yang sudah di kepala beliau sejak muda (1918, 1927), 22 Juni 1945 sebagai ketua panitia 9 (Tim 9) yang melahirkan Piagam Jakarta, kemudian 18 Agustus sebagai ketua PPKI yang lalu dipilih sebagai presiden RI. Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno yang secara eksplisit menyampaikan pidato Pancasila. Formulasi pidato 1 Juni 1945 itulah melalui dinamika pembicaraan diantara “*founding fathers*” menjadi Piagam Jakarta, finalnya rumusan otentik pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

Hatta dalam buku yang berjudul “Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan” yang disusun oleh putrinya Meutia Farida Swasono pada halaman 627-628 dimuat testamen Bung Hatta pada Guntur Soekarno Putra menegaskan bahwa pada sidang pertama BPUPKI mengemukakan pertanyaan “Negara Indonesia yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?”. Kebanyakan anggota tidak ada yang menjawab pertanyaan itu, takut akan menimbulkan persoalan filosofis yang berkepanjangan. Inginnya langsung membicarakan Undang-Undang Dasar. Bung Karno yang menjawab pertanyaan itu dengan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sesudah itu sidang mengangkat panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila pidato Soekarno tersebut. Panitia kecil 9 orang itu yang merumuskan kembali termasuk menata sila-silanya. Sila ke-5 Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila yang diletakkan di atas. Internasionalisme atau peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kebangsaan Indonesia yang semula diletakkan diatas menjadi sila ke-3 Persatuan Indonesia. Sila ke-4 yang semula diletakkan sebagai sila ke-3 mufakat atau demokrasi menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ke-5 kesejahteraan sosial dalam rumusan Bung Karno sila keempat menjadi keadilan sosial. Pada tanggal 22 Juni 1945 pembaruan rumusan panitia 9 itu diserahkan kepada BPUPKI, dinamakan “Piagam Jakarta”. Kemudian



## Kegiatan Pembelajaran 1

Piagam Jakarta dijadikan “Pembukaan” UUD 1945 sehingga “Pancasila dan UUD” menjadi dokumen pokok.

Dokumen pokok itu yang diterima dan disahkan oleh PPKI pada 18-08-1945 dengan sedikit perubahan. Mencoret 7 perkataan di belakang Ketuhanan yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”. Sungguhpun tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja, pemimpin-pemimpin umat kristen di Indonesia Timur berkebaratan, jika tujuh kata itu dibiarkan saja sebab tertulis dalam pokok dari dasar negara, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Begitu bunyi testamen Hatta.

Pada tanggal 16 s.d. 20 Februari 1959 diadakan seminar Pancasila di Sasono-Hinggil Dwi Abad alun-alun kidul, Yogyakarta. Moh. Yamin sebagai anggota Dewan Nasional menjadi pemrasaran seminar, prasarannya berjudul: “Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional”. Pada halaman 31 menyatakan dengan tegas bahwa: “Menurut sejarah dan kenyataannya, maka Pancasila adalah penggalian Bung Karno”.

Dari pengakuan para tokoh yang terlibat aktif dalam Causa Formalis, Causa Efisien Pancasila. Mulai BPUPKI, Panitia 9, PPKI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada satupun dari para pendiri Republik Proklamasi yang menyebut Yamin atau Soepomo sebagai penggali Pancasila.
- 2) Para tokoh yang tidak diragukan integritas personal dan intensitasnya dalam merumuskan Dasar Negara dan UUD negara yang akan merdeka, sepakat berpendapat bahwa penggali Pancasila adalah Ir. Soekarno.
- 3) Ir. Soekarno dengan tegas menyatakan menggali Pancasila dari bumi pertiwi sebagai bidan kepala dibantu para bidan yang lain, ini logis dan ada fakta historis, Bung Karno mengusul Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ketua PPKI “versi baru” yang menetapkan-mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Asvi Warman Adam dalam bukunya membongkar manipulasi sejarah. Kontroversi pelaku dan Peristiwa (2009:30) menulis bahwa seyogyanya kita tidak lagi mempermasalahkan kontroversi yang diciptakan Orde Baru mengenai Pancasila lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, peran Soekarno yang sengaja dikerdilkan. Pengkultusan individu perlu dihindari. Jasa Soekarno sebagai penggali Pancasila meski rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 secara objektif adalah hasil rumusan kolektif bapak-bapak pendiri bangsa. Membesar-besarkan peran seseorang adalah inmoral, tapi mengkerdilkan peran seseorang perlu pelurusan sejarah. Agar generasi muda menjadi arif-menghargai pahlawan. Hanya bangsa besar yang mampu menghargai para pahlawannya.

Sekarang di masa modernitas dan globalisasi, seharusnya kita lebih memusatkan perhatian tentang penerapan ideologi di semua bidang kehidupan bangsa bagaimana lebih meyakinkan seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi paling tepat bagi bangsa Indonesia. Pancasila memberi tempat kepada semua agama, golongan, dan suku bangsa yang pluralistik-majemuk Bhinneka Tunggal Ika. "Causa Finalis" Pancasila memang dirumuskan untuk ideologi negara atau dasar negara menjadi ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa jati diri bangsa Indonesia sejak dulu kala.

## 12. Implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan demokrasi

**Demokrasi Pancasila** adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam pada jaman dulu pernah dikenal doktrin manipol usdek disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando **Pemimpin Besar Revolusi** (Bung Karno) kemudian dalam sejarah perkembangannya pernah juga diberlakukan doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando **Bapak Pembangunan** (Soeharto) arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan terutama dalam lembaga-lembaga negara.

Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila.



## Kegiatan Pembelajaran 1

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/ keluarga, yaitu:

- a. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
- b. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurus rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayan rakyat, yaitu tidak boleh bertindak zalim terhadap tuannya, yakni rakyat.

Penelaahan terhadap Demokrasi Pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses. Dalam demokrasi Pancasila sampai dewasa ini penyaluran berbagai tuntutan yang hidup dalam masyarakat menunjukkan keseimbangan

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945<sup>44</sup>. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila:

- 1) pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
- 2) adanya pemilu secara berkesinambungan
- 3) adanya peran-peran kelompok kepentingan
- 4) adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
- 5) demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.

- 6) ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang harus tetap dijunjung tinggi adalah kehidupan politik adalah

- a) sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama
- b) tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
- c) mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan
- d) musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan
- e) menjunjung tinggi setiap keputusan
- f) menerima dan melaksanakan hasil keputusan
- g) keputusan diambil harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
- h) mengutamakan persatuan dan kesatuan
- i) memberi kepercayaan kepada wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan

#### **D. Aktivitas Pembelajaran**

1. Setelah Anda membaca dengan cermat seluruh uraian yang ada, diharapkan Anda akan lebih meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan dan tugas berikut ini.
2. Bacalah dengan seksama Wacana yang ada
3. Dalam mengerjakan tugas-tugas, akan lebih kontekstual apabila Anda mendiskusikannya dengan teman terdekat Anda.
4. Kerjakan Lembar dan Tugas berdasarkan hasil pengamatan Anda.

#### **E. Petunjuk Belajar**

1. Baca dengan teliti buku tentang Pancasila sebagai sistem Pemikiran!
2. Perkaya dengan referensi
  - Buku lahirnya Pancasila (Soekarno)



## Kegiatan Pembelajaran 1

- Buku pengertian Pancasila (Hatta)
  - Pancasila ilmiah populer (Notonegoro)
  - Santiaji Pancasila (Dardji Darmodihardjo)
3. Ikuti prosedur cara belajar efektif
  4. Jika ada masalah/kesulitan diskusikan dengan teman, baca referensi, diskusikan dengan nara sumber!
  5. Kerjakan Lembar Kerja dan tugas berdasarkan hasil pengamatan sehari-hari dan hasil diskusi Anda.

## F. Wacana

Pancasila yang sah, otentik, formal, yuridis konstitusional terdapat dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Kendatipun tidak tersurat, tapi kita tahu bahwa itu Pancasila. Pancasila lahir 25 hari lebih dulu, sebelum program PBB lahir di San Fransisco, USA.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan UUD 1945 (Pancasila) dijiwai oleh dan dalam rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan upaya meneruskan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Berdasarkan benang merah historis itu jelas yang “ada” dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Pancasila merupakan “roh jaman” jawaban terhadap tantangan perubahan jaman. Perubahan untuk menjadi bangsa terjajah, imperium atau koloni bangsa asing yang melakukan penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa lain. Pancasila merupakan sistem pemikiran, sila-silanya merupakan satu kesatuan, satu kebulatan, satu keutuhan

## G. Sumber/alat/bahan

1. Materi modul
2. Buku lahirnya pancasila (Soekarno)
3. Buku pengertian Pancasila (Hatta)
4. Oto Biografi Sukarno
5. Buku Pancasila (Soekarno)
6. Pancasila ilmiah populer (Notonegoro)

7. Santiaji Pancasila (Dardji Darmodihardjo)
8. Referensi lain tentang Pancasila dan Hak Asasi Manusia

### H. Tugas/latihan

No	LK	Keterangan	PPK
1	LK_01	Rasional dan alasan mengapa urutan sila-sila Pancasila yang dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945?	
		<b>Deskripsikan dan Kaitkan dengan pertimbangan muatan nilai karakter yang ter nuat pada saat itu.</b>	

No	LK	Keterangan	PPK
2	LK 02	Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka. Pancasila sebagai Pedoman hidup dan budaya bangsa.	
		Nilai karakter apa saja yang ada di dalam jiwa Pancasila tersebut?	

No	LK	Keterangan	PPK
3	LK 03	Realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup.	
		Amatilah kehidupan di sekolah sehari-hari dalam interaksi peserta didik dengan teman-temannya dan diskripsikan nilai-nilai karakter apa saja yang termuat dan harusnya dipatuhi.	

No	LK	Keterangan	PPK
4	LK 04	Urutan logis sila-sila Pancasila tidak boleh digeser-pindahkan.	



## Kegiatan Pembelajaran 1

		Muatan nilai karakter yang menjadikan pertimbangan dan diskripsikan alasannya!	
--	--	--	--

### TUGAS 01

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Urutan Pancasila dalam Piagam Jakarta diskusikan dan Bandingkan dengan urutan Pancasila yang lahir 1 Juni 1945		

### TUGAS 02

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Diskripsikan uraian dan pengertian Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945		

### TUGAS 03

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Susunan Pancasila sebagai susunan Hierarkhis-Piramidal		



## I. Evaluasi

1. Ketaatan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ditunjukkan melalui sikap/perilaku, antara lain ...
  - A. mengikuti upacara bendera setiap hari senin di sekolah tempat mengajar.
  - B. melakukan kerja bakti di lingkungannya jika memang waktunya tepat.
  - C. memberikan sesuatu kepada orang lain kendati bukan haknya.
  - D. memberi sedekah kepada peminta-nimta secara selektif.
  
2. Suatu nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat, misalnya gotong royong di dalam membersihkan lingkungan dapat menjadi norma apabila...
  - A. Telah dibakukan
  - B. Dihayati secara mendalam
  - C. Telah menjadi kebiasaan
  - D. Telah dikenal secara turun menurun
  
3. Contoh perangai atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma moral dan sekaligus norma hukum adalah sebagai berikut kecuali...
  - A. Membuka praktik aborsi
  - B. Menghina orang yang cacat fisik
  - C. Suka membeli barang-barang hasil curian
  - D. Suka berprasangka jelek kepada orang lain
  
4. Materi yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran: *peserta didik dapat menguasai konsep tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia*, adalah ...
  - A. perbedaan prinsip kedaulatan rakyat dan hukum.
  - B. pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.
  - C. fakta pengusuran pedagang kaki lima.
  - D. pilar demokrasi Pancasila.



## Kegiatan Pembelajaran 1

5. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat obyektif adalah ...
  - A. hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia sejak nenek moyang kita.
  - B. nilai yang terkandung di dalamnya bersifat abstrak, umum dan universal.
  - C. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan.
  - D. petunjuk hidup yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia.





## **Kegiatan Pembelajaran 2**

### **Sikap Moral Kewarganegaraan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia**

Penjabaran materi pada kegiatan pembelajaran 2 ini meliputi pemahaman tentang moral, pemerintahan dan kebebasan berorganisasi yang merupakan cerminan dari penerapan hak asasi manusia.

#### **A. Tujuan**

Dengan membaca modul bagian ke dua ini diharapkan para pembaca dapat

1. Memahami implementasi sikap dan perilaku berdasarkan moral kewarganegaraan secara kontekstual
2. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
3. Memahami sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

#### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

1. Mengidentifikasi contoh sikap dan perilaku berdasarkan moral kewarganegaraan secara kontekstual
2. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
3. Mendeskripsikan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

#### **C. Uraian Materi Sikap Moral Kewarganegaraan**

##### **1. Pengertian moral**

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara.





## Kegiatan Pembelajaran 2

Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadai anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik-buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik-buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan

Pengertian moral/moralitas adalah suatu tuntutan untuk ber perilaku baik yang dimiliki individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Dalam pembelajaran PKn, moral sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia SD, karena proses pembelajaran PPKn SD memang bertujuan untuk membentuk moral anak, yaitu moral yang sesuai dengan nilai falsafah hidupnya

Sebagai pengayaan teoritik, pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam pandangan Lickona (1992) disebut "educating for character" atau "pendidikan watak". Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50 – 51), yakni *Compatible mix of all those virtues identified by religions traditions, literary stories, the sages, and persons of common sense down through history*. Artinya suatu perpaduan yang harmonis dari berbagai kebajikan yang tertuang dalam keagamaan, sastra, pandangan kaum cerdik-pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman. Oleh karena itu Lichona (1992, 51) memandang karakter atau watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni moral knowing, moral feeling, and moral behavior atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral. Bila buah pemikiran Lickona (1992) tersebut kita kaitkan dengan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan SD, nampaknya kita dapat menggunakan model Lickona itu sebagai kerangka pikir dalam melihat sasaran belajar dan isi Pendidikan Kewarganegaraan. Setiap nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butir materi Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya harus memiliki aspek konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.

Pemikiran Lickona ini mengupayakan dapat digunakan untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter demokrasi. Oleh karena itu, materi tersebut harus menyentuh tiga aspek teori (Lickona), seperti berikut

- a. Konsep Moral
  - 1) Kesadaran perlunya kejujuran
  - 2) Pemahaman tentang kejujuran
  - 3) Manfaat kejujuran di masa depan
  - 4) Alasan perlunya kejujuran
  - 5) Bagaimana cara menerapkan kejujuran
  - 6) Penilaian diri sendiri mengenai kejujuran
- b. Sikap Moral
  - 1) Kata hati kita tentang kejujuran
  - 2) Rasa percaya diri kita untuk senantiasa berlaku jujur pada orang lain
  - 3) Empati kita terhadap orang yang jujur
  - 4) Cinta kita terhadap kejujuran
  - 5) Pengendalian diri kita untuk selalu berlaku jujur
  - 6) Rasa hormat kita kepada orang lain yang berlaku jujur
- c. Perilaku Moral
  - 1) Kemampuan bersikap dan berlaku jujur
  - 2) Kemauan untuk senantiasa berusaha jujur
  - 3) Kebiasaan untuk selalu bersikap dan berbuat jujur

Konsep moral dan sikap moral masih sulit untuk dilakukan pengamatan apakah yang bersangkutan telah memahaminya. Berbeda dengan perilaku moral yang telah terwujud dalam perbuatan yang nampak dan secara kasat mata dapat diamati dan diukur untuk kemudian dilakukan penilaian, apakah anak sudah menerapkan sikap moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat.

Pengertian, konsep dan sikap perilaku moral diharapkan dimiliki oleh peserta didik yang pada saatnya menjadi warga negara Indonesia agar memiliki pemahaman yang benar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Berbicara tentang sistem pemerintahan, perlu diawali dengan memberikan pemahaman negara, warga negara dan kewarganegaraan.

## 2. Negara, Warga Negara dan Kewarganegaraan

### a. Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

### b. Warga negara

Warga Negara yaitu seseorang yang secara resmi merupakan anggota dari suatu negara, seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga Negara

Warga negara adalah orang-orang ikut menjadi bagian dari penduduk yang dimana mereka menjadi salah satu unsur negara.

- 1) A.S. Hikam: Mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari “citizenship” yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara lebih berarti objek yang berarti orang-orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.
- 2) Koerniatmanto S: Mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan

yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal – balik terhadap negaranya.

- 3) UU No. 62 Tahun 1958 : menyatakan bahwa negara republik Indonesia adalah orang – orang yang berdasarkan perundang – undangan dan atau perjanjian – perjanjian dan atau peraturan – peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia

Seseorang warga negara indonesia (WNI) adalah warga negara Republik Indonesia yang diakui oleh UU, dan orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara republik indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sesuai dengan kabupaten atau provinsi tempat ia tinggal.

Warga Negara ini merupakan salah satu unsur pokok suatu negara yang dimana masing-masing warga negara memiliki suatu hak dan kewajiban yang tentu perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya

Di dalam UUD 1945 diatur mengenai warga negara di dalam pasal-pasal batang tubuh sebagai berikut:

Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat – syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.



## Kegiatan Pembelajaran 2

Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU. Asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. (oleh Jimly Asshiddiqie)

- 1) *Ius Soli* (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dll
- 2) *Ius Sanguinis* (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B. asas ini dianut oleh negara RRC

### c. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam *UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

- 1) setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
- 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
- 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

- 5) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
- 6) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
- 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
- 8) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 9) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- 10) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- 11) anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- 12) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

- 1) anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
- 2) anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
- 3) anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
- 4) anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI



## Kegiatan Pembelajaran 2

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
- 2) Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwi kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

### **3. Sistem Pemerintahan Di Indonesia**

Selanjutnya bagaimana sikap moral individu sebagai warga negara di Indonesia maka menjadi kewajiban bahwa setiap orang yang ada di negara Indonesia ini untuk mematuhi bagaimana sistem pemerintah yang sedang dianutnya.

- a. Pengertian sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata yaitu, "sistem" dan "pemerintahan". Suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh (Untari, 2006)

Menurut Mas'ud (1989) sistem menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya

Sedangkan kata "Pemerintahan" berasal dari kata dasar "pemerintah", yang menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya " *Modern Political Constitution* " yang dimaksud pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang melekat kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara. Juga merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab guna melaksanakan keamanan dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. (Adisubrata, 2002)

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam arti luas. Menurut Finer istilah pemerintahan paling tidak memiliki empat hal, yaitu:

- 1) Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yang melaksanakan pengawasan atas pihak atau lembaga lain;
- 2) Menunjukkan permasalahan-permasalahan negara atau proses memilih terhadap masalah-masalah yang dijumpai;
- 3) menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas memerintah;
- 4) Menunjukkan cara-cara atau metode atau sistem yang digunakan untuk mengatur masyarakat (Adisubrata, 2002).

Dengan demikian konsep pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kepolisian dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan dalam arti



## Kegiatan Pembelajaran 2

sempit adalah kegiatan-kegiatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif guna mencapai tujuan pemerintahan (Adisubrata, 2002).

Secara umum pengertian sistem pemerintahan terkait dengan sistem politik, mengingat sistem politik berkaitan: (a) sistem pemerintahan (b) sistem kekuasaan yang mengatur hubungan antara individu-individu atau kelompok-kelompok individu satu dengan lainnya dan dengan negara serta hubungan negara dengan negara. Sejalan dengan itu Wahyu, (2008) mengemukakan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari pemerintahan, sedangkan komponen-komponen itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

Ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian sistem pemerintahan, antara lain dikemukakan oleh:

- 1) Sri Sumantri, sistem pemerintahan adalah bagi negara yang menganut ajaran Tri Praja, suatu perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dengan bekerjasama hendak mencapai maksud dan tujuan.
- 2) Ismail Suny mengemukakan sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara.
- 3) Martadisastra memberikan pengertian sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ-organ pemerintah (eksekutif) dengan alat perlengkapan negara-negara lainnya yang ada/menjalankan fungsinya di dalam suatu negara.

Dengan demikian sistem pemerintahan dalam arti luas merupakan suatu kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan wewenang badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan dalam arti sempit merupakan suatu kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan oleh badan eksekutif untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Setiap negara pasti memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Di dunia ini ada beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, serta perbedaan sendiri-sendiri. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi :

- 1) Presidensial
- 2) Parlemerter
- 3) Semi presidensial
- 4) Liberal
- 5) Demokrasi liberal
- 6) Komunis

b. Tipe-tipe sistem pemerintahan

Arend Lijphart dalam buku Sistem Pemerintahan Parlemerter dan Presidensial. Dalam perkembangannya terdapat Sistem Pemerintahan Campuran (kuasi/semu)

Di negara-negara demokrasi modern terdapat dua model utama system pemerintahan dengan berbagai variasinya. Model tersebut adalah system pemerintahan presidensial dan system pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya, dan masing-masing tumbuh dan berkembang atas dasar pemikiran, asumsi, dan sejarahnya. Sistem presidensial (khususnya di Amerika Serikat), beranggapan bahwa pemisahan kekuasaan badan-badan pemerintahan menjadi unsur pokok yang dapat mencegah peluang untuk terjadinya tirani dan kediktatoran. Teori tentang pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini kemudian menjadi doktrin yang mengilhami sistem pemerintahan presidensial dalam konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, sistem parlementer umumnya lebih mengutamakan hubungan kelembagaan yang erat (partnership atau kemitraan dalam konteks Inggris) antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan cabang legislatif pemerintahan. Sistem semi-presidensial



## Kegiatan Pembelajaran 2

merupakan kombinasi antara dua model klasik itu, tetapi dengan variasi dan praktek yang berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain.

### 1) Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana tugas-tugas pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh kepala pemerintahan (Perdana Menteri ) kepada Parlemen.

Sistem pemerintahan parlementer di mana antara eksekutif dan legeslatif terdapat hubungan erat dan saling mempengaruhi. Kabinet bertanggung-jawab dan dibubarkan oleh legislative.

Sistem Pemerintahan Parlementer Umumnya negara berlatar belakang kerajaan menganut sistem pemerintahan parlementer. Misalnya Inggris (dengan sebagian negara-negara yang tergabung dalam Commonwealth-nya), Jepang, Thailand, dan sebagainya.

Karenanya ada yang mengaitkan kedekatan sistem parlementer dengan negara- negara dengan negara-negarakerajaan. Tetapi tidak semua negara dengan pemerintahan parlementer kepala negaranya raja atau ratu. Ada negaranegara republik yang sistem pemerintahannya parlementer seperti Singapura, Italia, dan India. Presiden dalam system parlementer kekuasaannya hanyalah simbolik. Tentunya banyak variasi dan jenis system parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer cenderung labil (tidak mantap), terutama bila dalam Negara itu diterapkan system multipartai. Namun bila menganut dwipartai, di mana satu partai pendukung pemerintah (mayoritas) yang berkuasa (posisi) diimbangi dengan partai oposisi (minoritas), maka kecenderungan kelabilan dapat dikurangi.

Sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan parlemen lebih menonjol dibandingkan kekuasaan presiden atau raja. Dalam hal ini kedudukan presiden atau raja hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan atau kekuasaan riil dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri beserta kabinetnya tunduk dan bertanggung

jawab pada parlemen. Dalam sistem ini hubungan lembaga eksekutif dan legislatif sangat erat. Namun terkesan kedudukan legislatif lebih kuat dari pada eksekutif. Seberapa lama eksekutif memegang kepercayaan dalam mengendalikan pemerintahan sangat tergantung pada kepercayaan dalam mengendalikan pemerintahan sangat tergantung pada kepercayaan dan dukungan parlementer.

Dalam sistem pemerintahan parlementer terdapat ketentuan:

- (a) didasarkan atas prinsip penyebaran kekuasaan,
- (b) terdapat adanya pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan kabinet,
- (c) Perdana Menteri, diangkat oleh kepala negara berdasarkan dukungan mayoritas legislatif,
- (d) Kedudukan dan pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan kabinet dalam arti eksekutif dapat membubarkan parlemen sebaliknya eksekutif/ kabinet dapat meletakkan jabatan manakala parlemen menyatakan mosi tidak percaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem pemerintahan antara lain:

- (1) Sistem pencapaian cita-cita seluruh rakyat
- (2) pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
- (3) bentuk interaksi kehidupan politik riil dalam negara
- (4) penerapan sistem politik

Dengan sistem pemerintahan parlementer dapat diterapkan teori trias politika, baik melalui *separation of powers* (pemisahan kekuasaan) maupun *distribution of powers* (pembagian kekuasaan). Contoh Inggris, Malaysia, India.

## 2) Sistem pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan dimana tugas-tugas pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh presiden (kepala pemerintahan)

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada presiden, sedangkan kekuasaan kehakiman atau pengadilan menjadi tanggung jawab *supreme court* (Mahkamah



## Kegiatan Pembelajaran 2

Agung). Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada parlemen (DPR) atau kongres (senat dan parlemen Amerika).

Dalam praktek sistem pemerintahan presidensial ada yang mengembangkan ajaran *trias politica Montesquieu* secara murni dengan *separation of powers*, seperti Amerika yang dikenal praktek-praktek *chek and balance*. Praktek-praktek demikian bertujuan agar di antara ketiga kekuasaan tersebut selalu terdapat keseimbangan dalam keadaan tertentu. Sistem presidensial pun bisa ditemukan dalam bentuk yang bervariasi di sejumlah negara. Misalnya saja antara sistem pemerintahan presidensial gaya Amerika Serikat berbeda dengan system presidensial gaya Indonesia atau negara- negara lain. Sistem pemerintahan model Amerika secara teoritis merupakan model pemerintahan presidensial yang murni. Konstitusi RI jelas telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial mengandalkan pada individualitas yang mengarah pada *citizenship*. Sistem pemerintahan presidensial bertahan pada *citizenship* yang bisa menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan dan juga kemampuan DPR untuk memerankan diri memformulasikan aturan main dan memastikan janji presiden berjalan.

Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres. Artinya, rakyat menuntut adanya ide pembangunan, bukan semata-mata identitas dari capres. Rakyat tak cukup disugahi jargon abstrak soal NKRI, ideologi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi kebangsaan, atau perlunya penghapusan dikotomi Islam santri dan Islam abangan yang hanya menunjukkan politik identitas. Perlu ada transformasi dari perjuangan identitas menjadi perjuangan ide.

Pemerintahan presidensial Indonesia pasca-Pemilu 2004 juga menghadapi tantangan lain. Tantangan yang dimaksud adalah memastikan adanya pemerintahan yang efektif, yang tidak selalu dirongrong oleh parlemen. Dalam parlemen yang terfragmentasi dan

majemuknya representasi identitas, maka pemerintahan presidensial akan menghadapi tantangan. *Deedlock* eksekutif-legislatif sebagaimana diidentifikasi Lijphart membayang.

Secara konstitusional, DPR mempunyai peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan peranan lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih langsung oleh rakyat. DPR tak akan mudah melakukan impeachment lagi karena ada lembaga pengadil yakni Mahkamah Konstitusi. Meskipun peranannya telah mengecil, DPR dengan kekuatan politik yang menyebar berpotensi untuk terus mengganggu dan mengganggu eksekutif. Dengan perilaku politik yang tak banyak berubah, DPR masih punya peluang untuk mengganjal kebijakan presiden dalam menentukan alokasi budget, DPR masih bisa bermanuver untuk membentuk pansus atau panja, DPR bisa mengajukan undang-undang yang mungkin tak sejalan dengan kebijakan presiden. Di sinilah deadlock bisa terjadi.

Melihat real politik yang ada, koalisi memang diperlukan. Namun, agar tak mengganggu sistem presidensial yang dianut dan adanya pemerintahan yang efektif, koalisi dibangun dengan tetap mengacu pada prinsip sistem presidensial. Presiden berhak menunjuk anggota kabinetnya untuk merealisasikan ide dan program pembangunan yang dimilikinya, jika memang ada. Kehendak mitra koalisi untuk meminta portofolio menteri dan memaksakan ide atau program sebenarnya menyimpang dari prinsip sistem presidensial

Melihat realitas politik yang ada, baik dari sisi konstitusional maupun munculnya capres-capres yang tak mempunyai dukungan mayoritas, banyak orang meragukan akan hadirnya pemerintah yang efektif. Pemerintah yang mampu memberikan arah dan merealisasikan program yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Banyak orang yang khawatir, yang muncul justru adalah pemerintahan yang tidak efektif, namun juga sulit untuk dijatuhkan.



## Kegiatan Pembelajaran 2

Ke depan, sistem pemerintahan presidensial mempunyai pekerjaan rumahnya sendiri, yakni bagaimana mendorong parlemen yang akan didominasi muka-muka baru untuk lebih memikirkan substansi kebijakan. Perpolitikan ke depan harus didorong ke arah adanya kontestasi ide, lebih dari sekadar kontestasi identitas. Perlu ada perjuangan untuk mentransformasikan dari perjuangan identitas menjadi perjuangan ide. Dengan itu, kelembagaan politik lebih mudah dikelola dan lembaga-lembaga di luar mesin politik resmi ikut memegang peranan signifikan. (Budiman Tanuredjo)

### 3) Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem ini telah menyita perhatian para ahli untuk melakukan kajian. Beberapa ahli menyebut sistem ini sebagai campuran antara dua sistem (presidensial dan parlementer) di atas. Pendapat lain menyebutnya sistem yang berada di antara presidensial dan parlementer sebagai sistem presidensial. Ada pula yang menyebutnya kepemimpinan rangkap (karena yang memimpin presiden dan perdana menteri). Negara-negara yang menjalankan system semi-presidensial misalnya adalah Prancis, Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia, Islandia dan Portugal, Srilanka melalui konstitusi 1978 dan sistem yang berlaku dulu di Jerman tahun 1919 di bawah Republik Weimar. Para pendukungnya menyebut sebagai sistem yang mengambil keuntungan dari sistem presidensial. Konstitusi dengan ciri-ciri seperti itu oleh Wheare disebut “Konstitusi sistem pemerintahan parlementer”. Menurut Sri Soemantri, UUD 1945 tidak termasuk ke dalam kedua konstitusi di atas. Hal ini karena di dalam UUD 1945 terdapat ciri konstitusi pemerintahan presidensial, juga terdapat ciri konstitusi pemerintahan parlementer. Pemerintahan Indonesia adalah sistem campuran. Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia tidaklah murni menganut teori trias politika karena selain adanya eksekutif, legislatif dan yudikatif, masih ditambah kekuasaan konstitutif (MPR), eksaminatif atau inpektif (BPK), dan konsultatif dengan sistem distribution of powers atau pembagian kekuasaan

Diatas telah diuraikan tentang sistem pemerintahan dalam arti luas maupun sempit. Selanjutnya di bagian ini akan dibahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana pada umumnya sebuah negara, dipastikan memiliki sistem pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat."

Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan, diantaranya :



## Kegiatan Pembelajaran 2

- Pada tahun 1945 - 1949 = Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial
- Pada tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu
- Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal
- Pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin.

Pada tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002.

### c. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
- 2) Sistem Konstitusional.
- 3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di

bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya.

d. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sesudah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Fungsi Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada dalam keadaan stabil.



## Kegiatan Pembelajaran 2

Agar pemerintah berjalan efektif, maka ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) kemampuan untuk mengawasi angkatan bersenjata;
- 2) kewenangan untuk membuat undang-undang;
- 3) kekuasaan finansial, yaitu kewenangan untuk memungut pajak dan cukai atau bentuk pengutan lain dari rakyat guna biaya mempertahankan negara serta menjalankan hukum. Atau singkat kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kepolisian (Adisubrata, 2002).

Tujuan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam negara. Untuk itulah diperlukan usaha dan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Usaha dan kegiatan itu meliputi bagaimana alat perlengkapan negara mencapai dan dengan apa dicapai. Pelaksana yang diberi tugas untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah *pemerintah*, sedangkan bagaimana dan dengan cara apa mencapai kesejahteraan tersebut *cara mengatur/memerintah*. Cara mengatur/memerintah terkait dengan suatu sistem.

Sistem pemerintah menjelaskan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara mencapai dan bekerja untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat (Alhaj, 2001). Secara umum alat-alat perlengkapan negara yang terdapat dalam suatu negara meliputi:

- 1) Lembaga legislatif, merupakan lembaga atau badan pembuat undang-undang.
- 2) Lembaga eksekutif, merupakan lembaga atau aparat pelaksana undang-undang;
- 3) Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas di bidang kehakiman atau kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap pelanggaran undang-undang.
- 4) Lembaga lainnya yang merupakan alat perlengkapan negara seperti di Indonesia terdapat BPK, Mahkamah Konstitusi, KPU, Komisi Yudisial dsb.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud sistem pemerintahan merupakan hubungan antara organ pemerintah dengan organ-organ lain

yang ada dalam suatu negara. Sistem pemerintahan secara umum ada dua yaitu (1) sistem pemerintahan Presidensiil dan (2) sistem pemerintahan parlementer. Untuk memahaminya dapat dibaca pada perbandingan sistem pemerintah pada sub berikutnya.

#### 4. Kedudukan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik dan pemerintahan di Indonesia di dasarkan pada Trias Politika, dengan sistem *distribution of power* yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggotanya mewakili propinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. DPR berdasarkan pasal 20 ayat (1) memegang kekuasaan membentuk UU, sedangkan DPD berdasarkan pasal 22 ayat (1) dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah dengan pusat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya DPD ikut membahas rancangan tersebut di atas, dan dapat memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, APBN, pajak, pendidikan dan agama, serta mengawasi pelaksanaan UU tersebut (ayat 2 dan 3).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/DPD) semula adalah lembaga tertinggi negara. Sekarang setelah UUD 1945 diamandemen kedudukan MPR sebagai lembaga negara. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR ditambah anggota DPD. Sebelumnya konstitusi UUD 1945, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen **bikameral**, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua. (**bicameral**, adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan



## Kegiatan Pembelajaran 2

menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons).

### **D. Aktivitas Pembelajaran Sistem Pemerintahan**

1. Anda telah membaca tentang Sistem Pemerintahan, baik secara umum, ciri-cirinya dan problematika dalam implementasinya yang terjadi di lingkungan sekitar.
2. Pelajari upaya mengatasi problematika sistem pemerintah yang dapat diamati di lingkungan sekitar
3. Amatilah realita sehari-hari dari contoh yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. (misalnya bagaimana penerapan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di kota Anda)

### **E. Petunjuk Belajar**

1. Baca dengan cermati wacana sebelum mengerjakan!
2. Cari dan baca sumber belajar
3. Lakukan kegiatan sesuai prosedur!
4. Jika ada kesulitan (masalah) diskusikan dengan teman sejawat atau narasumber!
5. Kerjakan LK di dalam format atau bisa juga di kertas terpisah pada kolom PPK terkait dengan nilai-nilai karakter.
6. Diskusikan dengan teman sejawat dan kerjakan Tugas di dalam format pada kertas terpisah isikan pada kolom PPK terkait dengan nilai-nilai karakter.

### **F. Wacana**

Dalam wacana ini semata-mata sekedar untuk memberikan sedikit gambaran bagi pembaca, bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan dalam implementasikan tidaklah semudah dalam teori, yang di bahas sebelumnya. Salah satu contoh yang baru saja dilakukan oleh rakyat di seluruh Indonesia tentang Pilkada serentak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat beberapa permasalahan yang muncul dalam pilkada serentak 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, permasalahan tersebut muncul mulai dari Penyerahan syarat dukungan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon.

Penjelasan Husni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

- a. Adanya temuan dokumen palsu di 8 daerah, di antaranya Simalungun.
- b. Dualisme kepengurusan partai politik di 18 daerah salah satunya di Sumba Timur.
- c. Persyaratan dukungan partai politik terjadi di 16 daerah, di antaranya di Belitung Timur dan Sorong Selatan.
- d. Waktu pendaftaran seperti yang terjadi di satu daerah, yaitu Supiori.
- e. KPU menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan dokumen dari instansi lain, seperti di Jambi dan Kotawaringin Timur.
- f. Persyaratan mantan narapidana yang maju dalam Pilkada ada lima daerah, di antaranya Bengkulu Selatan dan Sidoarjo," kata Husni.
- g. Status peta hanya yang kembali maju dalam Pilkada 2015. Ini terjadi di enam daerah, di antaranya Tanjung Jabung Timur dan Ogan Ilir.
- h. Dukungan terhadap calon perseorangan yang terjadi di 25 daerah.
- i. Syarat kesehatan terdapat di 3 daerah, di antaranya Musi Rawas dan Musi Rawas Utara," ucap Husni.
- j. Perubahan dokumen pencalonan yang terjadi di 3 daerah. Sementara untuk yang
- k. Masalah calon kepala daerah yang bermasalah dengan status tersangkanya di satu daerah, yakni Bengkalis.
- l. Pergantian calon diluar ketentuan, yaitu di Simalungun dan Sigi," kata Husni.
- m. Selain ke-12 masalah tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah kebanjiran sengketa dari pasangan calon kepala daerah di sejumlah daerah.
- n. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, pihaknya telah menerima ratusan sengketa yang diajukan pasangan calon, yang tidak terima atas penetapan KPU di beberapa daerah.



## Kegiatan Pembelajaran 2

- o. "Hampir lebih dari 100, sengketa itu, dari tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sangat banyak," kata Muhammad.
- p. Tahapan sengketa ini, lanjutnya, menjadi penentuan nasib dari pasangan calon dalam Pilkada 2015. Daerah yang mengalami sengketa tersebut diantaranya Nusa Tenggara Barat NTB dan Mataram.
- q. "Tahapan sengketa pencalonan ini kan sangat menentukan tahapan selanjutnya. Kalau peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, ya selesai," jelasnya
- r. Muhammad menambahkan, apabila pasangan calon masih belum menerima hasil tahapan sengketa, maka mereka dapat melanjutkan sengketa ke pengadilan.

## G. Sumber/alat/bahan

- 1. Buku tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia
- 2. Buku ketentuan pemilu dan pilkada
- 3. Undang-Undang Pemilu
- 4. Peraturan Pemerintah
- 5. Peraturan daerah yang terkait

## H. Tugas/Latihan

Kerjakanlah LK berikut:

No	LK	Nama LK	PPK
1	LK-05	Diskusikan dengan teman sejawat tentang aturan yang berlaku dalam hal ketentuan pencalonan kepala daerah.	
		<b>Dari aturan yang ada, kriteria apa saja yang dipersyaratkan terkait dengan calon kepala daera.?</b>	





**Kerjakan Tugas berikut!**

**TUGAS 04\_KB2**

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Buatlah identifikasi permasalahan Pilkada di daerah Anda dengan menyimak, mengamati, menelaah realita pelaksanaan Pilkada yang baru dilakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2015		
Kaitkan dengan Nilai karakter		

**TUGAS 05\_KB2**

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Diskripsikan permasalahan dokumen yang selama ini dilaksanakan di beberapa daerah dan bagaimana meminimalisir adanya: kecurangan, dan perihal pemalsuan dokumen		
Kaitkan dengan Nilai karakter		





## Kegiatan Pembelajaran 2

### TUGAS 06\_KB2

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Anda dan kelompok Anda memiliki calon yang sangat potensi, tetapi tidak memperoleh dukungan dari partai politik yang diharapkan dapat mengusung pencalonan.		
Apa dan bagaimana saran Anda jika hal tersebut terjadi di daerah Anda?  Kaitkan dengan nilai-nilai karakter.!		

### TUGAS\_07 KB2

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Seorang calon peserta pemilu yang telah terpilih oleh lebih dari 50 persen pemilih, dan sebagian besar pemilih.  Karena ketidakpuasan ada kelompok lain yang melakukan protes/unjuk rasa		



menentang hasil pemilukada		
Diskusikan dan buatlah deskripsi, apa pertimbangan mereka yang melakukan protes jika dikaitkan dengan nilai-nilai karakter yang menjadi pertimbangan mereka melakukan tindakan protes /unjuk rasa menentang hasilpemilukada.?		

**TUGAS 08\_KB2**

TUGAS	PPK	KETERANGAN
Seorang yang berpotensi, pintar, memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan energik oleh warga dicalonkan untuk menjadi pemimpin daerah.  Nilai-nilai karakter apa yang menjadi pertimbangan pencalonan oleh warga tersebut.?		

**I. Pengembangan Soal****LK 3 Pengembangan Soal**

Petunjuk:

1. Bacalah bahan bacaan Modul Penilaian Proses dan Hasil Belajar, Kelompok Kompetensi E (Pedagogi).
2. Pelajari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila tidak ada, buatlah kisi kisi.

## Kegiatan Pembelajaran 2

3. Buatlah 3 (tiga) soal pilihan ganda dan 3 (tiga) soal uraian HOTS (*High Order Thinking Skill*)
4. Masing-masing soal ditulis di kartu soal.

### KISI-KISI PENULISAN SOAL

Satuan Pendidikan : Sekolah dasar

Mata Pelajaran : PPKn

No.	Kompetensi Dasar	Kelas	Materi	Indikator	Bentuk Soal
1	Mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia	6	Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya		Pilihan ganda
2	Mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan	3	Perkembangan teknologi, produksi, Komunikasi dan transportasi		Uraian

### Kaidah Penulisan Soal Bentuk Pilihan Ganda

#### a. Materi

- Soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi.
- Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Artinya semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang terkandung dalam pokok soal, penulisannya harus setara, dan semua pilihan jawaban harus berfungsi.

- Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar.

**b. Konstruksi**

- Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.
- Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang ditanyakan.
- Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.
- Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda.
- Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama.
- Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan, "Semua jawaban salah", atau "Semua jawaban benar".
- Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut, dan pilihan jawaban berbentuk angka yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis.
- Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi.
- Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya.

**c. Bahasa**

- Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.
- Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat.
- Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata tersebut pada pokok soal.

**Kaidah penulisan soal uraian**

**a. Materi**

- Soal harus sesuai dengan indikator
- Batasan jawaban yang diharapkan harus jelas
- Isi materi sesuai dengan pelajaran
- Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang sekolah/kelas

**b. Konstruksi**



## Kegiatan Pembelajaran 2

- Rumusan kalimat soal harus menggunakan kata tanya/perintah yang menuntut jawaban terurai.
- Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal
- Buatlah pedoman penskoran segera setelah soal disusun dengan pendekatan skor 1 benar dan salah 0.
- Hal-hal yang menyertai soal: tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas dan terbaca.

### c. Bahasa

- Butir soal menggunakan kalimat yang sederhana dan komunikatif
- Butir soal tidak mengandung kata yang dapat menyinggung perasaan siswa
- Butir soal tidak menggunakan kata yang menimbulkan penafsiran ganda



**KARTU SOAL I**  
**Tahun Ajaran : 2016/2017**

Jenis Sekolah : Sekolah dasar      Nama Penyusun :  
 Kelas/Smt : 5  
 Mata Pelajaran : PPKn

<p><b>Kompetensi Dasar</b>          Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup</p>	<p>Buku Sumber :</p>
<p>Materi  <b>Penerapan Nilai, Norma, Moral Pancasila</b></p>	<p>SOAL :</p> <p>Dalam demokrasi Pancasila, putusan diambil secara musyawarah berdasarkan ....</p> <p>A. pemungutan suara          B. suara terbanyak          C. kata sepakat          D. semangat kekeluargaan</p>
<p><b>Indikator :</b>  <b>Disajikan gambar siswa dapat mengidentifikasi senjata khas daerah</b></p>	<p>KUNCI JAWABAN :</p> <p>B</p>
<p>NO SOAL          1</p>	<p>KUNCI JAWABAN :</p> <p>B</p>





Kegiatan Pembelajaran 2

**KARTU SOAL II**  
**Tahun Ajaran : 2017**

Jenis Sekolah : Sekolah dasar      Nama Penyusun :  
Kelas/Smt : 6  
Mata Pelajaran : PPKn

Kompetensi Dasar Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat	Buku Sumber :
Materi <b>Penerapan Nilai, Norma, Moral Pancasila</b>	SOAL: Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara .... A. konsensus B. memaksakan kehendak C. mengikuti perintah atasan D. mematuhi instruksi pemerintah
Indikator : Mengidentifikasi keberagaman sosial masyarakat	
NO SOAL 5	KUNCI JAWABAN: A





## Evaluasi

1. Ukuran baik dan buruk dalam pandangan moralitas modern juga didasarkan penalaran (rasio), tetapi masih dapat digugurkan oleh...
  - A. suara hati
  - B. fakta empiris
  - C. pendapat para pakar
  - D. pendapat masyarakat umum
  
2. Konsep pemikiran tentang moralitas yang bersifat naturalistik adalah...
  - A. sesuai dengan hukum alam
  - B. berkembang secara alamiah
  - C. sesuai dengan lingkungan alamnya
  - D. berdasar pengalaman hidup duniawi/alami
  
3. Contoh peragai atau perbuatan yang melanggar norma agama,norma moral dan sekaligus norma hukum adalah sebagai berikut kecuali...
  - A. Membuka praktik aborsi
  - B. Menghina orang yang cacat fisik
  - C. Suka membeli barang-barang hasil curian
  - D. Suka berprasangka jelek kepada orang lain
  
4. Contoh sikap atau perbuatan yang melanggar norma agama dn norma moral tetapi tidak melanggar norma hukum adalah...
  - A. Mencoba bunuh diri
  - B. Mencoba melakukan perampokan
  - C. Meminjam motor orang lain tanpa izin
  - D. Tidak mengikuti tradisi keagamaan yang berlaku di masyarakat





## Evaluasi

5. Dilihat dari segi mengikatnya antara nilai dan norma dapat dikemukakan bahwa...
- A. Nilai itu lebih mengikat dibanding norma
  - B. Norma itu lebih mengikat dibanding nilai
  - C. Nilai dan norma itu sama-sama mengikat
  - D. Nilai dan norma itu sama-sama tidak mengikat



## Penutup

Pancasila Sebagai dasar Negara mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena setiap sila pancasila dirumuskan sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia sehingga berlaku secara universal. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia sehingga pancasila selayaknya dijadikan pedoman dan pandangan hidup untuk mencapai tujuan Negara sesuai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Apabila nilai-nilai pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan terwujud.

Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang.

Keputusan bersama merupakan cerminan penerapan Pancasila. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama

Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, reformatif dan dinamis dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi idealistis, normatif dan realistik



## Penutup

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki karakteristik bhineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan wilayah, bahasa, adat, budaya, suku bangsa dan sebagainya. Konsekuensi dari keberbedaan tersebut adalah perlakuan hak dan kewajiban realitanya dalam pemahaman dan Pengertian Hak dan Kewajiban sebagai anggota masyarakat, ada persamaan disamping perbedaan.

Sistem pemerintahan ialah suatu sistem yang membicarakan bagaimana hubungan lembaga negara dari suatu pemerintahan. Secara umum alat perlengkapan lembaga negara meliputi: (1) lembaga legislatif, (2) eksekutif, (3) yudikatif dan (4) lembaga lain yang merupakan alat perlengkapan negara seperti BPK, KPU, Komisi Yudisial. Dengan demikian disimpulkan bahwa sistem pemerintahan terkait dengan sistem politik, mengingat sistem politik terkait dengan (1) sistem pemerintahan dan (2) sistem kekuasaan. yang mengatur hubungan antara individu-individu atau kelompok individu yang satu dengan lainnya dan dengan negara serta hubungan negara dengan negara.



## Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Arief Budiman. 2015. *Sistem Perekonomian PANCASILA dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Jakarta. Gramedia
- Bagian Proyek PKN dan BP, 2003. *Pedoman Penataan Kembali dan Peningkatan Kualitas Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler PPKn Sekolah Menengah*. Jakarta: Bagian Proyek PKN dan BP Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- Choirul Mahfud. 2006/2015. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Degeng, Nyoman S. Tanpa tahun. *Teori Pembelajaran 1: Taksonomi Variabel*. Malang: Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Terbuka.
- De Porter, Bobbi & Mike Hernacki. 2003. *Quantum Learning. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung: Kaifa.
- Hotma P. Sibuea, Dr. S.H., M.H (2011): *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik*. Jakarta Erlangga.
- Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Prof. Dr. (2009): *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta. Gramedia
- Juwono Sudarsono Prof. Dr., (2011): *Politik, Ekonomi, Dan Pertahanan*, Jakarta Erlangga
- Kumpulan Karayan. 2010. *Rindu Pancasila*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1996. *Pokok-pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mohammad Monib Islah Bahrawi. 2015. *Islam Dan HAM Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia
- Pedoman Umum. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. 2005. LPPKB. Jakarta: P.T. Cipta Prima Budaya.



## Daftar Pustaka

Robertus Rober. 2015. *Politik Hak Asasi Manusia & Transisi Di Indonesia Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY*. Jakarta: Erlangga.

Suparman Marzuki, (2014) : *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta Erlangga

Suwarsono Muhammad. 2015. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah





## Kunci Jawaban

### Pembelajaran 1

1. mengikuti upacara bendera setiap hari senin di sekolah tempat mengajar.
2. Telah dibakukan
3. Suka berprasangka jelek kepada orang lain
4. pilar demokrasi Pancasila.
5. nilai yang terkandung di dalmnya bersifat abstrak, umum dan universal.

### Pembelajaran 2

1. Fakta empiris
2. Berdasar pengalaman hidup duniawi/alami
3. Suka berprasangka
4. Mencoba bunuh diri
5. Norma lebih mengikat dibanding nilai







# MODUL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN



Kelompok  
Kompetensi

**SD KELAS TINGGI**  
TERINTEGRASI PENGUATAN  
PENDIDIKAN KARAKTER  
DAN PENGEMBANGAN SOAL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2017**

Jalan Jendral Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon/Fax: (021) 5797 4130

[www.gtk.kemdikbud.go.id](http://www.gtk.kemdikbud.go.id)